



BULETIN VIRAJATI

MEDIA KOMUNIKASI ONLINE SESKOAD

Edisi XIII Oktober 2021

SESKOAD

Terbaik, Terhormat dan Disegani

Konflik di Berbagai negara dan upaya penanganannya



ISSN 2086-9312



9772086931295

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah, Buletin Virajati Seskoad Online edisi ke XIII bulan Oktober 2021 kembali hadir dihadapan para pembaca dengan menyajikan berbagai informasi yang menarik dan bermanfaat dari berbagai belahan negara di dunia.

Pada edisi kali ini, Buletin Virajati Seskoad mengangkat tajuk “Konflik di Berbagai Negara dan Upaya Penanganannya”. Tema ini diangkat mencermati terjadinya konflik di berbagai negara dunia, seperti konflik berkepanjangan antara Republik Chad dengan Lybia, Konflik antara Armenia dan Azerbaijan, konflik Perbatasan Lembah Fergana, dan konflik di Negara Somalia. Dalam penanganan konflik perlu dilakukan resolusi konflik yaitu metode penyelesaian konflik atau pengeluaran konflik dimana sumber konflik dihilangkan atau dihapuskan dengan cara saling bersepakat atau bernegosiasi dan kegiatan lain serupa antara pihak yang berkonflik, agar tidak terus berkepanjangan.

Selain mengulas materi utama, dalam buletin edisi kali ini juga menyajikan sejumlah tulisan penting dan menarik, yakni *Total Defence* Strategi Sinergitas Militer dan Sipil dalam Sistem Pertahanan Negara Singapura, Sistem Pertahanan Negara Iran dalam Kerjasama Militer dan Sipil, Hubungan Antar Militer dan Sipil dalam Menggagalkan Demokrasi Negara Malaysia dan Strategi Beberapa Negara dalam Menghadapi Pandemi Covid – 19 serta beberapa ulasan dari belahan dunia lainnya.

Kami berharap berbagai tulisan yang disajikan bermanfaat bagi prajurit TNI AD dan kalangan masyarakat luas, menjadi bacaan literasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan guna memberikan sumbangsih untuk masyarakat, bangsa dan negara. Demi peningkatan kualitas Buletin Seskoad kedepan, saran masukan pembaca kami nantikan.

Redaksi

BULETIN VIRAJATI

Pelindung

Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS, M.A.

Pembina

Brigjen TNI Fulad, S.Sos., M.Si,

Penasihat

Brigjen TNI Dwi Endrosasongko, S.Sos.

Pimpinan Redaksi

Kolonel Inf Drs. Paiman

Wakil Pimpinan Redaksi

Kolonel Inf Roy H.J. Sinaga, S.Sos.

Redaktur Pelaksana

Kolonel Chb Muhamad Mukson

Kolonel Inf Singgih Pambudi Arianto, S.I.P., M.M.

Sekretaris Redaksi

Mayor Chb Untung

Staf Redaksi

Mayor Inf Gede Agus Dian Pringgana, S.Sos., MMAS.

Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, S.E., MMAS.

Mayor Kav Barid Budi Susila, S.Sos.

Reporter

Letda Inf Asmadi

Fotografer

Serma Winarna

Desain Grafis

Sertu Faizal Ridho Ilhami

Penata Muda/III-A Rendra Boyke, S.Pd., M.Pd.

Alamat Redaksi

Seskoad Jl. Jend. Gatot Subroto 96 Bdg

Alamat Email

buletinvirajati@gmail.com

Website

http://www.seskoad.mil.id

Facebook

Https://www.facebook.com/Buletinvirajati

Instagram

Https://www.instagram.com/Buletinvirajati

Disclaimer :

- Semua hasil karya yang dimuat dalam “Jurnal Virajati” adalah menjadi hak cipta <http://www.seskoad.mil.id>.
- Tulisan dalam “Jurnal Virajati” merupakan buah pemikiran dan menjadi tanggung jawab penulis, serta tidak merepresentasikan pandangan organisasi Seskoad.
- Ide dan gagasan berbentuk tulisan essay dapat disampaikan kepada redaksi melalui email Redaksi

Konflik di Berbagai Negara dan upaya penanggulangannya

DAFTAR ISI

UPAYA PENYELESAIAN DIPLOMASI REPUBLIK CHAD
MENGAKHRI KONFLIK BERKEPANJANGAN DENGAN
LIBYA

Kolonel Inf Ir. Joko Tri Hadimantyo, M.M.

4

TOTAL DEFENCE STRATEGI SINERGISASI MILITER
DAN SIPIL DALAM SISTEM PERTAHANAN NEGARA
SINGAPURA

Letkol Czi Jaka Katmanto, S.P.

DIPLOMASI PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA
NEGARA ARMENIA DAN AZERBAIJAN

Major Inf Habibi S.E.

12

SISTEM PERTAHANAN NEGARA IRAN DALAM
KERJASAMA MILITER DAN SIPIL UNTUK
MENGHADAPI ANCAMAN

Major Inf Albertinus Mariano

PENGALIHAN DUKUNGAN DIPLOMATIK REPUBLIC OF
PALAU DARI TAIWAN KE TIONGKOK DITINJAU DARI
PERSPEKTIF DIPLOMASI DAN NEGOISIASI

Major Inf Roni Faturrahman

20

HUBUNGAN ANTAR MILITER DAN SIPIL DALAM
MENEGAKKAN DEMOKRASI NEGARA MALAYSIA

Major Inf Syarbaini, S.Pd.

PENGARUH SENGKETA PERBATASAN LEMBAH
FERGANA TERHADAP MASA DEPAN REGIONALISASI
ASIA TENGAH

Major Caj Margono, A.Md

26

STRATEGI NEGARA ETHIOPIA DALAM MENGHADAPI
PANDEMI COVID - 19

Major CPN Thoufiq Hidayat, S.E.

PENYELESAIAN KONFLIK DI NEGARA SOMALIA
MELALUI DIPLOMASI DAN NEGOSIASI

Major Cpm Barnabas Irianto, S.H

32

UPAYA KANADA DALAM PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS

Major Kav Wihardjoko



UPAYA PENYELESAIAN DIPLOMASI REPUBLIK CHAD MENGAKHIRI KONFLIK BERKEPANJANGAN DENGAN LIBYA

Kolonel Inf Ir. Joko Tri Hadimantyo, M.M.



Pendahuluan

Republik Chad (*Republic of Chad*) adalah negara di Afrika Tengah yang terkurung daratan. Sebelah utara berbatasan dengan Negara Libya (*State of Libya*); sebelah selatan dengan Republik Afrika Tengah; di barat dengan Niger; di timur dengan Sudan; dan di barat daya berbatasan dengan Nigeria dan Kamerun. Negara ini disebut sebagai "Jantung Mati Afrika" mengingat jarak dan sebagian besar kawasannya beriklim gurun. Di utara, terdapat Pegunungan Tibesti, pegunungan yang paling besar di gurun Sahara. Sebagai negara bekas jajahan Perancis yang terbesar, Republik Chad termasuk negara miskin. Lebih dari 75% penduduknya berada dalam keadaan melarat. Pada 2000-an, keadaan sudah relatif membaik, karena pendapatan per kapitanya sudah melebihi US\$1.000.



Peta Wilayah Republik Chad

Konflik perbatasan antara Republik Chad dan Negara Libya merupakan sebuah konflik militer sporadis yang terjadi di wilayah bagian utara Chad yang berbatasan langsung dengan wilayah negara Libya, daerah ini dikenal dengan Jalur Aouzou. Konflik ini berlangsung selama kurang lebih sepuluh tahun, dimulai tahun 1978 dan berakhir pada tahun 1987. Intervensi Libya telah terjadi sebanyak 4 (empat) kali yaitu tahun 1978, 1979, 1980-1981 dan 1983-1987.

Libya mendapatkan dukungan dari Legiun Islam, faksi Pro-Libya yaitu Pemberontak Chad *FROLINAT*, *GUNT* (1979-1986) dan *Codos* (1983-1986) serta *PLO* (1987) yang mendapat dukungan dari Jerman Timur dan Uni Sovyet.

Sementara itu Chad mendapat bantuan dari Pemerintahan Perancis tahun 1978, 1983 dan 1986, dengan dukungan dari Faksi Anti-Libya Chad, yaitu *FAT* (1978-1979), *FAN* (1978-1983), *FANT* (1983-987) dan *GUNT* (1986-1987), negara Perancis, pasukan antar Afrika, Zaire, Nigeria, Senegal, dan didukung pula oleh Sudan, Mesir, Israel, Irak, dan Amerika Serikat.

Permasalahan konflik perbatasan ini berasal dari adanya Perang Saudara di Chad bagian utara pada tahun 1968, dimana perang saudara ini mendapat intervensi dari Libya. Perang saudara ini terjadi antara kaum muslimin dan kaum nasrani Chad.

Intervensi Libya didorong oleh adanya rasa solidaritas atas nama kesamaan etnis dan agama, Libya memberikan dukungan dan bantuan kepada muslim Chad yang men-dominasi Jalur Aouzou. Tidak hanya sekedar ingin mendukung, dalam perkembangannya ternyata negara Libya juga mulai berupaya mengklaim Jalur Aozou sebagai bagian dari wilayahnya. Dari latar belakang uraian tersebut di atas, rumusan permasalahan yang dapat dikembangkan, adalah : Pertama, Apa penyebab utama konflik perbatasan Chad-Libya sehingga berlangsung selama 10 tahun (1978-1987)?, Kedua, Bagaimana langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh Republik Chad ?, dan Ketiga, Bagaimana upaya penyelesaian diplomasi dalam mengakhiri konflik perbatasan Chad-Libya yang berkepanjangan ini?.

Penyebab Utama Konflik

Awal mula terlibatnya militer dalam perang ini dimulai pada 29 Januari 1978, dimana Libya memberikan bantuan berupa kendaraan lapis baja, artileri dan dukungan dari udara, sementara pemberontak Chad FROLINAT (sekutu Libya) yang bertempur langsung di medan perang. Alasan keikutsertaan Libya (dalam hal ini Presiden Muammar Khadafi yang berkuasa tahun 1969) pada konflik perbatasan di Chad adalah ambisinya untuk menguasai wilayah Jalur Aouzou, bagian paling utara Chad yang diklaim kaya akan minyak dan mineral (uranium) serta sebagai bagian dari Libya berdasarkan sebuah perjanjian yang belum disahkan saat periode kolonial.

Negara Libya mengklaim wilayah perbatasan Aouzou karena berpedoman pada perjanjian Perancis – Italia tahun 1935 antara Benito Mussolini dan Pierre Laval, dimana dalam ketentuan tercakup antara lain Italia akan menerima jalur perbatasan Aouzou ke wilayah Libya. Kebijakan ini gagal dua tahun kemudian setelah Italia bergeser ke orbit Jerman dengan menyimpulkan Pakta Baja dengan Nazi Jerman, yang menyebabkan instrumen ratifikasi Perjanjian Mussolini-Laval tidak pernah dipertukarkan dengan Perancis. Meskipun demikian, perbatasan baru secara konvensional dianggap sebagai batas selatan Libya hingga tahun 1955.

Pada tahun 1972, menurut sejarawan Mario Azevedo, ambisi Libya untuk menguasai Jalur Aouzou terwujud, dimana didirikannya negara bagian republik Islam di bawah naungan Libya, yang akan membawa hubungan dekat dengan Libya, dan mengambil alih Jalur Aouzou, mengusir kekuasaan Perancis dari kawasan Chad, dan menggunakan Chad sebagai basis untuk memperluas kekuasaannya di Afrika Tengah.

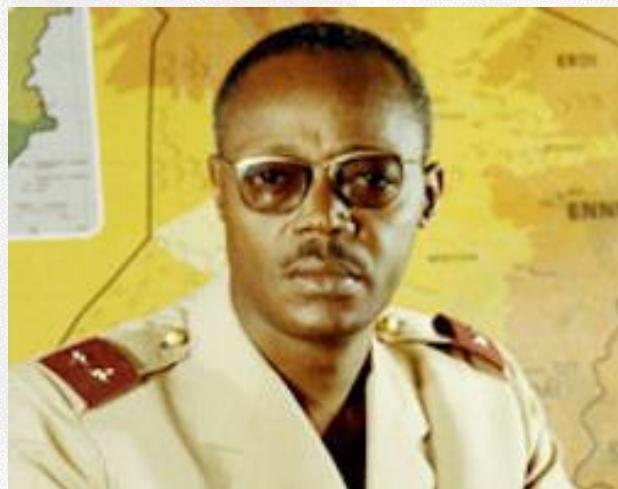
Pertimbangan itu lah yang membuat pasukan Libya untuk pertama kalinya melakukan intervensi aktif. Serangan Ibrahim Abatcha dilancarkan oleh Angkatan Bersenjata Rakyat Libya pada tanggal 29 Januari 1978 terhadap pos-pos yang dimiliki pemerintah Chad di daerah utara Chad, seperti Faya-Largeau, Fada dan Ounianga Kebir. Serangan ini dianggap berhasil, sehingga Goukouni dan Libya menguasai seluruh Prefektur BET. Serangan Goukouni-Khadafi ini dibalas oleh Malloum dengan reaksi memutuskan hubungan diplomatik negara Libya tanggal 6 Februari 1978 dan melaporkan kepada PBB tentang keterlibatan Libya. Isu tentang pendudukan Jalur Aouzou oleh Libya pun muncul lagi; namun, pada tanggal 19 Februari 1978, setelah jatuhnya Faya, Malloum terpaksa menerima gencatan senjata dan menarik tuntutannya atas desakan Negara Perancis, sehingga tanggal 24 Februari 1978 hubungan diplomatik dibuka kembali di Sebha, Libya.

Pemberontak FROLINAT yang dipersenjatai dengan persenjataan modern dan artilleri kembali menyerang 1.500 tentara Garnisun Kota di Ati, sebuah kota (430 km barat daya dari N'Djamena tanggal 19 Mei 1978. Namun berkat bantuan pasukan Chad, Legiun Asing Perancis dan resimen infanteri marinir ketiga, pemberontak FROLINAT dalam pertempuran selama 2 hari berhasil dipukul mundur dengan meninggalkan persenjataan modern yang dibawa. Kunci dalam pertempuran ini adalah keunggulan Angkatan Udara Perancis karena pilot-pilot Angkatan Udara Libya menolak untuk melawan pesawat-pesawat Perancis. Setelah kegagalan itu, pemberontak FROLINAT Goukouni terjadi friksi dengan Khadafi, Libya dan akhirnya berkompromi dengan Perancis.

Di N'Djamena, kehadiran dua angkatan bersenjata yang sebaya (FAN yang dipimpin oleh Perdana Menteri Habré dan FAT yang dipimpin oleh Presiden Malloum) memicu pertempuran N'Djamena yang mengakibatkan keruntuhan negara dan bangkitnya elit-elit utara. Insiden kecil mulai membesar pada tanggal 12 Februari 1979 menjadi pertempuran berskala penuh antara pasukan Habré dan Malloum, dan pertempuran semakin menggelora pada tanggal 19 Februari 1979 ketika tentara Goukouni memasuki ibu kota untuk bertempur bersama Habré melawan FAT.



Perdana Menteri Habré Pimpinan FAN



Presiden Malloum Pimpinan FAT

Pada tanggal 16 Maret 1979, ketika konferensi perdamaian internasional pertama diadakan, 2.000 - 5.000 orang terbunuh dan 60.000 - 70.000 terpaksa mengungsi dari ibu kota. Pasukan Chad yang jumlahnya sudah menipis meninggalkan N'Djamena dan kota tersebut jatuh ke tangan pemberontak.

Para pemberontak mereorganisasi diri mereka di selatan di bawah kepemimpinan Wadel Abdelkader Kamougué. Selama pertempuran, garnisun Perancis hanya menonton saja dan kadang membantu Habré seperti saat mereka meminta Angkatan Udara Chad untuk menghentikan pengeboman dari udara.

Dari awal Habré sudah mengisolasi dirinya dari anggota GUNT lainnya. Ia juga dibenci oleh anggota GUNT lainnya. Sifat Habré yang bermusuhan dengan Libya ditambah dengan ambisi dan kekejamannya membuat para pengamat menyimpulkan bahwa sang pemimpin perang sepertinya hanya akan puas dengan jabatan tertinggi. Terdapat keyakinan bahwa konfrontasi bersenjata antara Habré dan faksi pro-Libya akan terjadi, khususnya konflik antara Habré melawan Goukouni.

Seperti yang telah diduga, bentrok di ibu kota antara FAN yang dipimpin oleh Habré dan kelompok-kelompok pro-Libya secara perlahan semakin menguat. Pada akhirnya, pada tanggal 22 Maret 1980, sebuah insiden kecil (seperti pada tahun 1979) memicu pertempuran N'Djamena kedua. Dalam waktu sepuluh hari, perselisihan antara FAN melawan Angkatan Bersenjata Rakyat Goukouni (keduanya memiliki sekitar 1.000 - 1.500 pasukan di kota tersebut) telah menelan ribuan korban jiwa dan pengungsian sekitar setengah populasi ibu kota. Beberapa pasukan Perancis yang tersisa (sebagian besar sudah meninggalkan Chad pada tanggal 4 Mei 1980) menyatakan netral; sikap yang sama diambil oleh pasukan perdamaian dari Zaire.



Angkatan Bersenjata Rakyat Goukouni, 22 Maret 1980

FAN mendapat bantuan ekonomi dan militer dari Sudan dan Mesir, sementara Goukouni menerima bantuan dari FAT yang dipimpin oleh Kamougué dan CDR yang dikepalai oleh Acyl serta bantuan artileri Libya.

Pada tanggal 6 Juni 1980, FAN mengambil alih kekuasaan kota Faya. Peristiwa ini membuat Goukouni gelisah, sehingga ia menandatangani perjanjian persahabatan dengan Libya pada tanggal 15 Juni 1980. Perjanjian itu memberikan izin kepada Libya untuk bebas bertindak di Chad dan melegitimasi intervensi Libya di negara tersebut. Pasal pertama perjanjian tersebut juga menegaskan komitmen pertahanan bersama di antara Chad dan Libya dan menyatakan bahwa ancaman terhadap salah satu akan dianggap sebagai ancaman terhadap keduanya.

Semenjak bulan Oktober, tentara Libya yang dipimpin oleh Khalifa Haftar and Ahmed Oun dikirim ke Jalur Aouzou lewat udara dan beroperasi bersama dengan pasukan Goukouni untuk menduduki kembali kota Faya. Kota ini lalu digunakan sebagai tempat pengumpulan tank, artileri dan kendaraan tempur lapis baja yang bergerak kearah selatan menuju ibu kota Chad, N'Djamena.

Serangan dimulai pada tanggal 6 Desember 1980 yang dipimpin oleh tank T-54 dan T-55 buatan Uni Soviet dan dikoordinasi oleh penasihat militer dari Uni Soviet dan Jerman Timur. N'Djamena jatuh pada tanggal 16 Desember 1980.

Pasukan Libya yang berjumlah sekitar 7.000 sampai 9.000 orang dan paramiliter legiun Islam Pan-Afrika, 60 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, telah diterbangkan sejauh 1.100 kilometer dari perbatasan selatan Libya, sebagian diangkut lewat udara atau dengan menggunakan transporter tank dan sebagian dengan tenaga mereka sendiri. Perbatasan selatan Libya sendiri terletak sekitar 1.000 sampai 1.100 kilometer dari pangkalan militer utama Libya di pesisir Laut Tengah. Intervensi Libya menunjukkan sebuah kemampuan logistik yang mengesankan, dan merupakan kemenangan militer pertamanya dan pencapaian politik Khadafi yang penting.

Walaupun ia telah dipukul mundur hingga ke pengasingan dan pasukannya dibatasi di zona perbatasan Darfur, Habré tetap berpendirian teguh.

Pada tanggal 31 Desember 1980, ia mengumumkan di Dakar bahwa ia akan meneruskan perang gerilya melawan GUNT.

Pada tanggal 6 Januari 1981, Khadafi dan Goukouni mengeluarkan pengumuman resmi di Tripoli yang menyatakan bahwa Libya dan Chad telah memutuskan "untuk berupaya mencapai persatuan penuh di antara kedua negara".

Rencana penyatuan ini memicu perlawanan di Afrika dan langsung dikutuk oleh Perancis. Pada tanggal 11 Januari 1981, Perancis menawarkan penguatan garnisun Perancis di negara-negara Afrika yang bersahabat dengan Perancis, dan pada tanggal 15 Januari armada laut Perancis di Laut Tengah disiagakan.

Libya membalasnya dengan mengeluarkan ancaman embargo minyak, sementara Perancis mengancam akan bereaksi jika Libya menyerang negara tetangga lainnya. Persetujuan ini juga ditentang oleh semua menteri GUNT yang hadir bersama dengan Goukouni di Tripoli (kecuali Acyl).

Banyak pengamat berkeyakinan bahwa Goukouni menerima persetujuan tersebut akibat gabungan ancaman, tekanan yang kuat dan bantuan finansial yang dijanjikan oleh Khadafi. Sebelum mengunjungi ibu kota Libya, Goukouni telah mengirim 2 panglima besarnya ke Libya untuk melakukan konsultasi. Di Tripoli, Goukouni diberitahu oleh Khadafi bahwa dua orang ini telah dibunuh oleh "para pembangkang Libya", dan ia harus menerima rencana penyatuan jika ia tidak mau kehilangan kekuasaannya.

Akibat perlawanan yang dihadapi oleh Khadafi dan Goukouni, mereka mencoba menyatakan bahwa yang dimaksud adalah "penyatuan" bangsa dan bukan negara, dan hal tersebut diklaim sebagai langkah awal menuju kerjasama yang lebih erat. Namun, reputasi Goukouni sebagai seorang negarawan dan nasionalis sudah terlanjur rusak.

Goukouni mencoba menanggapi tekanan internasional dengan menyatakan bahwa pasukan Libya berada di Chad atas permohonan pemerintah Chad, dan para penengah internasional sebaiknya menerima keputusan pemerintahan Chad yang sah. Dalam pertemuan yang diadakan pada bulan Mei, Goukouni menyatakan bahwa mundurnya pasukan Libya dari Chad bukan prioritas, tetapi ia akan menerima keputusan Organisasi Kesatuan Afrika. Goukouni pada saat itu tidak dapat menolak bantuan militer Libya karena ia membutuhkan bantuan tersebut untuk melawan FAN yang dipimpin oleh Habré, apalagi FAN sendiri didukung oleh Mesir dan Sudan dan mendapat dana dari CIA lewat Mesir.



Goukouni Oueddei



Muammar Khadafi

Hubungan antara Goukouni dan Khadafi mulai memburuk. Tentara Libya ditugaskan di berbagai tempat di Chad utara dan tengah dengan jumlah yang mencapai sekitar 14.000 tentara pada bulan Januari - Februari 1981.

Tentara Libya membuat kesal banyak pihak di GUNT karena telah mendukung faksi Acyl dalam perselisihan dengan milisi-milisi lainnya, termasuk bentrok dengan Angkatan Bersenjata Rakyat yang terjadi pada akhir bulan April. Terdapat juga usaha untuk melibyanisasi penduduk setempat, yang membuat banyak orang menyimpulkan bahwa "penyatuan" bagi Libya berarti Arabisasi dan penyebaran budaya politik Libya, khususnya penyebaran gagasan yang terkandung di dalam Buku Hijau.

Di tengah perselisihan yang terjadi antara Legiuner Islam Khadafi melawan pasukan

Goukouni pada bulan Oktober serta rumor bahwa Acyl merencanakan kudeta untuk menguasai kepemimpinan GUNT, pada tanggal 29 Oktober 1981 Goukouni meminta mundurnya pasukan Libya dari wilayah Chad. Ia meminta agar pasukan Libya mundur dari wilayah ibu kota paling tidak pada tanggal 31 Desember 1981. Ia juga ingin agar pasukan Libya digantikan oleh pasukan dari Organisasi Kesatuan Afrika yang disebut "Pasukan Inter-Afrika" (IAF). Khadafi menuruti permintaan ini dan pada tanggal 16 November semua pasukan Libya meninggalkan Chad dan kembali ditugaskan di Jalur Aouzou.

Keputusan Libya untuk mundur mengejutkan banyak pengamat. Salah satu alasannya adalah karena Khadafi ingin menjadi tuan rumah konferensi Organisasi Kesatuan Afrika pada tahun 1982 dan mengambil alih jabatan kepresidenan Organisasi Kesatuan Afrika. Alasan lain adalah kesulitan yang dihadapi oleh Libya di Chad. Tanpa dukungan rakyat Chad dan dunia internasional, Libya tidak dapat mengambil risiko perang melawan Mesir dan Sudan yang didukung oleh Amerika. Khadafi masih tetap memiliki ambisi di Chad, tetapi ia perlu mencari pemimpin baru di Chad karena Goukouni terbukti tidak dapat dipercaya.

Langkah Strategis Republik Chad dalam Penanganan Konflik

Pasca kemunduran Libya dari Chad, kondisi Chad masih dalam ketegangan. Situasi yang memanas ini disebabkan berbagai peristiwa perang saudara. Dimulai dengan pertempuran oleh pasukan Habre yang berusaha merebut pemerintahan. Rezim GUNT tidak tinggal diam serangan Habre dibalas dan tindakan ini didukung Libya, kembali Libya secara perlahan mulai ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri Chad.

Melihat keadaan ini, Perancis yang sebelumnya mulai menjauh kembali mendekat, Perancis dengan alasan ingin membasmikan pemberontak dan menghilangkan pengaruh Libya di Chad, kemudian melakukan serangan yang dikenal dengan operasi Manta pada awal tahun 1984.

Hubungan Chad-Libya yang bermula dari konflik perbatasan, dan meluas ke dalam masalah intervensi Libya yang terlalu jauh tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran Perancis. Setelah melakukan operasi Manta, dengan menyetujui usul Muammar Khadafi untuk sama-sama mundur dari Chad dalam rangka perdamaian, Perancis menarik mundur pasukannya.

Usul ini diajukan pada tanggal 30 April 1984. Presiden Perancis, François Mitterrand, menerima tawaran itu, dan pada tanggal 17 September mereka berdua mengumumkan bahwa pasukan Perancis dan Libya akan mulai mundur pada tanggal 25 September dan penarikan pasukan akan diselesaikan pada tanggal 10 November. Persetujuan ini pada awalnya dipuji oleh media sebagai bukti kecakapan diplomatik Mitterrand dan kemajuan dalam upaya untuk menyelesaikan krisis di Chad. Perancis menghormati batas waktu yang telah ditetapkan, tetapi Libya hanya menarik beberapa pasukan dan tetap mempertahankan 3.000 pasukan di Chad Utara. Tindakan Libya tidak hanya memermalukan Perancis, tetapi juga mengakibatkan tuduh menuduh di antara Perancis dan Chad.

Menurut Nolutshungu, persetujuan bilateral tahun 1984 antara Perancis dan Libya mungkin telah memberikan kesempatan kepada Khadafi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan Chad sembari memperkuat martabatnya di dunia internasional. Selain itu, persetujuan ini memberi kesempatan baginya untuk memaksa Habré agar ia mau menerima perjanjian perdamaian yang melibatkan boneka-boneka Libya.

Khadafi salah membaca tindakan mundurnya pasukan Perancis sebagai kesediaan untuk menerima kehadiran militer Libya di Chad dan aneksasi seluruh prefektur BET secara *de facto* oleh Libya. Kesalahan besar Khadafi akan menjerumuskannya karena tindakannya malah memicu pemberontakan GUNT melawan Khadafi dan ekspedisi baru Perancis pada tahun 1986.

Selama periode antara tahun 1984 dan tahun 1986, tidak ada pertempuran.

Situasi tenang ini berakhir ketika Libya melakukan agresi untuk kesekian kalinya. Pada tanggal 14 Februari, Operasi Epervier dimulai, membawa 1.200 tentara Perancis dan beberapa skuadron Jaguars di Chad. Agresi Perancis memaksa Libya melakukan balas dendam, Libya kemudian menyerang balik melalui perang Tibesti. Dalam perang ini Libya menderita kerugian. Rupanya Libya masih belum ingin menyerah, perlawanannya terakhir melalui perang Toyota.

Kali ini musuh utama yang dihadapi adalah pemerintah Chad sendiri yang berhasil menggulingkan kekuasaan pemerintah sebelumnya yang pro Libya. Dan dalam perang ini sekali lagi Libya mengalami kerugian dan menyetujui gencatan senjata. Pada tahun 1986, saat perang akan berakhir, pasukan Chad seluruhnya bersatu dan merebut Chad Utara. Akibatnya, pasukan Libya harus berhadapan dengan angkatan darat musuh yang memiliki misil anti-tank dan misil anti-udara. Setelah terebutnya Chad Utara, Libya dan Chad terlibat dalam *Great Toyota War* (Perang Toyota) dimana dalam konflik ini menggunakan mobil-mobil Toyota Land Cruiser Pick up dan Hilux sebagai kendaraan perangnya. Selama perang tersebut, pasukan Libya dapat dikalahkan dan dipukul mundur oleh Chad dan akhirnya Khadafi mendapat tekanan dari dalam dan luar negeri, sehingga ia menyetujui gencatan senjata yang dipelopori oleh Organisasi Kesatuan Afrika dan pada tanggal 11 September 1987, Libya mengakhiri konflik ini.

Upaya Penyelesaian Diplomasi

Malloum dan Khadafi kembali membuka hubungan diplomatik pada tanggal 24 Februari 1978 di Sebha, Libya, dalam sebuah konferensi internasional yang dihadiri oleh Presiden Niger Seyni Kountché dan Wakil Presiden Sudan sebagai wasit (pelera). Akibat tekanan dari Perancis, Sudan dan Zaire, Malloum terpaksa menandatangi persetujuan Benghazi pada tanggal 27 Maret 1978 dan ia mengakui FROLINAT. Selain itu, persetujuan ini menyerukan pendirian komite militer gabungan Libya-Niger yang bertugas untuk menerapkan isi persetujuan tersebut.

Persetujuan ini juga berisi syarat lain yang penting untuk Libya yang meminta agar semua kehadiran keberadaan Perancis di Chad dihilangkan. Persetujuan yang gagal ini merupakan strategi Khadafi untuk memperkuat kekuasaannya di Chad dan Goukouni. Perjanjian ini juga melemahkan kewibawaan Malloum di Chad selatan. Mereka menganggap hal ini sebagai bukti kelemahan kepemimpinannya.

Konferensi perdamaian internasional diadakan di Kano, Nigeria, yang dihadiri oleh negara-negara tetangga Chad dan juga oleh Malloum, Habré dan Goukouni. Persetujuan Kano ditandatangani pada tanggal 16 Maret 1979 oleh semua yang hadir, dan Malloum lalu mengundurkan diri dan digantikan oleh dewan negara di bawah kepemimpinan Goukouni. Hal ini dipicu oleh tekanan dari Perancis dan Nigeria yang ingin agar Goukouni dan Habré berbagi kekuasaan. Perancis menganggap tindakan ini sebagai strategi mereka untuk memutus semua hubungan antara Goukouni dan Khadafi. Beberapa minggu kemudian, faksi yang sama membentuk Pemerintahan Transisi Persatuan Nasional (GUNT), yang disatukan oleh keinginan bersama untuk mengusir Libya dari Chad.

Walaupun sudah menandatangani persetujuan Kano, Libya murka karena GUNT tidak memasukkan pemimpin dari pasukan Volcan dan tidak mengakui klaim Libya atas Jalur Aouzou. Semenjak 13 April 1979, militer Libya sudah cukup aktif di Chad utara dan mereka juga memberikan dukungan kepada gerakan separatis di selatan. Namun, mereka baru menanggapi secara serius setelah tanggal 25 Juni 1979 dengan melayangkan sebuah ultimatum yang meminta pembentukan pemerintahan yang baru dan lebih inklusif.

Pada tanggal 26 Juni 1979, 2.500 tentara Libya menyerang Chad dan bergerak menuju kota Faya-Largeau. Pemerintah Chad lalu meminta bantuan dari Perancis. Pasukan Libya pada awalnya dihalangi oleh milisi Goukouni, dan lalu dipaksa mundur oleh pesawat pengintai dan pengebom Perancis.

Pada bulan yang sama, faksi-faksi yang tidak diikutsertakan dalam pemerintahan

GUNT mendirikan pemerintahan tandingan di Chad utara yang disebut Front untuk Aksi Gabungan Sementara (FACP).

Sebuah konferensi perdamaian kembali diadakan di Lagos, Nigeria, pada bulan Agustus akibat perang melawan Libya, boikot ekonomi oleh Nigeria dan tekanan internasional. Sebelas faksi yang ada di Chad turut serta dalam konferensi ini. Persetujuan Lagos ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 1979. GUNT yang baru dibentuk dan terbuka untuk semua faksi. Tentara Perancis meninggalkan Chad dan digantikan dengan pasukan perdamaian multinasional Afrika. GUNT yang baru mulai bertugas pada bulan November, dengan Goukouni sebagai Presiden, Kamougué sebagai Wakil Presiden, Habré sebagai Menteri Pertahanan dan Acyl sebagai Menteri Luar Negeri. Walaupun melibatkan Habré, Khadafi merasa puas dengan jumlah orang-orang pro-Libya yang dilibatkan dalam pemerintahan GUNT.

Mahkamah Internasional merupakan organisasi hukum utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas memeriksa perselisihan atau sengketa antar negara dan memutuskan kasus hukumnya. Keputusan yang diberikan Mahkamah Internasional bersifat mengikat bagi pihak yang bersengketa, sehingga negara yang bersangkutan wajib memenuhi keputusan tersebut. Apabila negara yang bersengketa tidak menjalankan kewajiban tersebut, negara lawan sengketa dapat mengajukan permohonan kepada Dewan Keamanan PBB yang memiliki kewenangan untuk merekomendasikan agar keputusan itu dilaksana-kan. Tugas lain dari Mahkamah Internasional adalah memecahkan masalah yang ada diantara kedua Negara yang sedang mengalami bentrok yang tidak terselesaikan.

Keputusan Mahkamah Internasional terkadang ada yang menguntungkan dan ada yang tidak, meskipun keputusan tersebut ada yang merugikan salah satu pihak Negara tersebut harus mengakui karena keputusan dari mahkamah internasional bersifat paten dan tidak bisa diganggu gugat dan apa bila ada Negara yang memprotes, maka Negara tersebut akan terkena sanksi.

Maka dari itu lebih baik menuruti hasil yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Internasional. Ketika terdapat banyak pelanggaran gencatan senjata, insiden yang terjadi relatif kecil. Kedua pemerintahan dengan segera memulai manuver diplomatik untuk membawa kepada sisi mereka opini dunia atas kasus ini, bahwa konflik ini berlanjut Pemerintahan Reagan melihat bahwa pembukaan konflik ini adalah kesempatan terbaik untuk menurunkan Khadafi. Relasi antara kedua negara terus menerus membaik, dengan Khadafi memberi tanda bahwa ia menginginkan untuk menormalisasikan relasi dengan pemerintah Chad, menuju poin pengakuan bahwa perang itu telah menjadi sebuah kesalahan. Pada bulan Mei tahun 1988, pemimpin Libya menyatakan bahwa ia akan mengakui Habré sebagai presiden Chad "sebagai hadiah untuk Afrika"; hal ini memimpin ke arah pembukaan kembali relasi diplomatik antara kedua negara pada tanggal 3 Oktober. Pada tanggal 31 Agustus 1989, Chad dan Libya bertemu di Aljazair untuk menegosiasikan Kerangka Pesetujuan dalam Perdamaian atas Perselisihan Teritori. Khadafi setuju untuk mendiskusikan dengan Hissene Habré tentang jalur Aouzou dan untuk membawa hal ini ke Mahkamah Internasional untuk menjamin kekuasaan jika pembicaraan bilateral gagal.

Setelah setahun atas pembicaraan yang tidak meyakinkan, kedua belah pihak memasukan hal ini pada bulan September tahun 1990 kepada Mahkamah Internasional.

Hubungan Chad-Libya menjadi lebih baik ketika Idriss Deby yang didukung Libya menggantikan Habre pada tanggal 2 Desember. Khadafi adalah kepala negara pertama yang mengakui rezim baru, dan ia juga menandatangani perjanjian persahabatan dan koperatif dalam berbagai diplomasi, tetapi Deby menyatakan bahwa ia akan tetap bertempur untuk menjaga jalur tersebut jauh dari tangan Libya. Permasalahan Jalur Aouzou diakhiri dengan baik pada tanggal 3 Februari 1994 ketika hakim di Mahkamah Internasional dengan jumlah 16 banding 1 membuat Jalur Aouzou menjadi milik Chad.

Pengadilan atas kasus tersebut dilaksanakan tanpa gangguan, keduanya menandatangani pada tanggal 4 April sebuah persetujuan berisi tentang implementasi pengadilan. Dengan diawasi oleh pengamat internasional, mundurnya tentara Libya dari jalur ditandai pada tanggal 15 April dan selesai pada tanggal 10 Mei. Transfer terakhir terjadi pada tanggal 30 Mei ketika kedua belah pihak menandatangani sebuah deklarasi gabungan yang menyatakan bahwa mundurnya pasukan Libya telah berhasil.

Gencatan senjata antara Chad dan Libya yang diadakan dari tahun 1987 hingga 1988, diikuti oleh negosiasi yang gagal selama beberapa tahun berikutnya. Akhirnya tahun 1994 Pengadilan Internasional keputusan ditemukan (oleh mayoritas 16 banding 1) mendukung kedaulatan Chad atas jalur Aouzou, dan mengakhiri klaim Libya. Itu Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendirikan Grup Pengamat Jalur Aouzou Perserikatan Bangsa-Bangsa di Resolusi 915 (Mei 1994) untuk memantau penarikan pasukan Libya, dan menghentikannya masuk Resolusi 926 (Juni 1994), saat penarikan selesai.

Kesimpulan

Konflik antara Chad dan Libya merupakan konflik yang memperebutkan perbatasan jalur Aouzou. Jalur Aouzou diklaim sebagai wilayah yang kaya akan uranium, perselisihan atas kekuasaan daerah Aouzou antara Chad dengan Libya menyebabkan munculnya konflik. Keterlibatan Libya diawali pada 29 Januari 1978 dengan mengerahkan armada perangnya, namun pada tahun 1986 pola berubah drastis menjelang akhir perang, ketika sebagian besar pasukan Chad bersatu untuk mengusir Libya dari Chad utara dengan tingkat persatuan yang tidak pernah terlihat sebelumnya di Chad, sehingga akhirnya tanggal 11 September 1987, Libya dapat dipukul mundur dan kemenangan berada di pihak Chad.

Kolonel Inf Ir. Joko Tri Hadimantoyo, M.M
Abituren Sepa PK/PSDP 1995 jabatan sekarang
adalah Kasiintel Kasrem 143/Halu Oleo Kodam
XIV/Hasanuddin.



DIPLOMASI PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA NEGARA ARMENIA DAN AZERBAIJAN

Major Inf Habibi S.E.

Pendahuluan

Armenia dan Azerbaijan merupakan dua negara bekas pecahan Uni Soviet, yang terletak di wilayah Kaukasus Selatan. Di tahun 1988, ketika kebijakan glasnost oleh Presiden Mikhail Gorbachev mulai djalankan, muncul demonstrasi di wilayah otonomi oblast Nagorno-Karabakh yang mayoritas dihuni oleh etnis Armenia namun berada dalam teritori Azerbaijan yang menuntut untuk digabungkan dengan Armenia. Tuntutan tersebut tentu saja ditolak oleh Azerbaijan, yang merasa Nagorno-Karabakh adalah wilayahnya. Uni Soviet sendiri menolak untuk melakukan transfer wilayah Nagorno-Karabakh kepada Armenia (Cornell, 1999).

Di tahun 1991 ketika pemerintahan komunis Uni Soviet runtuh, wilayah Nagorno-Karabakh mendeklarasikan bahwa yurisdiksi Azerbaijan sudah tidak berlaku dan menyatakan diri sebagai negara merdeka. Konflik antara etnis Armenia dan Azerbaijan sendiri mulai semakin intensif sejak akhir 1989, dan meningkat menjadi perang berskala penuh setelah pasukan Soviet meninggalkan wilayah tersebut di tahun 1992. Di tahun 1993, pasukan Armenia mulai melakukan serangan besar-besaran yang mengakibatkan setidaknya sekitar 450.000-500.000 orang dari etnis Azeri mengungsi.

Pasukan Armenia bahkan berhasil menduduki sekitar 20-25 persen dari total wilayah Azerbaijan. Pada bulan Mei 1994, gencatan senjata kemudian diumumkan kembali oleh Menteri Pertahanan Rusia Pavel Grachev. Dokumen perjanjian gencatan senjata ditandatangani oleh menteri pertahanan Armenia dan Azerbaijan dua bulan berikutnya. (Bartuzi, 2008).



Peta Wilayah Negara Armenia dan Azerbaijan

Sementara itu, pada tahun 1992 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) membentuk Minsk Group untuk mencari solusi damai terkait konflik yang sedang berlangsung di Nagorno-Karabakh. OSCE Minsk Group sebagai mediator konflik rutin memfasilitasi pertemuan antara pemerintah Armenia dan Azerbaijan agar kedua belah pihak dapat segera mencapai titik

temu penyelesaian konflik. (Jafarova: 2011, hal. 126-130). Dalam proses perdamaian yang dilaksanakan oleh OSCE Minsk Group, terdapat tiga negara yang memiliki peran utama dalam mediasi konflik Nagorno-Karabakh, yaitu Rusia, Amerika Serikat, dan Perancis. Rusia sebagai anggota *co-chairman* dalam OSCE Minsk Group adalah negara yang paling aktif terlibat dalam proses mediasi. Antara tahun 2009 hingga 2012 saja Rusia setidaknya telah menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi OSCE Minsk Group sebagai fasilitas negosiasi antara Armenia maupun Azerbaijan (Kristiani, 2013: hal 17-22).

Meski upaya penyelesaian konflik telah dilakukan, namun baik Azerbaijan dan Armenia masih saling melakukan pelanggaran gencatan senjata. Antara tahun 2010 hingga 2016 saja sudah terjadi berkali-kali baku tembak dan pertempuran antara kedua negara. Contohnya; pada bulan Juni 2010, empat serdadu wajib militer Armenia dan seorang prajurit Azerbaijan tewas setelah adanya baku tembak di dekat desa Chaylu, Nagorno-Karabakh (Fuller, 2010). Tahun 2014, terjadi kembali konflik dalam skala yang cukup besar di sekitar garis kontak Nagorno-Karabakh dan Azerbaijan, yang disertai penembakan jatuhnya helikopter Mi-24 milik Armenia oleh militer Azerbaijan. Jumlah total korban tewas diperkirakan mencapai 18 orang pada kedua belah pihak (Kucera, 2014). Di bulan April 2016, situasi justru makin memburuk dengan adanya serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Azerbaijan dengan melibatkan persenjataan berat seperti tank, helikopter, dan artileri berkaliber besar. Jumlah korban pada kedua belah pihak diperkirakan mencapai 350 jiwa, termasuk di antaranya warga sipil (US. Department of State, 2016).

Baik Armenia maupun Azerbaijan saling menyalahkan satu sama lain dalam tiap pelanggaran gencatan senjata yang terjadi. Namun, yang paling perlu diperhatikan adalah mengapa hingga saat ini konflik antara kedua negara masih terus berlangsung.

Sejak perjanjian gencatan senjata disepakati oleh kedua belah pihak pada tahun 1994, hingga kini antara kedua negara masih belum

mencapai kata damai meski proses mediasi yang difasilitasi oleh OSCE Minsk Group telah rutin dilakukan. Keduanya pun masih saling bersikukuh mempertahankan klaimnya atas Nagorno-Karabakh.

Penelitian sebelumnya kebanyakan membahas mengenai upaya resolusi konflik di Nagorno-Karabakh; diantaranya mengenai resolusi konflik Armenia dan Azerbaijan oleh pihak ketiga, semisal oleh Rusia (Kristiani, 2013), OSCE Minsk Group (Arnaya, 2015), Uni Eropa (Hasanov, 2014; Ghazaryan, 2015), dan Amerika Serikat (Sutiono, 2015) dalam menengahi konflik Nagorno-Karabakh. Peran dan efektivitas organisasi internasional secara umum dalam membantu resolusi konflik di Nagorno-Karabakh juga telah dibahas, dengan mengambil studi kasus peran PBB, OSCE, CIS, dan Uni Eropa (Javarofa, 2011). Topik serupa juga pernah diajukan oleh Remy Fajar Wibawa yang menggasumsikan bahwa konflik yang masih terus berlanjut antara Armenia dan Azerbaijan disebabkan oleh ketidaksiapan serta ketiadaan netralitas dari mediator itu sendiri, terutama OSCE dan CIS (Wibawa, 2017).

Meski demikian, dapat dikatakan belum banyak penelitian yang membahas mengenai penyebab kegagalan upaya mediasi antara Armenia dan Azerbaijan, yang hingga kini masih menemui jalan buntu. Oleh karena itu, penulis akan mencoba menjawab mengapa hingga saat ini mediasi masih belum menemui keberhasilan dan mencoba menelaah peran apa yang dimainkan oleh Rusia dan AS sebagai *co-chairman* dalam OSCE Minsk Group dilihat serta dikaitkan dari akar permasalahannya.

Pembahasan.

Langkah-langkah strategis dalam diplomasi dan negosiasi yang telah dipergunakan Negara tersebut.

Sebelum OSCE terlibat membantu menangani konflik Nagorno-Karabakh, sudah ada beberapa upaya mediasi yang dilakukan oleh beberapa negara. Pada tahun 1991-1992; Rusia, Kazakhstan dan Iran adalah yang pertama kali memprakarsai upaya mediasi. Rencana pertama resolusi konflik yang

diajukan pada saat itu meliputi gencatan senjata serta pembentukan pemerintahan konstitusional di Nagorno-Karabakh. Sayangnya, upaya tersebut gagal sebab baik Armenia maupun Azerbaijan bersikeras untuk mempertahankan posisinya melalui pertempuran. PBB sendiri tidak bisa berbuat banyak sebab pada saat itu Uni Soviet masih belum secara resmi dibubarkan. Selain itu, kesulitan tenaga dan pendanaan juga dialami oleh PBB yang pada saat itu tengah disibukkan menangani konflik di Afrika. Oleh karenanya, OSCE mendapat mandat dan legitimasi sebagai mediator utama konflik berdasarkan Bab 7 dalam Piagam PBB (Jafarova, 2011: hal. 119).

Hal inilah yang membuat OSCE Minsk Group sebagai satu-satunya organisasi internasional yang terlibat konflik Nagorno-Karabakh sejak awal dan secara resmi memegang peranan sebagai mediator utama, dengan Rusia bersama Amerika Serikat dan Perancis sebagai ketiga *co-chairman* dalam OSCE Minsk Group (Nikkar-Esfahani, 2009: hal. 179). OSCE Minsk Group sendiri memiliki 12 negara anggota, yaitu Armenia, Azerbaijan, Belarus, Ceko, Perancis, Jerman, Italia, Rusia, Swedia, Turki, dan Amerika Serikat. Tugas utama dari OSCE Minsk Group sendiri adalah menyediakan kerangka kerja yang layak untuk resolusi konflik sejalan dengan proses negosiasi yang didukung oleh Minsk Group, memperoleh konklusi dari negara penandatangan perjanjian terkait penghentian konflik bersenjata demi terlaksananya konferensi Minsk, dan mempromosikan proses perdamaian dengan penerjunan pasukan perdamaian multinasional OSCE (Leckie, 2005: hal. 9). Semenjak dibentuknya OSCE Minsk Group, setidaknya sudah terdapat empat proposal solusi untuk konflik Nagorno-Karabakh. Di antaranya; package plan, step-by-step plan, common state plan dan terakhir rencana pertukaran teritori (Leckie, 2005: hal. 9). Mulai dari tahun 1993 hingga Desember 1994, Rusia memainkan peranan penting dalam menciptakan perdamaian di kawasan. Dimulai dari tahun 1994, sudah terdapat beberapa upaya mediasi konflik Nagorno-Karabakh, yang akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Di bulan Juni 1997, proposal mengenai solusi konflik yang dikenal dengan nama ‘package solution’ diajukan oleh co-chair Minsk Group disaat kunjungan ke kawasan Nagorno-Karabakh. Proposal itu mengusulkan penarikan pasukan bersenjata Armenia dan penghentian perrusuhan serta persetujuan mengenai status final Nagorno-Karabakh dalam satu tahap. Selain itu, poin yang diajukan dalam proposal tersebut antara lain; otonomi penuh Nagorno-Karabakh dalam teritori Azerbaijan, pengembalian pengungsi dan tunawisma ke rumahnya masing-masing, penerjunan pasukan penjaga perdamaian OSCE, serta pencabutan blokade ekonomi (Nikkar-Esfahani, 2009: hal. 247-248). Meskipun Azerbaijan setuju untuk memulai negosiasi berdasarkan proposal tersebut, proposal ini ditolak oleh Armenia dengan mengklaim bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ide penentuan status Nagorno-Karabakh dalam konferensi Minsk (Garibov, 2015: hal. 80).
2. Beberapa bulan berikutnya, pada September 1997 co-chair Minsk Group kembali mengajukan proposal baru berdasarkan pendekatan ‘stage-by-stage’ atau ‘step-by-step’ sebagai bentuk resolusi konflik. Berdasarkan proposal tersebut, pada tahap pertama direncanakan untuk membebaskan enam region yang diduduki oleh Armenia, penerjunan pasukan penjaga perdamaian OSCE, mengembalikan para pengungsi ke region yang telah dibebaskan, dan memulihkan komunikasi di wilayah konflik. Pada tahap kedua, permasalahan mengenai Lachin dan Shusa akan diselesaikan serta prinsip utama mengenai status Nagorno-Karabakh akan diadopsi. Sebagai hasilnya, Konferensi OSCE di Minsk akan segera dilangsungkan meski Presiden Armenia pada saat itu, Levon Ter-Petrosyan setuju dengan proposal tersebut, proposal tersebut ditolak dengan keras oleh lawan politiknya di Armenia dan justru mengecapnya sebagai “pengkhianat bangsa”. Hal ini turut memaksanya lengser dari jabatannya sebagai presiden.

3. Dengan naiknya Robert Kocharian sebagai presiden Armenia pada Maret 1998, bekas seorang pemimpin separatis Nagorno-Karabakh, Armenia memutuskan untuk menarik persetujuan dari proposal ‘step-by-step’. Kocharian sendiri mengambil sikap yang lebih keras; kemerdekaan Nagorno-Karabakh tidak dapat dinegosiasi dan harus dijamin dalam setiap persetujuan (Caspersen, 2017: hal. 175).
4. Pada November 1998, Co-chair Minsk Group kembali mengajukan proposal berdasarkan konsep “*common state*”. Berdasarkan konsep ini, Nagorno-Karabakh memiliki status sebagai negara dan unit teritorial dalam bentuk republik, yang dimana bersama dengan Azerbaijan membentuk sebuah *common state* dalam batas teritori Azerbaijan yang diakui secara internasional. Namun, Azerbaijan menolak proposal ini dikarenakan hal ini sangat melanggar kedaulatan Azerbaijan dan berlawanan dengan prinsip mendasar yang telah ditetapkan di Lisbon (Garibov, 2015: hal. 81).
5. Pada tahun 1999 atas inisiatif sendiri, baik Presiden Azerbaijan maupun Presiden Armenia memiliki rencana penyelesaian konflik tersendiri setelah berkali-kali melakukan pertemuan. Rencana tersebut dinamakan “*Goble Plan*”, yang mengusulkan pertukaran teritori antara kedua negara; sebagai ganti kontrol Armenia terhadap Nagorno-Karabakh dan koridor Lachin, maka Azerbaijan akan mendapatkan ganti lahan berupa koridor di selatan Armenia yang menghubungkan antara wilayah utama Azerbaijan dengan enklave Nakhichevan, dan juga nantinya akan terhubung langsung dengan teritori Turki. Namun, proposal ini tetap menimbulkan pertentangan sengit di dalam negeri. Di Azerbaijan sendiri, proposal ini dianggap sebagai bentuk “penyerahan diri” atas klaim terhadap Karabakh, dan tiga penasihat utama Presiden Azerbaijan Heydar Aliyev mengundurkan diri karena adanya proposal tersebut.
- Sementara proposal tersebut juga dinilai kontroversial bagi Armenia karena harus menyerahkan wilayah Meghri kepada Azerbaijan, yang artinya Armenia akan kehilangan wilayah perbatasannya dengan Iran (Caspersen, 2017: hal. 177).
6. Setelah tahun 2001, format pembicaraan berubah karena baik presiden Armenia maupun Azerbaijan menolak untuk melakukan tatap muka secara langsung (Leckie, 2005: hal. 19). Pada tahun 2002, diadakan kembali pertemuan antara perwakilan khusus dari Presiden Armenia dan Presiden Azerbaijan yang dilakukan di Praha, Ceko. Pembicaraan langsung antara menteri luar negeri Armenia dengan Azerbaijan kemudian dikenal dengan istilah “*Prague Process*”. Sejak tahun 2004. Meski demikian, pertemuan antar menteri luar negeri tersebut tidak membawa hasil yang berarti (Garibov, 2015: hal. 82). Proses mediasi antar kedua negara masih terus berlanjut dan belum membuat hasil signifikan hingga saat ini Azerbaijan (Garibov, 2015: hal. 83).
7. Meski sudah lebih dari dua dekade semenjak dicapainya perjanjian gencatan senjata pada tahun 1994, dan sudah berkali-kali dilakukan negosiasi yang mempertemukan kedua pihak yang difasilitasi oleh OSCE Minsk Group, belum ada hasil atau pencapaian yang signifikan hingga sejauh ini. Baik Azerbaijan maupun Armenia tetap bersikukuh mempertahankan posisi dan tuntutannya hingga saat ini. Armenia masih tetap bertahan di teritori Azerbaijan yang didudukinya meski sudah berulang kali diminta oleh PBB untuk mundur. Sementara itu, Azerbaijan masih bersikukuh untuk janji pemerintahan otonomi pada level yang lebih tinggi dan menuntut penarikan pasukan Armenia dari wilayah pendudukan (Ismailzade, 2011: hal. 3).

Pendekatan mediasi yang selama ini digunakan adalah melalui pendekatan top-down atau “menetes ke bawah”, yang mana tujuan utama dari pendekatan ini adalah

menciptakan penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak antara pemimpin level tertinggi (dalam hal ini Presiden) dalam suatu konflik. Asumsi dari pendekatan ini adalah bila pemimpin pihak yang terlibat mencapai kata sepakat, maka hal tersebut dapat menciptakan suatu tahapan atau kerangka kerja dan kondisi bagi masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian damai yang pada akhirnya akan menyelesaikan konflik. Namun, aspek paling penting dari pendekatan ini adalah adanya kebutuhan untuk menciptakan rasa saling percaya yang cukup dan fleksibilitas antara pihak yang bertikai untuk berkompromi atau munculnya suatu opsi baru (Geukjian, 2014: hal. 212).

Meski demikian, pendekatan mediasi top-level yang selama ini dilakukan terbukti gagal dalam memelihara atau memperluas proses transformasi konflik yang konstruktif terbukti telah gagal. Selama ini, upaya untuk menuju resolusi konflik terlalu berfokus pada kepentingan negara pada tingkat internasional dan justru terlalu sedikit upaya untuk memahami kebutuhan identitas dari kedua belah pihak yang menjadi akar dari rasa ketidakpercayaan dari kedua belah pihak. Seperti yang diutarakan oleh Philip Ghameghalyan dalam Mayer (2013) bahwa "konflik antara Armenia dan Azerbaijan seolah tidak bisa terselesaikan bukan karena akar [konflik] yang menyebabkannya tak dapat diselesaikan, namun karena [akar konflik] tidak dimengerti atau dipahami, alih-alih diselesaikan" (Mayer, 2013: hal. 75).

Rasa ketidakpercayaan antara pihak yang bertikai adalah salah satu kunci dari pertanyaan mengapa hingga saat ini mediasi antara kedua belah pihak masih terus menemui kegagalan. Ada beberapa bentuk rasa ketidakpercayaan antara kedua belah pihak terkait dengan penyelesaian konflik ini. Terdapat skeptisme yang luas dan mendalam pada masing-masing masyarakat Armenia dan Azerbaijan terkait penyelesaian konflik secara damai. Yang membuat konflik tersebut bertahan lama adalah permusuhan dalam jangka waktu yang lama, persepsi sebagai musuh dan rasa takut yang dalam.

Baik rakyat Armenia maupun Azerbaijan percaya bahwa selain militer, warga sipil kedua belah pihak juga sama-sama melakukan kekerasan terhadap satu sama lain. Kedua belah pihak juga meyakini bahwa konflik juga terdapat pada sikap dan pemikiran pada masing-masing pihak. Hal ini dapat terjadi pada masyarakat yang telah saling bermusuhan sejak beberapa dekade, bila bukan beberapa generasi (Geukjian, 2014: hal. 215).

Hal inilah yang seolah tidak dimengerti atau disadari oleh OSCE Minsk Group sebagai mediator utama dalam penyelesaian konflik ini. Mediator nampaknya tidak memahami akar konflik, penyebab secara historis, serta aspek sosio-psikologis dari konflik Nagorno-Karabakh; semisal rasa tidak aman, kebencian dan permusuhan yang telah menancap kuat dalam pikiran bangsa Armenia dan Azerbaijan. Pertentangan mendalam antara kedua bangsa dan pengaruh psikologisnya juga telah mempengaruhi opini dari bangsa Armenia dan Azerbaijan secara keseluruhan. OSCE Minsk Group seolah berpikir bahwa mereka mampu menggiring masing-masing pihak yang bertikai untuk berkompromi dan damai. Konflik ini pada kenyataannya sama sekali tidak berakar pada kepentingan ekonomi, melainkan pertentangan nilai dan perasaan yang dimiliki oleh kedua bangsa. Dalam beberapa tahun terakhir, tendensi dan perasaan penting publik kedua negara juga tidak mampu dipahami secara baik oleh OSCE Minsk Group (NikkarEsfahani, 2009: hal. 278-279). Yang perlu diketahui adalah rasa ketidakpercayaan tersebut tidak baru muncul dalam dua dekade terakhir saja namun sudah berakar lama secara historis. Hal ini diistilahkan sebagai musuh lama atau ancient enemies dalam teori konflik etnis, yang dimana menyatakan bahwa beberapa kelompok etnis memiliki rasa saling benci selama berabad-abad dan hanya melalui perlakuan keras oleh negara represif permusuhan tersebut dapat direddam. Dalam hal ini, rasa ketidakpercayaan mendalam yang dianut etnis Armenia terhadap etnis Azerbaijan dikaitkan dengan Genosida Armenia tahun 1915, yang dimana meskipun peristiwa tersebut dilakukan oleh Turki, namun bangsa

Armenia tidak membedakan antara Turki dengan Azerbaijan karena keduanya sama-sama beragama Islam dan berbicara dalam rumpun Bahasa Turki (Carley, 1998: hal. 14). Rasa benci bangsa Azerbaijan terhadap Armenia sendiri juga sudah berakar cukup lama, dimana pada masa Kekaisaran Rusia bangsa Armenia mendapat pengistimewaan. Kebencian ini juga tercermin dari konflik masa lalu antara Armenia dan Azerbaijan, dimana pada tahun 1905 dan tahun 1918-1920 kedua etnis tersebut pernah terlibat perang etnis (Mayer, 2013: hal. 30).

Konsekuensi dari rasa ketidakpercayaan itu adalah mayoritas bangsa Armenia percaya bahwa pemerintah Azerbaijan tidak bisa dipercaya sama sekali, apalagi bila dipercaya untuk memerintah minoritas Armenia di Nagorno-Karabakh secara adil apabila wilayah tersebut berada dalam penguasaan Azerbaijan. Pada saat yang sama, kebanyakan orang Azerbaijan percaya bahwa bangsa Armenia adalah bangsa rasis yang membenci orang Azerbaijan. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa permusuhan lama antara bangsa Armenia dan Azerbaijan sangat relevan dalam memandang konflik Nagorno-Karabakh. Ketidakpercayaan ini juga terwujud dalam pandangan bahwa konflik Nagorno-Karabakh adalah konflik antara bangsa Armenia dan Azerbaijan, bangsa Armenia percaya bahwa orang Azerbaijan melakukan kekejaman terhadap mereka, dalam artian penduduk sipil secara umum, bukan hanya militer ataupun pemerintah saja. Sementara hal yang sama juga diyakini oleh bangsa Azerbaijan terhadap orang Armenia. Yang paling penting, baik orang Armenia maupun Azerbaijan sama-sama percaya bahwa yang perlu dipersalahkan atas perang yang terjadi bukanlah masing-masing pemerintah kedua negara, melainkan sikap dan pemikiran yang dimiliki oleh masing-masing pihak baik Armenia maupun Azerbaijan. (Carley, 1998: hal. 14). Maka tidaklah mengherankan bila masing-masing publik Armenia maupun Azerbaijan sama-sama tidak mau mengalah. Azerbaijan sangat tidak menerima ide tentang kemerdekaan Nagorno-Karabakh.

Sebaliknya, Armenia juga sama sekali tidak bisa menerima penyatuan kembali Nagorno-Karabakh bagi Azerbaijan. Pemimpin masing-masing negara akan mendapat cap sebagai "pengkhianat", bila mengabaikan kedua pola konsep diatas. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik dalam negara mereka sendiri (Ismailzade, 2011: hal. 6). Adanya rasa ketidakpercayaan antar kedua bangsa lagi-lagi menjadi alasan mengapa baik publik Azerbaijan maupun Armenia tidak mau mengalah. Ditambah lagi, selama dua dekade terakhir, mayoritas publik di kedua negara sudah didoktrin oleh media massa negaranya dengan gambaran bahwa satu sama lain adalah musuh, saling mengkabing-hitamkan dan juga retorika nasionalisme (Ismailzade, 2011: hal. 6).

Lesson learned (proses pembelajaran) yang dapat ditinjau dari perspektif strategi dan perspektif komunikasi.

Pendekatan mediasi yang hanya mengandalkan pada diplomasi tingkat top-level saja telah terbukti tidak akan membawa hasil. Proses perdamaian mestinya juga memperhatikan keterlibatan berbagai pihak dan kelompok yang bekerja pada level yang berbeda dan berfokus pada bermacam aspek dalam konflik, semisal identitas, keamanan, pengakuan dan partisipasi politik (Geukjian, 2014: hal. 215). Dalam hal ini, maka keberadaan pendekatan diplomasi multi-track dalam transformasi konflik sangat dibutuhkan. Konflik antara pihak yang terlibat di Karabakh masih membutuhkan resolusi pada berbagai tingkat hubungan dan perubahan budaya atas berbagai level, hal itu untuk transformasi wacana maupun institusi yang sering melakukan kekerasan. Proses perdamaian juga harus mempertimbangkan legitimasi, keunikan, dan interdependensi dari berbagai level, termasuk didalamnya level akar rumput (grass roots) dan level tinggi (top level). Tanpa memperhatikan hubungan antara Armenia dan Azerbaijan terkait dengan isu teritori, keamanan, identitas dan control, maka konflik akan sulit untuk diselesaikan (Geukjian, 2014: hal. 222).

Padahal, untuk mengatasi rasa ketidakpercayaan dan permusuhan yang terlalu mendalam antara kedua bangsa, dibutuhkan cara untuk menjembatani kedua belah pihak melalui proses peace-building yang mencakup seluruh lapisan masyarakat, sebagai pelengkap proses peace-making yang melibatkan pihak level tertinggi pemerintahan. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan proses diplomasi track-two yang mewakili seluruh pihak yang terlibat. Track-two diplomacy adalah diplomasi yang melibatkan mediator tidak resmi yang bekerja dengan pihak yang terlibat untuk memfasilitasi perjanjian dan menemukan hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak (Ramsbotham et. al, 2005: hal. 17). Yang dilakukan oleh OSCE Minsk Group justru tidak banyak melibatkan pihak-pihak terkait dalam kerangka mediasi yang lebih luas. Rasa ketidakpercayaan antara kedua bangsa yang sudah mendalam berakibat pada keengganan masing-masing pihak untuk bekerja sama dengan pihak lain. OSCE Minsk Group pada kenyataannya gagal untuk menciptakan kemauan politik bagi kedua belah pihak untuk saling bekerja sama (Brown, 2013: hal. 173). Proses perdamaian yang berfokus pada tingkat elit pemerintahan saja juga membuat kurangnya keterbukaan menjadi akut, kurangnya keterlibatan civil society berarti tidak ada upaya untuk membangun kepercayaan dan keyakinan masing-masing pihak sebelum kesepakatan damai tercapai (Casperson, 2017: hal. 185).

Tercatat sudah ada beberapa organisasi internasional, NGO dan berbagai yayasan privat yang menggunakan pendekatan diplomasi track-two dalam konflik Nagorno-Karabakh sejak tahun 1992. Diantara contoh agenda diplomasi *track-two* yang pernah dilakukan yaitu; *The Ben Lomond Peace Process, diadakan oleh Foundation for Global Community in Palo Alto, California (Foundation)* dan *Stanford Center on Conflict and Negotiation at Stanford University (SCCN)* selama tahun 1993-1998. Secara keseluruhan terdapat 12 pertemuan yang dilakukan dan menghasilkan kerangka kerja untuk proses perdamaian di Nagorno Karabakh yang

kemudian hasilnya di-submit kepada co-chair OSCE Minsk Group (Pashayeva, 2012: hal. 114-116). Namun demikian, upaya penyelesaian konflik melalui diplomasi *track-two* tidak bisa berjalan secara maksimal oleh karena banyaknya hambatan yang ditimbulkan baik oleh diplomasi resmi maupun oleh pemerintah dari negara yang berkonflik.

OSCE Minsk Group kurang begitu terlibat dalam diplomasi *track-two* yang dijalankan oleh organisasi non-pemerintah. Akses untuk saling berbagi informasi dan kontak antara upaya perdamaian yang didorong oleh pemerintah dan masyarakat sipil — diplomasi *track-one* dan *track-two* sangat terbatas. Sejauh ini bahkan dalam kasus EPNK, upaya perdamaian masyarakat sipil berskala paling besar dan beragam, ada perasaan bahwa "EPNK tidak dapat menjelajah ke wilayah yang dicakup oleh mandat Minsk Group, bahkan jika mitra local menginginkannya". (Freizer, 2014: hal. 6).

Propaganda yang disponsori oleh pemerintah sangat menghambat upaya untuk membangun dialog antar masyarakat kedua negara, karena pemerintah melalui media massa yang sudah dikontrol ketat kerap kali menyebut orang atau pihak tertentu yang terlibat sebagai "pengkhianat" (Goudsouzian, 2014) atau setidaknya mengalami gangguan dan ancaman dari negara masing-masing (Pashayeva, 2012: hal. 118). Terkait dengan mengapa OSCE seolah tidak ikut melibatkan diri dalam diplomasi masyarakat sipil, ada kemungkinan kaitannya dengan sikap masing-masing pemerintah terhadap diplomasi *track-two*. Diplomasi *track-two* dan mediasi berbasis masyarakat sipil sebagian besar dipandang dengan kecurigaan, 'bahkan tidak disetujui di Azerbaijan', karena persepsi bahwa dialog dengan Armenia hanya mungkin setelah penarikan dari wilayah pendudukan. Sedikit yang percaya pada dialog sebagai sarana yang akan memfasilitasi kemungkinan kesepakatan. Kontak lintas batas dianggap 'naif dan tidak berguna, paling berbahaya di terburuk'. Misalnya, pemimpin Organisasi Pembebasan Karabakh (KLO) Akif Nagy menegaskan bahwa 'kontak antar-warga

digunakan untuk membuat orang-orang Azerbaijan melupakan wilayah yang diduduki'. Banyak orang moderat juga tidak yakin bahwa diplomasi track-two akan mewujudkan kepentingan Azerbaijan. Dengan demikian, semua perjanjian yang dicapai di tingkat atas dalam berbagai putaran negosiasi terus-menerus runtuh karena infrastruktur untuk pelaksanaannya tidak ada (Geukjian, 2014: hal. 215).

Retorika militeristik dan sikap radikal Azerbaijan yang semakin meningkat mengenai konflik membatasi ruang masyarakat sipil untuk mempromosikan resolusi konflik damai sebagai prioritas. Masalah mendasar lainnya adalah bahwa pihak Armenia tampak lebih puas dengan *status quo* dan berusaha melegitimasi itu, sementara Azerbaijan lebih ingin mengubahnya.

Di Armenia pejabat negara berusaha mengendalikan kegiatan organisasi masyarakat sipil dan ada kurangnya pemahaman tentang bagaimana organisasi masyarakat sipil dapat membantu pemerintah dalam proses perdamaian. Akibatnya, organisasi masyarakat sipil yang berusaha menjaga jarak antara mereka dan pemerintah sering kehilangan dukungan pejabat negara dan membuat kegiatan mereka kurang terlihat secara internasional dan kurang sah secara domestik. (Geukjian, 2014: hal. 218-219).

Ada beberapa ancaman oleh pemerintah Azerbaijan untuk mengkriminalkan kontak Azerbaijan dengan orang-orang Armenia, meski belum ada undang-undang seperti itu yang disahkan dan pemerintah tetap enggan mengizinkan kegiatan lintas batas terjadi. Azerbaijan juga menuduh warganya yang bepergian ke Armenia sebagai pihak "yang berupaya melakukan normalisasi hubungan dengan penjajah tanah Azerbaijan." Bahkan, orang yang terlibat dalam proses tersebut dapat ditahan oleh pemerintah karena dianggap menjadi mata-mata musuh, seperti yang terjadi pada jurnalis asal Azerbaijan Rauf Mirqadirov (Mkrtchyan, 2014). Selain itu, pada tahun 2001, sejumlah aktivis NGO dari Armenia dipukuli ketika mendarat di bandara ibukota Azerbaijan, Baku (Freizer, 2009).



Seorang wanita membawa bunga di tugu peringatan di depan kedutaan Armenia bagi korban tewas saat konflik militer akibat pemisahan diri wilayah Nagorno-Karabakh, 20 Oktober 2020.

Penutup.

Penyebab gagalnya mediasi yang sudah berlangsung selama dua dekade dijalankan OSCE Minsk Group disebabkan ketidak-pahaman OSCE atas adanya rasa ketidak-percayaan mendalam antara kedua negara. Yang menjadi akar masalah bukanlah semata karena pentingnya wilayah Nagorno-Karabakh, namun lebih karena persepsi kebencian yang dianut oleh kedua belah pihak. Hal inilah yang nampaknya tidak dipahami oleh OSCE Minsk Group, dimana proses mediasi sejauh ini masih berkuat pada level pemerintahan saja. Namun, yang menjadi permasalahan bahwa masing-masing masyarakat menyadari bahwa yang perlu disalahkan atas terjadinya perang antara kedua negara adalah kebencian atau niat jahat dari masing-masing masyarakat, bukan semata ulah pemerintah. Dibutuhkan strategi track-two diplomacy guna menjembatani kedua belah pihak yang saling bertikai. Namun, hal tersebut belum/tidak dilakukan oleh OSCE Minsk Group. OSCE Minsk Group tidak banyak membantu dalam track-two diplomacy yang dijalankan oleh berbagai organisasi non-pemerintah. Padahal, pelibatan organisasi pemerintah dalam mediasi sangat membantu memecahkan persoalan kebuntuan negosiasi yang telah berlangsung selama dua dekade.

Mayor Inf Habibi, S.E. adalah abituren Akmil 2004 dan Dikreg LX Seskoad. Saat ini menjabat sebagai PS. Pabandya Bhakti TNI Kodam XVII/Cen



PENGALIHAN DUKUNGAN DIPLOMATIK REPUBLIC OF PALAU DARI TAIWAN KE TIONGKOK DITINJAU DARI PERSPEKTIF DIPLOMASI DAN NEGOISASI

Major Inf Roni Faturohman

Pendahuluan

Pada September 2019, negara-negara dikawasan Pasifik Selatan khususnya *Republic of Palau* telah mengalihkan pengakuan diplomatiknya dari Taiwan ke Tiongkok. Ini merupakan pukulan telak bagi Taiwan karena *Republic of Palau* merupakan salah satu negara Kepulauan Pasifik yang memiliki hubungan resmi dengan Taiwan sebelum beralih.

Saat ini, negara di Pasifik Selatan yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan berkurang menjadi empat karena Kiribati ikut memutus hubungan dengan Taiwan setelah *Republic of Palau*. *Republic of Palau* telah menjadi sekutu diplomatik Taiwan sejak lama, dan telah membuka kedutaan besar di Taiwan. Taiwan telah memberikan bantuan besar bagi sektor-sektor seperti pertanian, pendidikan, dan kesehatan kepada *Republic of Palau*.

Salah satu contoh adalah dukungan ekonomi Taiwan untuk *Rural Constituency Development Fund* atau Dana Pembangunan Pedesaan, yang dilaporkan bahwa pada 2017 Taiwan menyalurkan \$29,3 juta untuk dana program tersebut. Sebagai imbalannya, *Republic of Palau* telah menyuarakan dukungan untuk partisipasi Taiwan dalam badan-badan PBB.

Pernyataan resmi dari para pemimpin *Republic of Palau* dalam beberapa tahun terakhir telah mengindikasikan bahwa dukungan *Republic of Palau* terhadap Taiwan dapat berubah. Pada Mei 2013, perdana menteri *Republic of Palau* menekankan bahwa kebangkitan Tiongkok tidak dapat diabaikan tetapi harus diperhitungkan dalam perdagangan dan hubungan luar negeri *Republic of Palau*, dan hal ini mengisyaratkan kemungkinan peralihan ke Tiongkok. Pada saat itu, sudah terjadi diskusi di media sosial di *Republic of Palau*, terutama oleh generasi muda, tentang pertanyaan apakah *Republic of Palau* akan beralih ke Tiongkok karena meningkatnya ikatan ekonomi dengan Tiongkok.

Sejak akhir Perang Dunia II, struktur kekuasaan di Asia-Pasifik didominasi oleh Amerika Serikat. Keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut telah dibentuk oleh peran penting yang dimainkan oleh tatanan Amerika Serikat berdasarkan tujuan kebijakan keamanan dan kemakmuran di mana Amerika Serikat mempertahankan hegemoni dengan membangun jaringan keamanan. Namun seiring dengan pergantian abad kedua puluh satu, terdapat perubahan pusat gravitasi keseimbangan kekuatan global yang bergeser dari Eropa ke Asia Pasifik terutama disebabkan oleh kebangkitan Tiongkok.

Dengan perubahan sistemik yang signifikan dalam tatanan internasional ini, pengaruh lama Amerika di Asia Pasifik dihadapkan dengan tantangan yang berat. Tiongkok menggantikan Jepang menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia dan segera mengikutinya dengan menjadi negara dengan anggaran militer terbesar kedua. Kekuatan Tiongkok yang terus berkembang, terlihat dengan pembentukan lembaga keuangan *multilateral Asian Infrastructure Development Bank (AIIB)* dan proyek jalur transportasi dan perdagangan *Belt Road Initiative (BRI)* yang menantang supremasi lama Amerika Serikat, telah menghasilkan keseimbangan kekuatan baru. Terlepas dari perkembangan ekonomi yang melesat, ketegasan militer Tiongkok dalam sengketa teritorial dan maritim di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur juga telah mengubah jaringan keamanan wilayah tersebut. Artinya kebangkitan Tiongkok yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang melesat diterjemahkan ke dalam pengeluaran militer yang lebih besar dan yang paling penting, ke dalam modernisasi militer yang ditandai.



Peta sengketa teritorial dan maritim di Laut Cina Selatan

Berangkat dari latar belakang permasalahan diatas, penulis mencoba untuk mengidentifikasi persoalan terkait pengalihan dukungan diplomatik *Republic of Palau* dari Taiwan ke Tiongkok sebagai berikut : Pertama, Bagaimana latar belakang pengalihan dukungan diplomatik *Republic of Palau* dari Taiwan ke Tiongkok?. Kedua, bagaimana langkah strategis yang dilakukan pemerintah *Republic of Palau* dalam upaya menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok?.

Ketiga, *Lesson learned* (proses pembelajaran) yang didapat ditinjau dari perspektif strategi dan perspektif komunikasi terkait pengalihan dukungan diplomatik *Republic of Palau* dari Taiwan ke Tiongkok?. Mendasari ketiga persoalan tersebut maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana proses pengalihan dukungan diplomatik *Republic of Palau* dari Taiwan ke Tiongkok ditinjau dari perspektif diplomasi dan negoisasi?

Nilai guna dari penulisan esai ini adalah agar para siswa dapat memahami tentang praktek diplomasi dan negosiasi sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas. Maksud dari tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pembelajaran diplomasi dan negosiasi, sedangkan tujuannya adalah sebagai bahan untuk meningkatkan pengetahuan Perwira Siswa terkait proses pengalihan dukungan diplomatik *Republic of Palau* dari Taiwan ke Tiongkok ditinjau dari perspektif diplomasi dan negoisasi. Ruang lingkup tulisan ini disusun dengan tata urut pendahuluan, pembahasan, dan penutup.

PEMBAHASAN

Tiongkok dan Taiwan telah menjadi aktor utama dalam hubungan di Pasifik Selatan, yang disebabkan terutama oleh kapasitas Kepulauan Pasifik untuk memberikan pengakuan diplomatik. Pertentangan kuat Tiongkok terhadap pencarian hubungan diplomatik oleh Taiwan mendorong sebagian besar negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan khususnya *Republic of Palau* menghitung bahwa mereka akan kehilangan lebih banyak secara politik dan ekonomi jika menentang Tiongkok daripada yang akan mereka dapatkan dari mengakui Taiwan. Dalam hal ini pertimbangan ekonomi telah menjadi hal yang relatif biasa di dalam persaingan Taiwan dan Tiongkok, di mana ini lebih terkait dengan mempengaruhi negara Kepulauan Pasifik. Mengalir dari penjelasan tersebut, dalam hal ini penulis dapat menjelaskan pokok permasalahan sebagaimana telah disampaikan diatas

khususnya terkait latar belakang pengalihan dukungan diplomatik *Republic of Palau* dari Taiwan ke Tiongkok; langkah strategis yang dilakukan pemerintah *Republic of Palau* dalam upaya menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok dan *Lesson learned* (proses pembelajaran) yang didapat ditinjau dari perspektif strategi dan perspektif komunikasi terkait pengalihan dukungan diplomatik *Republic of Palau* dari Taiwan ke Tiongkok.

Latar belakang pengalihan dukungan diplomatik *Republic of Palau* dari Taiwan ke Tiongkok

Motif Pengalihan Dukungan Diplomatik. Hal-hal yang mendorong *Republic of Palau* melakukan pengalihan dukungan diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok dapat dilihat dari laporan yang dihasilkan oleh *task force Republic of Palau*, pemain kunci yang ditunjuk oleh presiden untuk meninjau kembali hubungan negara tersebut dengan Tiongkok dan Taiwan. Pernyataan tentang pengalihan diplomatik ini, mengungkapkan banyak tentang persepsi lokal terhadap kebangkitan China dan perubahan geopolitik di wilayah tersebut. Satuan tugas tersebut terdiri dari sembilan anggota, termasuk tujuh anggota parlemen (tiga dari pemerintah, tiga dari oposisi, dan satu anggota independen) dan dua staf sekretariat dari Kantor Perdana Menteri dan Kabinet. Setelah berkonsultasi dengan pejabat dan pemangku kepentingan dari negara-negara termasuk Kepulauan Solomon, Fiji, Papua Nugini, Samoa, Tonga, Vanuatu, Tiongkok dan Taiwan, tim merekomendasikan agar *Republic of Palau* memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan menormalisasikan hubungan dengan Tiongkok selambat-lambatnya sebelum perayaan ulang tahun ke-70 RRC pada tanggal 1 Oktober 2019. Dalam jurnal ini motif pengalihan dukungan diplomatik yang dilakukan oleh *Republic of Palau* akan dibagi menjadi dua, yaitu keuntungan ekonomi dan geopolitik.

Pertama, Keuntungan Ekonomi. Tiongkok dan Taiwan menolak untuk sepenuhnya mengungkapkan apa yang mereka berikan pada sekutu mereka di Pasifik Selatan.

Hal ini supaya dapat mencegah negara-negara yang menjual pengakuan diplomatik untuk mengelembungkan tuntutan mereka sesuai dengan jumlah yang diterima negara lain. Tumbuhnya bantuan, perdagangan, dan penjangkauan diplomatik dan rumor kepentingan dalam mengamankan pangkalan-pangkalan meningkatkan kekhawatiran tentang perluasan jejak Tiongkok di Pasifik. Namun walaupun negara-negara kepulauan Pasifik tidak naif akan tumbuhnya persaingan kekuatan besar, mereka tidak serta-merta memiliki tingkat kekhawatiran yang sama dengan yang dimiliki oleh kekuatan lama Oseania. Beberapa bahkan menyambut kedatangan Tiongkok sebagai cara untuk memaksa kekuatan tradisional Pasifik untuk berkomitmen kembali ke wilayah tersebut. Dari 2011 hingga 2019, Tiongkok memberikan \$1,47 miliar pinjaman kepada negara-negara kepulauan Pasifik. Jika Tiongkok membayar sesuai dengan janjinya, ia kemungkinan akan menyalip Australia untuk menjadi penyumbang terbesar di kawasan tersebut.

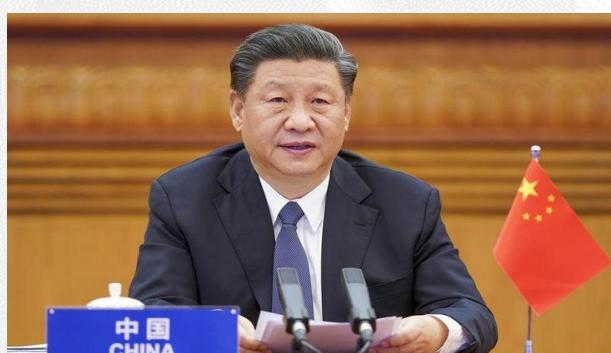
Alasan mereka mengambil keputusan pengalihan dukungan diplomatik tersebut sangat jelas, yaitu karena Taiwan tidak dapat menawarkan bantuan yang cukup seperti yang diharapkan oleh *Republic of Palau*. Dalam hal ini dapat dilihat, ketegangan utama dalam hubungan *Republic of Palau* dan Taiwan adalah pada bantuan di pembangunan infrastruktur karena *Republic of Palau* menganggap Taiwan tidak akan melakukan sesuatu yang substansial dalam pembangunan infrastruktur untuk penting bagi *Republic of Palau* karena infrastruktur yang buruk dianggap sebagai hambatan terbesar di negara itu, karena sangat menghambat pembangunan-nya meskipun memiliki sumber daya yang kaya akan mineral, kehutanan dan perikanan. Selama 36 tahun antara tahun 1983 dan 2019, Taiwan telah memberikan total \$460 juta bantuan untuk negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan khususnya *Republic of Palau*. Untuk mendapatkan dukungan bagi hubungan diplomatik, sebagian besar bantuan Taiwan diberikan kepada *Rural Constituency Development Fund* atau Dana Pembangunan Pedesaan, yang menikmati popularitas di

kalangan anggota parlemen karena penggunaannya sesuai dengan kebijaksanaan mereka, tetapi mengundang kritik yang lebih luas untuk membiakkan korupsi. Taiwan juga memberikan bantuan teknis untuk sektor-sektor seperti pertanian dan kesehatan di Republic of Palau. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam pendanaan infrastruktur. Presiden *Republic of Palau* juga mengeluh bahwa para investor Taiwan kurang menunjukkan minat untuk berinvestasi dalam pembangunan ekonomi dibandingkan dengan kepentingan politik di negaranya selama 36 tahun terakhir.

Selain itu, *Republic of Palau* juga mempercayai janji-janji Tiongkok dalam perdagangan, bantuan dan daya tarik investasi kepada pemerintah *Republic of Palau*, terutama dalam infrastruktur. Setelah bertemu dengan para diplomat senior Tiongkok dan perwakilan dari perusahaan-perusahaan besar Tiongkok yang beroperasi di Pasifik seperti *China Civil Engineering Construction Corporation*, *China Harbour Engineering Corporation* dan *Huawei*, satuan tugas tersebut menyimpulkan bahwa Republic of Palau akan mendapat banyak keuntungan jika beralih dan menormalkan hubungan diplomatik dengan Tiongkok.

Dalam hal ini, pemerintah *Republic of Palau* menyatakan percaya bahwa dengan menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok dapat membantu negara mencapai beberapa aspirasi pembangunannya. Dalam hal ini Tiongkok juga meyakinkan *Republic of Palau* bahwa mereka akan memberikan bantuan untuk mengisi kesenjangan yang ditinggalkan oleh Taiwan dalam masa transisi, termasuk untuk mengambil siswa *Republic of Palau* yang sedang belajar di Taiwan dan mendanai *stadion South Pacific Games 2023*. Secara khusus, pemerintah *Republic of Palau* tertarik dengan *Belt and Road Initiative (BRI)* yang saat ini menjalankan kerja sama bilateral Tiongkok dengan Pasifik terutama dalam bidang infrastruktur. *Republic of Palau* mendaftar ke BRI selama kunjungan Sogavare ke Beijing pada Oktober 2019, menyelaraskan inisiatif Tiongkok dengan Strategi Pembangunan

Nasional *Republic of Palau* 2016-2030. Pemerintah *Republic of Palau* memiliki harapan tinggi pada BRI, dengan alasan bahwa inisiatif Beijing tersebut menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah pembangunan nasional yang terkendala infrastruktur Kedua, Geopolitik. Terkait geopolitik di Pasifik Selatan yang berkaitan dengan kepentingan Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik berputar di sekitar hegemoninya. Untuk mempertahankan hegemon tersebut maka Amerika Serikat harus memiliki kendali ekonomi dan militer. Ini menjelaskan perang dagang AS-Cina saat ini dan peningkatan militer AS di kawasan ini. Taiwan telah dan akan selalu menjadi pion AS dalam persaingannya dengan Tiongkok. Oleh karena itu, Taiwan kemungkinan tidak diizinkan memiliki independensi penuh. Kecil kemungkinan bahwa AS akan mengizinkan Taiwan menjadi negara merdeka, karena kepentingan AS bagi Taiwan adalah untuk mempertahankan *status quo* untuk tujuan memecah belah dan memerintah. AS menganggap Taiwan sebagai rantai pulau pertama untuk penahanan Tiongkok, yang kemudian menjadi salah satu alasan AS tetap menjual senjata ke Taiwan. Pada akhir 2017, di bawah pemerintahan Presiden Trump, diumumkan adanya penjualan senjata senilai \$1,42 miliar ke Taiwan, yang merupakan kontradiksi terhadap kesepakatan konsensus yang dicapai antara Presiden Xi Jingping dan Trump pada bulan April di tahun yang sama. Pada tahun 2018, pemerintah AS menyetujui penjualan lebih lanjut suku cadang jet tempur F-16 ke Taiwan senilai \$330 juta. Pada 2019, kesepakatan senjata lebih lanjut senilai \$500 juta ditandatangani antara AS dan Taiwan.



Presiden Cina Xi Jingping

Di sisi lain, Tiongkok tidak mengejar ekspansi militer, sehingga keterlibatannya dalam keamanan terbatas, dibandingkan dengan keterlibatan diplomatik dan ekonominya. Oleh karena itu, *Republic of Palau* mengambil keputusan bukan hanya karena sebatas Tiongkok dan Taiwan, namun ini adalah keputusan yang diambil dalam konteks saling ketergantungan regional dan internasional yang kompleks. *Republic of Palau* selama ini didefinisikan oleh statusnya sebagai negara pulau, yang oleh karena itu dipengaruhi oleh agenda kepentingan dan kekuatan negara besar. Tiongkok dianggap sebagai kekuatan besar yang masuknya ke wilayah Pasifik Selatan telah menimbulkan tantangan langsung terhadap dominasi Australia dan Selandia Baru, sebagai kekuatan *proxy* Amerika Serikat. Oleh karena itu, *Republic of Palau* harus mengikuti dinamika transisi kekuasaan di wilayah tersebut sehingga dapat mengambil manfaat dari dinamika kekuatan baru ini.

Republic of Palau biasanya mengandalkan dan mengikuti kekuatan besar, dalam hal ini secara tradisional negara tersebut bergantung pada Amerika Serikat dan negara-negara *proxy* seperti Australia dan Selandia Baru sebagai penjamin pembangunan, ekonomi, dan keamanan negara. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, terlihat jelas ada pergantian kekuasaan di Asia Pasifik, di mana hegemoni Amerika Serikat yang sudah berlangsung selama berpuluhan tahun ditantang oleh kebangkitan Tiongkok dan prospek perkembangan negara-negara Asia Timur dan Tenggara dengan Tiongkok sebagai jantung dari semua perkembangan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, *Republic of Palau* merasa perlu meninjau kembali keberpihakannya dalam dinamika saat ini. Dalam pandangan kolektivisme, yang melibatkan koalisi negara-negara kepulauan melalui lembaga seperti Pacific Islands Forum (PIF) atau Melanesian Spearhead Group (MSG), *Republic of Palau* juga merasa harus berdiri dalam solidaritas dengan negara-negara tetangganya untuk menggunakan suara dan kekuasaan bersama. Seperti yang ditulis oleh anggota parlemen Vanuatu Johnny Koanapo pada September 2019 bahwa, "vakum hanya menawarkan kesempatan bagi orang lain untuk mengisinya," dalam menanggapi pernyataan Duta Besar Amerika Serikat untuk Papua Nugini.

Langkah strategis pemerintah *Republic of Palau*

Republic of Palau mengalihkan dukungan diplomatiknya dari Taiwan ke Tiongkok setelah 36 tahun memiliki hubungan diplomatik, yang diikuti oleh beberapa negara lainnya, meninggalkan Taiwan dengan sisa empat negara Pasifik Selatan yang masih mengakuinya secara internasional. Tiongkok dan Taiwan telah lama menjadi aktor utama dalam persaingan pengaruh di Pasifik Selatan, yang disebabkan terutama oleh kapasitas Kepulauan Pasifik untuk memberikan pengakuan diplomatik, di mana tekanan yang diberikan oleh Tiongkok terhadap Taiwan semakin intensif sejak terpilihnya Presiden Taiwan Tsai Ing-wen.

Mendasari hal tersebut dalam hal ini langkah strategis yang dilakukan pemerintah *Republic of Palau* dalam upaya menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok tidak terlepas dari kebangkitan Tiongkok tidak dapat diabaikan tetapi harus diperhitungkan dalam perdagangan dan hubungan luar negeri *Republic of Palau*.

Disamping itu, pengalihan diplomatik yang dilakukan oleh *Republic of Palau* dikarenakan Taiwan tidak dapat menawarkan bantuan yang cukup seperti yang diharapkan oleh *Republic of Palau*. Hal ini dapat dilihat dari ketegangan utama dalam hubungan *Republic of Palau* dan Taiwan adalah pada bantuan di pembangunan infrastruktur karena *Republic of Palau* menganggap Taiwan tidak akan melakukan sesuatu yang substansial dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

Disisi lain pengalihan dukungan *Republic of Palau* tidak terlepas dari janji-janji Tiongkok dalam perdagangan, bantuan dan daya tarik investasi kepada pemerintah *Republic of Palau*, terutama dalam infrastruktur.

Setelah bertemu dengan para diplomat senior Tiongkok dan perwakilan dari perusahaan-perusahaan besar Tiongkok yang beroperasi di Pasifik seperti *China Civil Engineering Construction Corporation*, *China Harbour Engineering Corporation* dan *Huawei*, satuan tugas tersebut menyimpulkan bahwa *Republic of Palau* akan mendapat banyak keuntungan jika beralih dan menormalkan hubungan diplomatik dengan Tiongkok.

Lesson learned dari perspektif strategi dan perspektif komunikasi

Pengalihan dukungan *diplomatic Republic of Palau* dari Taiwan ke Tiongkok bila ditinjau dari perspektif strategi menunjukkan : Pertama, adanya janji Tiongkok yang akan memberikan bantuan untuk mengisi kesenjangan yang selama ini terjadi *Republic of Palau*. Tiongkok merupakan mitra dagang bagi negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan khususnya *Republic of Palau* dengan volume perdagangan 14 kali lipat dari Taiwan. Kedua, Pemerintah Palau memandang pemerintah Tiongkok sedang berusaha memperkuat pengaruhnya di kawasan itu menjelang berakhirnya perjanjian Compact Funding antara Amerika Serikat, Negara Federasi Mikronesia, Kepulauan Marshall, dan Palau pada tahun 2023 dan 2024. Sementara Ditinjau dari perspektif komunikasi, dimana pengalihan dukungan diplomatik *Republic of Palau* dari Taiwan ke Tiongkok tidak terlepas dari perhatian Tiongkok ke wilayah Pasifik Selatan yang semakin meningkat dan intensif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya bantuan ekonomi Tiongkok kepada negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan khususnya bagi negeri-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Ketiga, diplomasi Tiongkok yang dilakukan melalui komunikasi ekonomi disambut baik oleh para pemimpin negara-negara Pasifik, selain karena,, kemurahan hatinya, status China sebagai sesama negara berkembang sangat membantu penerimaan kehadirannya di kawasan ini.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasifik Selatan merupakan wilayah yang strategis untuk kekuatan Barat (Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru) melalui proxy Taiwan dan Tiongkok, sehingga membuat wilayah tersebut menjadi panggung persaingan pengaruh antara kedua pihak untuk melancarkan kepentingan keamanan dan ekonomi masing-masing. Tiongkok dan Taiwan tetap akan menjadi dua sisi yang tidak menyatu di Pasifik

Selatan dengan berkompetisi mendapatkan pengakuan diplomatik dari negara-negara di daerah tersebut melalui cara pragmatis yaitu penyediaan bantuan keuangan untuk pembangunan negara-negara Kepulauan Pasifik.

Republic of Palau dan Tiongkok sedang memasuki periode bulan madu, di mana kedua negara akan membuka kedutaan besar dan bantuan Tiongkok akan mulai mengalir masuk. Untuk pertama kalinya, *Republic of Palau* akan bergabung dengan sembilan negara Kepulauan Pasifik lainnya yang mengakui Tiongkok dengan menghadiri konferensi ketiga Forum Kerjasama Ekonomi dan Kerjasama Ekonomi Kepulauan Tiongkok-Pasifik di Asia pada Oktober lalu, dan dapatkan manfaat dari paket bantuan baru dalam kerangka BRI.

Dalam jangka panjang, terdapat dua tantangan utama dalam hubungan ini, yaitu untuk mengelola hubungan dengan Tiongkok dengan baik, seperti yang disarankan oleh satuan tugas. Tantangan internal di *Republic of Palau* sudah sangat besar, seperti kapasitas kelembagaan yang lemah dan korupsi, dan perlu dikelola sambil menavigasi hubungan baru dengan Tiongkok.

Tantangan lain terkait dengan meningkatnya persaingan strategis antara Tiongkok dan Amerika Serikat di kawasan IndoPasifik, yang memunculkan pertanyaan apakah pemerintah *Republic of Palau* mampu mengembangkan hubungan baik dengan kedua kekuatan super tersebut agar kepentingan nasionalnya tidak tergerus dan dapat terus memaksimalkan keuntungan untuk pembangunan ekonominya beserta infrastrukturnya.

Major Inf Roni Fatutohman, Abituren Akmil 2005 dan Dikreg LX Seskoad TA 2021. saat ini menjabat Kasilidgal Divisi 1 kostrad



PENGARUH SENGKETA PERBATASAN LEMBAH FERGANA TERHADAP MASA DEPAN REGIONALISASI ASIA TENGAH

Major Caj Margono, A.Md



Pendahuluan

Asia Tengah merupakan sebuah wilayah dengan karakteristik geografis yang sangat unik dengan deretan pegunungan yang ada di wilayah tersebut. Di antara jajaran pegunungan tersebut terbentuklah dataran yang lebih rendah yang disebut sebagai Lembah Fergana. Lembah Fergana yang merupakan wilayah subur dan memiliki pengairan yang baik telah mengundang banyak penduduk untuk tinggal di wilayah tersebut. Hal inilah yang menimbulkan banyak konflik terjadi antara negara-negara yang menguasai Lembah Fergana yakni Uzbekistan, Kirgizstan, dan Tajikistan. Selain perebutan potensi sumber daya alam, negara-negara tersebut seringkali terlibat konflik akibat tidak adanya kejelasan batas wilayah yang akurat serta banyaknya *enclaves* (daerah kantong) di wilayah tersebut, terlebih kawasan tersebut didiami oleh kelompok etnis yang sangat beragam. Kombinasi konflik antara hidropolitik dan perbatasan daratan di Asia Tengah telah berkembang sedemikian rupa dan tak kunjung menemukan titik terang.

Mengacu pada latar belakang diatas, maka perlu adanya pembahasan mengenai pengaruh sengketa perbatasan lembah Fergana terhadap regionalisme Asia Tengah.

Kelembagaan organisasi regional di Asia Tengah baru muncul pasca Perang Dingin yang berakhir pada awal dekade 90-an tepatnya pada 1991, setelah Uni Soviet runtuh dan terbagi menjadi beberapa negara berdaulat yang baru. Hal ini memicu banyaknya aktor negara baru dalam kawasan, termasuk Asia Tengah. Terbentuknya organisasi internasional Asia Tengah yang relatif muda dapat dirujuk sebagai dasar asumsi yang menyatakan bahwa peran organisasi regional kurang optimal dalam mengatasi persoalan-persoalan regional.

Lembaga-lembaga regional di Asia Tengah tidak dianggap sebagai lembaga yang signifikan. Selain itu, kekayaan sumber daya alam Asia Tengah yang terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu menyebabkan adanya dominasi peran negara yang sangat besar dalam menyelesaikan konflik untuk mencapai kepentingan negara. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan sulitnya resolusi konflik perbatasan melalui organisasi internasional, termasuk dalam kasus konflik perbatasan di Lembah Fergana. Adapun persoalan yang harus dianalisa, yaitu tentang, pertama persoalan penguasaan enclave lembah Fergana, kedua Aspek Konflik Hidropolitik, ketiga Cita-Cita Regionalisasi. Dari tiga persoalan yang harus dianalisa, maka dapat ditarik rumusan permasalahan “

Bagaimana pengaruh sengketa perbatasan Lembah Fergana terhadap Regionalisasi Asia Tengah “?

Pentingnya pemecahan masalah dalam penulisan esai ini tidak terlepas dari pembahasan persoalan yang harus dikaji dari sudut pandang pengaruh sengketa lembah Fergana terhadap regionalisasi di Kawasan Asia Tengah yang berdampak langsung bagi negara Uzbekistan. Metode yang digunakan dalam penulisan esai kali ini adalah dengan deskriptif analisis dan pendekatan studi kepustakaan.

Nilai guna essay tentang pengaruh sengketa lembah Fergana terhadap regionalisasi di Kawasan Asia Tengah agar dapat digunakan sebagai wahana bertukar pikiran, sehingga dapat membuka wawasan tentang strategi diplomasi dan negoisasi dalam penyelesaian konflik dimasa depan. Sedangkan ruang lingkup penulisan essay kali ini disusun dengan tata urut pendahuluan, pembahasan dan penutup.

Pembahasan

Secara administratif, Lembah Fergana dikuasai oleh tiga negara yakni Uzbekistan, Tajikistan, dan Kirgiztan. Pembagian administratif Lembah Fergana terbagi ke dalam Provinsi Batken, Jalal-Abad, kota Osh, dan Provinsi Osh dalam teritorial Kirgiztan, Provinsi Sughd oleh Tajikistan, Provinsi Andijan, Fergana, dan Namangan oleh Uzbekistan. Terlihat bahwa Uzbekistan memiliki wilayah cakupan paling luas di Lembah Fergana apabila dibandingkan dengan Kirgiztan dan Tajikistan. Sementara Tajikistan memiliki aliran Sungai Narun dan Kara Darya dari arah pegunungan di bagian timur laut dan timur lembah yang kemudian bertemu dan membentuk Syr Darya yang mengalir ke arah barat menuju Tajikistan.



Peta Wilayah Lembah Fergana Asia Tengah (tanda panah)

Selain itu juga digambarkan adanya Kanal Fergana yang dibangun pada 1939 oleh warga Uzbekistan dan Tajikistan dengan memotong aliran Kara Darya guna mengaliri lahan pertanian kapas di bagian selatan lembah penguasaan paling sempit atas Lembah Fergana.



Kanal Fergana yang dibangun pada 1939

Konflik penguasaan *enclave* di Lembah Fergana

Fenomena perbatasan teritorial negara juga mencerminkan keunikan Lembah Fergana dengan adanya beberapa *enclave* (daerah kantong) yang dimiliki oleh Uzbekistan dan Tajikistan di Kirgiztan, begitupun sebaliknya. Hal ini menunjukkan karakter penguasaan politik yang unik di Lembah Fergana dengan banyaknya *enclave* yang ada. Fakta empiris menunjukan beberapa *enclave* yang ada di Lembah Fergana antara lain adalah milik Tajikistan yakni Sarvak dikelilingi oleh Uzbekistan, Vorukh dan Qalacha Barat dikelilingi oleh Kirgiztan, teritori Uzbekistan yakni Sokh yang dikelilingi oleh wilayah Tajikistan, Shakhimardan, Qalacha, dan Djangail yang dikelilingi wilayah Kirgiztan, serta wilayah milik Kirgiztan yakni Barak yang terkurung daratan Uzbekistan.

Dalam kasus pembagian wilayah di Asia Tengah tidak hanya dikategorikan sesuai dengan etnis mayoritas, tetapi juga atas dasar kesepakatan politik, meskipun hal ini juga belum menemui titik terang. *Enclave* yang terdapat di Lembah Fergana merupakan sebuah warisan dari Uni Soviet dengan pembagian teritorial yang belum terselesaikan sejak 1920an dan 1950an. Hal ini memicu ketidakjelasan dalam batas-batas negara yang mencuat terutama setelah runtuhan Uni Soviet pada 1992.

Negara-negara pemilik Lembah Fergana yang sebelumnya melaksanakan fungsi administratif sesuai dengan arahan Moskow, kemudian tidak memiliki patokan yang jelas karena telah memerdekaan diri. Kemerdekaan negara-negara Asia Tengah, terutama negara yang menguasai Lembah Fergana ini membawa dampak signifikan dengan ditonjolkannya kepentingan nasional masing-masing dan tidak membuka cukup lebar jalur diplomasi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dan pengelolaan air di lembah.

Selain itu data menunjukkan beberapa peristiwa yang sempat mewarnai dinamika sengketa wilayah di Lembah Fergana antara lain: satu, pada tahun 1989: terjadi kerusuhan etnis di Uzbekistan antara etnis Uzbek dan Meshkhetian Turki serta kerusuhan etnis di Samarkandek, Kirgiztan antara etnis Tajik dan Kirgiz yang memperebutkan pembagian lahan dan pengairan. Dua, pada tahun 1990: kerusuhan pecah di Kirgiztan tepatnya di daerah Osh dan Uzgen yang mengakibatkan ratusan orang tewas. Peristiwa tersebut dipicu oleh sengketa lahan. Tiga, pada tahun 1991 hingga 1992: Terdapat aneksasi wilayah Namangan oleh kelompok militer bernama Adolat. Aneksasi tersebut tidak hanya menguasai wilayah, tetapi juga atas pengelolaan pemerintahan di wilayah tersebut. Empat, pada tahun 1999: Pada Agustus terjadi serangan dari kelompok separatis IMU (*Islamic Movement of Uzbekistan*) yang melintasi perbatasan Tajikistan menuju Kirgiztan dan menyerang warga asing serta tentara Kirgiztan dan Uzbekistan di wilayah Batken. Sementara pada November terjadi gelombang kekerasan yang melibatkan pengungsi Tajikistan dan warga asli Kirgiztan di Provinsi Batken yang dipicu oleh perbedaan alokasi penggunaan sumber air.

Pembagian teritorial *Enclave* di lembah Fergana diharapkan tidak hanya dikategorikan sesuai dengan etnis mayoritas, akan tetapi atas dasar kesepakatan politik, kemudian mengutamakan diplomasi dalam penyelesaian sengketa perbatasan dan pengelolaan air serta pihak yang bersengketa yaitu negara Uzbekistan dan negara Kyrgyzstan agar tidak

menonjolkan kepentingan nasional masing-masing, sehingga proses-proses penyelesaian sengketa perbatasan yang selama ini terus diusahakan agar tidak terjadi kekacauan yang berkelanjutan.

Perbatasan merupakan perwujudan dari kedaulatan teritorial, sehingga daerah perbatasan dimaknai pula sebagai daerah atau jalur pemisah antara unit-unit politik (negara). Dalam sengketa lembah Fergana diperlukan persepsi yang sama tentang Demarkasi atau penegasan batas merupakan tahap yang ditempuh setelah penetapan batas atau delimitasi yang biasanya ditetapkan melalui perjanjian batas. Penegasan Batas dilakukan di lapangan secara fisik. Ketegasan ini diperlukan karena sifat garis batas yang sangat penting, yaitu sebagai tanda awal mula dan berakhirnya hak, kewajiban serta kedaulatan negara. Penegasan batas dilakukan dengan menandai perbatasan dengan memasang tanda-tanda atau patok-patok batas di sepanjang garis perbatasan sesuai dengan perjanjian.

Dalam pembagian *Enclave* di lembah Fergana yang belum jelas secara hukum akan menjadi sengketa yang terus berkelanjutan antara negara Uzbekistan dan Kyrgyzstan yang akan mempengaruhi stabilitas keamanan Kawasan Asia Tengah. Permasalahan tersebut tentunya menjadi kendala dalam penyelesaian pembagian *enclave* di negara-negara pecahan Uni Soviet yang baru beberapa tahun memperoleh kemerdekaannya. Sedangkan kelemahan dalam merupakan faktor penghambat intern dalam penyelesaian sengketa pembagian *enclave* lembah Fergana yaitu, pertama masih adanya ego negara masing-masing penguasaan *enclave* dengan mengklaim sendiri secara sepahak, kedua kedua negara tidak mau melakukan upaya diplomasi dalam penyelesaian *enclave* lembah Fergana sehingga persoalan menjadi berlarut-larut, ketiga belum jelas tentang batas-batas negara setelah runtuhnya Uni Soviet.

Guna menjawab penyelesaian konflik penguasaan *enclave* lembah Fergana dihadapkan kendala dan hambatan yang ada, sehingga perlu adanya upaya-upaya agar pembagian penguasaan *enclave* lembah

Fergana dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa, maka upayanya sebagai berikut : pertama dengan cara negoisasi antara negara Uzbekistan dan Kyrgyzstan dalam penyelesaian enclave sehingga diperoleh kesepakatan yang terbaik oleh kedua belah pihak, kedua dengan menjalin Kerjasama bilateral mengenai batas negara dalam suatu perjanjian.

Aspek Konflik Hidropolitik

Terdapat beberapa dimensi konflik hidropolitik di kawasan Asia Tengah yang dapat diajukan sebagai dasar pemahaman konflik Lembah Fergana yakni (a) air dan ekonomi, (b) air dan keamanan, serta (c) air dan kebudayaan (Turton & Henwood, 2002). Ketiganya merupakan unsur pembentuk konflik yang rumit di kawasan Lembah Fergana. Melalui kasus tersebut dapat kita ketahui kepentingan yang saling bertentangan dalam penguasaan sumber daya air dan aspek ekonomi, yakni sebagai sumber utama dalam keberlangsungan industri setempat.

Ketiga negara yang terlibat di dalam sengketa wilayah Lembah Fergana pun memiliki sektor peindustrian yang berbeda satu dengan lainnya. Tajikistan mengandalkan kapas mentah sebagai komoditas ekspor hingga mencapai nilai USD 49,5 juta. Komoditas kapas juga menjadi andalan bagi Uzbekistan dengan nilai ekspor mencapai USD 476 juta (*Observatory of Economic Complexity, 2015*). Kedua negara tersebut pun memanfaatkan Kanal Fergana yang telah dibangun bersama puluhan tahun silam untuk menjadi sumber irigasi utama di kawasan perkebunan kapas. Sementara Kirgizstan menjadi negara yang mengandalkan kawasan lembah sebagai sumber bahan tambang untuk pasar ekspor. Komoditas emas, alumunium, perak, uranium, dan bahan tambang lainnya banyak diekstraksi di kawasan lembah (Mindat, 2016).

Hal ini tentu menggambarkan pentingnya keberadaan Lembah Fergana dan perairan yang ada di dalamnya bagi sektor agrikultur Uzbekistan dan Tajikistan serta sektor pertambangan bagi Kirgizstan.

Aspek ekonomi tidak hanya menjadi satu-satunya alasan bagi ketiga negara tersebut untuk mempertahankan Lembah Fergana dan perairan di dalamnya. Apabila melihat lebih dekat, terdapat urgensi aspek ketahanan pangan bagi ketiga negara terkait dengan keberadaan sungai-sungai di sekitar lembah. Delta sungai menciptakan lahan yang subur untuk ditanami komoditas pangan seperti sayuran, buah, dan bahan pokok lainnya. Terlebih, sungai-sungai yang terdapat di Lembah Fergana memberikan alternatif ketersediaan sumber air bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor pembentuk konflik lainnya adalah unsur kebudayaan dan etnisitas masyarakat lembah.

Terdapat kecenderungan di hampir semua wilayah di dunia, bahwa awal mula peradaban dimulai di sekitar wilayah perairan. Hal ini menjadi kendala dan kelemahan yang terjadi di kawasan Lembah Fergana dengan sungai-sungainya.

Masyarakat yang mendiami kawasan tersebut tentu telah membangun komunitas dalam jangka waktu yang sangat lama. Hingga pada masa keruntuhan Uni Soviet, masyarakat merasakan perbedaan yang sangat mendasar di mana mereka tidak lagi berada dalam satu kawasan federasi, melainkan sebagai negara yang benar-benar berbeda sekaligus berdaulat. Karakteristik masyarakat nomaden di sekitar Lembah Fergana yang pada dasarnya tidak terbatas batasan negara, kemudian menjadi persoalan baru ketika muncul konsepsi kedaulatan yang sangat ditekankan oleh masing-masing negara. Aspek etnisitas tersebut kemudian banyak memengaruhi penentuan batas negara yang sangat rumit di kawasan lembah dengan munculnya banyak daerah kantong.

Upaya yang dilakukan pada tahun 2015 tercatat perkembangan positif. Kyrgyzstan dan Uzbekistan sepakat mempercepat demarkasi garis batas negara yang belum disepakati dengan mengubah prinsip-prinsip dan pendekatan yang diterapkan. Pada awal tahun 2015, Uzbekistan juga melanjutkan kembali pengiriman gas ke Kyrgyzstan Selatan yang

sempat dihentikan sejak April 2014 (Uzbekistan beberapa kali menghentikan pasokan gas alamnya ke Kyrgyzstan Selatan dan menggunakan isu gas alam sebagai media penekan terhadap Kyrgyzstan. Kyrgyzstan terus berupaya menjalankan politik luar negeri multi vector melalui hubungan baik dengan negara tetangga di Asia Tengah (Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan dan Turkmenistan). Hubungan Kyrgyzstan dengan negara-negara di kawasan, terutama Uzbekistan, Tajikistan dan Kazakstan masih seputar penyelesaikan masalah perbatasan (Uzbekistan, Tajikistan dan Kazakhstan), penetapan demarkasi negara (Uzbekistan dan Tajikistan), pemanfaatan sungai lintas batas (Kazakhstan), *human trafficking* (Kazakhstan) dan energi (Uzbekistan dan Tajikistan).

Cita-Cita Regionalisasi

Setelah runtuhnya Uni Soviet, Kazakhstan, dan Uzbekistan mengambil inisiatif untuk membuat sebuah integrasi di kawasan Asia Tengah yang nantinya diwujudkan dalam bentuk kesepakatan pembentukan integrasi yang ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 1994, tak lama kemudian Kirgiztan ikut menandatangani kesepakatan.

Menindak lanjuti kesepakatan yang ada, pada tahun 1998 tiga menteri dari tiap-tiap negara bertemu dan merundingkan berbagai macam isu kawasan seperti isu pembagian air, masalah, kebijakan migrasi dan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun yang sama, Tajikistan masuk ke dalam kesepakatan dan nama resmi pun akhirnya disepakati menjadi CAEC atau *Central Asian Economic Community (Crisis Group, 2014)*. Akan tetapi berbagai aktivitas di dalam CAEC tidaklah berdampak signifikan bagi kawasan.

Kemudian pada tahun 2007, Presiden Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev mengusulkan dibangunnya sebuah integrasi kawasan baik dalam hal politik maupun ekonomi dengan nama *Central Asian Union*. Organisasi ini ditujukan untuk mengintegrasikan Asia Tengah seperti halnya integrasi Uni Eropa.

Pada akhirnya hanya Kazakhstan dan Kirgizstan yang menandatangani kesepakatan,

sementara negara Asia Tengah lainnya yakni Uzbekistan hanya sebatas menandatangani *treaty of eternal friendship*.

Meski demikian usaha-usaha penyatuhan Asia Tengah terus dilakukan seperti dengan perjanjian bebas visa, penghapusan tarif perdagangan, dan pengentasan kemiskinan Asia Tengah. Hingga saat ini, CAU masih terus melaksanakan usaha-usaha integrasi dengan menargetkan kelima negara kawasan Asia Tengah lainnya yakni Uzbekistan, Turkmenistan, dan Tajikistan agar menjadi anggota penuh CAU.

Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1992, Asia Tengah mengalami babak baru dalam proses regionalisasi kawasan. Bidang-bidang pembangunan di Asia Tengah terus berkembang, terutama dalam hal ekonomi. Hal inipun memengaruhi kesepakatan antar negara dalam mencapai persetujuan pembagian pengelolaan air dan sumber daya lainnya serta perebutan wilayah.

Pertumbuhan dan usaha pembangunan di tiap-tiap negara menyebabkan interaksi antar negara yang juga meningkat. Ini merupakan salah satu indikator lain dari meningkatnya intensitas regionalisasi di Asia Tengah. Interaksi yang terus menerus meningkat mendorong adanya ide dan gagasan tentang adanya sebuah kerjasama regional yang mewadahi semua negara dalam wilayah tersebut untuk mengakomodir kepentingan yang ada, seperti halnya yang terjadi dalam CAU dan juga Dewan Turki. Pada periode ini, mulailah muncul bentuk-bentuk regionalisme di Asia Tengah seperti *Central Asian Union* dan Dewan Turki.

Kendala dan kelemahan dalam regionalisasi Asia Tengah yaitu konflik seringkali terjadi di Lembah Fergana. Lembah yang subur dan kaya akan sumber daya alam tersebut menjadi perebutan diantara ketiga negara akibat tidak adanya otoritas yang lebih berkuasa diantaranya. Benturan yang terjadi di dalam dinamika hubungan antar negara-negara Asia Tengah, utamanya dalam kasus Lembah Fergana tentu memengaruhi dan dipengaruhi oleh kerjasama regional yang telah terbentuk, meskipun tidaklah signifikan. Hal ini dapat kita lihat dari adanya gelombang kekerasan yang

terus terjadi semenjak 1989 hingga akhir 2014, dan bahkan laporan terus bermunculan hingga saat ini. Keberadaan CAEC sejak 1994 tidaklah cukup membantu dalam menyelesaikan konflik, bahkan ekonomi sekalipun.



Munculnya CAU pada 2007 dan Dewan Turki pada 2009 juga tidak membawa dampak signifikan. Kedua organisasi yang didirikan atas dasar ekonomi, politik, dan budaya itu pun tidak dapat membendung gejolak yang ada di Lembah Fergana. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerusuhan etnis yang terjadi di ketiga negara pada tahun 2000, 2010, dan 2014.



Central Asian Union Flag

Hal ini mengisyaratkan bahwa persoalan politik masuk ke dalam ranah yang dihindari. Terdapat asumsi lain yang dapat pula diajukan bahwa untuk mencapai optimalisasi kerjasama maka konflik berbau politik dapat pula dibiarkan dalam *status quo*.

Kerjasama ekonomi dan kebudayaan dapat dioptimalkan dengan tetap menunda penyelesaian konflik wilayah ketika proses negosiasi berlangsung sebagai sebuah klauswa wajib yang dijaminkan. Sehingga organisasi regional sekalipun tidak mampu mengurai konflik yang terus berlangsung.

Asumsi dasar dari kebijakan yang demikian dapat dipahami sebagai sebuah bentuk usaha untuk menciptakan posisi tawar yang lebih baik di masa depan dengan menunda isu yang sedang berlangsung. Faktor-faktor tersebut menjadi pemicu utama bagi sulitnya titik temu dalam sengketa Lembah Fergana. Sedangkan kesulitan dalam penyelesaian sengketa inilah yang kemudian menjadi pemicu bagi persoalan lanjutan yakni sulitnya pelaksanaan regionalisme di Asia Tengah.

Faktor keanggotaan, sentimen etnis, dan campur tangan asing terasa sangat dominan dalam pelaksanaan regionalisme di Asia Tengah yang selanjutnya berdampak pada *status quo* penyelesaian sengketa Lembah Fergana.

Penutup

Dari pembahasan dan analisis yang telah dijabarkan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni, Pertama, pada tahun 2015 tercatat perkembangan positif negara Kyrgyzstan dan Uzbekistan yang sepakat mempercepat demarkasi garis batas negara yang belum disepakati dengan mengubah prinsip-prinsip dan pendekatan yang diterapkan. Kedua, hubungan diplomatik mulai terjalin dengan Uzbekistan dengan melanjutkan kembali pengiriman gas ke Kyrgyzstan Selatan yang sempat dihentikan sejak April 2014. Ketiga, dalam konflik lembah Fergana yang melibatkan negara Uzbekistan dengan Kryzgistan dalam hasil negoisasi menghasilkan Win-Win solution dimana kedua negara telah menjalin hubungan bilateral dalam bidang ekonomi dan sepakat akan mempercepat demarkasi garis batas negara melalui negosiasi. Keempat, faktor regionalisme melalui kerjasama regional tidak berperan dalam penyelesaian konflik Lembah Fergana dengan indikator utama yakni terus berlarut-larutnya kerusuhan di perbatasan ketiga negara.

Mayor Caj Margono, A.Md adalah abituren semapa PK 2002 dan Seskoad LX, saat ini menjabat sebagai kabagbinposmil subdit binminu ditajenad



PENYELESAIAN KONFLIK DI NEGARA SOMALIA MELALUI DIPLOMASI DAN NEGOSIASI

Mayor Cpm Barnabas Irianto, S.H

Pendahuluan

Benua Afrika merupakan kawasan yang kerap dilanda konflik, kawasan yang dianggap tertinggal dalam konteks pembangunan modern ini masih dihadapkan dengan penyelesaian konflik dengan cara kekerasan. Hal ini tentu saja akan menimbulkan korban jiwa dari masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik. Konflik yang terjadi di berbagai negara Afrika tidak sedikit memakan korban dan cenderung berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Konflik berkepanjangan antara *Warlords* yang terjadi di Somalia telah berlangsung cukup lama. Konflik ini menimbulkan dampak yang merugikan bagi penduduk negara tempat konflik itu terjadi. *Warlords* adalah seorang penguasa daerah yang memiliki kontrol atas pasukan militer yang setia kepadanya, tetapi tidak kepada pemerintah pusat.

Dalam mencapai hasil diplomasi dan negosiasi yang diinginkan diperlukan kemampuan berkomunikasi yang efektif dan persuasif serta mampu melakukan lobby yang efektif. Pada tingkat kepentingan kelompok klan, negosiasi selalu menjadi pilihan sebagai cara dominan untuk meraih tujuan tersebut. Dalam pelaksanaannya, dapat menggunakan sumber-sumber kekuatan yang dimiliki seperti kekuatan militer.

Untuk bisa bernegosiasi dengan baik, kekuatan bargaining position merupakan syarat penting yang harus dimiliki oleh suatu kelompok. Posisi tawar suatu kelompok sangat dipengaruhi oleh kekuatan kelompok/klan dan salah satu komponen yang menonjol adalah komponen militer disamping komponen yang lain. Hal inilah yang membuat militer sulit untuk dipisahkan dari diplomasi dalam konflik yang terjadi di Somalia. Diharapkan dengan adanya rekonsiliasi antar para milisi yang bertikai akan membawa kedamaian di wilayah Somalia dari konflik yang berkepanjangan. Namun demikian pada kenyataan saat ini masih terjadi konflik antar milisi yang telah berafiliasi dengan ideologi keagamaan, bukan lagi antar wilayah. Sejak jatuhnya pemerintahan Presiden Somalia, Siyad Barre, pada tahun 1991 merupakan dampak dari perebutan kekuasaan yang terjadi antara *Warlords* satu dengan yang lainnya. Akibatnya, Somalia sejak saat itu tidak memiliki institusi pemerintahan yang jelas dan warganya hidup dalam ketidakjelasan dan perang saudara yang berlarut-larut.

Dari uraian di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul, antara lain pertama apa yang menyebabkan terjadinya konflik dalam Negara Somalia, kedua sejauh mana peran *wardlors* dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, ketiga bagaimana peran

organisasi internasional dalam membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di Negara Somalia.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan masalah yang terjadi di dalam Negara Somalia adalah bagaimana peran pemerintah Somalia dan pihak yang berkonflik untuk menghentikan konflik yang terjadi dan bersama-sama membangun Negara Somalia. Bawa pentingnya penulisan essai ini adalah sebagai bahan untuk memahami berbagai macam konflik yang tentunya membutuhkan mekanisme resolusi konflik yang berbeda. Mekanisme resolusi konflik yang tepat dibutuhkan agar tidak terjadi eskalasi konflik dan konflik bisa dipecahkan dengan cepat. Terdapat beberapa konflik yang membutuhkan mediator dalam penyelesaiannya, bahkan ada pula yang membutuhkan sebuah tindakan koersif.

Penulisann esai ini menggunakan metode analisis deskriptif dan studi kepustakaan, yaitu menghimpun informasi yang relevan dengan topik/masalah yang akan atau sedang dibahas. Nilai guna dari penulisan ini adalah memberikan sumbangan informasi tentang konflik yang terjadi di Negara Somalia dan cara penyelesaiannya dari sudut pandang negosiasi.

Adapun maksud dari penulisan ini adalah memberikan gambaran tentang upaya negosiasi dalam penyelesaian konflik di Negara Somalia, sedangkan tujuan dari penulisan ini yaitu memberikan masukan terhadap penyelesaian konflik di Negara Somalia.

Ruang lingkup dalam penulisan essai ini terdiri dari Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup serta dibatasi pada konflik yang terjadi di Negara Somalia.

Pembahasan.

Krisis yang terjadi di Somalia awalnya di dasari oleh persaingan faksi-faksi yang juga membawa identitas klan, dalam memperebutkan kekuasaan. Hal ini yang memicu perang saudara di Somalia sehingga menyebabkan runtuhnya pemerintahan yang ada di Somalia pada tahun 1991.

Somalia kemudian menjadi negara tanpa pemerintah dan jatuh dalam krisis dikarenakan absennya institusi negara dalam kehidupan masyarakat.



Peta Wilayah Negara Somalia

Penyebab Konflik di Negara Somalia.

Bericara mengenai konflik di Somalia, kaitan sejarah masa lalu dengan masa kini sangat erat. Konflik yang terjadi di Somalia sekarang ini merupakan rangkaian konflik panjang yang dimulai sejak berkuasanya Mohammad Siyad Barre. Mohammed Siyad Barre memperoleh kekuasaannya melalui kudeta militer setelah Presiden sebelumnya, Abdirashid Ali Shermarke, tewas ditembak oleh pengawalnya sendiri ketika mengunjungi Las Anod pada Oktober 1969. Mohammed Siyad Barre yang bertindak sebagai komandan *Supreme Revolutionary Council (SRC)*, kemudian melakukan kudeta militer dan menempatkan dirinya sebagai Presiden Somalia pada tahun yang sama. Hal ini kemudian diikuti dengan perubahan nama resmi Somalia dari *United Republic of Somalia* menjadi *Somalia Democratic Republic* dan diikuti dengan pembubaran parlemen dan mahkamah agung oleh administrasi Siyad Barre.



Mohammad Siyad Barre

Sejak jatuhnya pemerintahan Presiden Somalia, Siyad Barre, pada tahun 1991 merupakan dampak dari perebutan kekuasaan yang terjadi antara *Warlords* satu dengan yang lainnya. Banyak dari kelompok oposisi kemudian mulai bersaing memperebutkan pengaruh kekosongan kekuasaan yang terjadi setelah penggulingan pemerintahan Barre. Di selatan, faksi-faksi bersenjata yang dipimpin oleh komandan *United Somalia Congres (USC)* Jenderal Mohamed Farah Aidid dan Ali Mahdi Mohamed, bentrok karena masing-masing berusaha untuk menancapkan kekuasaan atas ibu kota. Di barat laut, dalam konferensi Burao pada bulan April-Mei 1991, kelompok separatis *Somalia National Movement (SNM)* memproklamirkan kemerdekaan untuk wilayah tersebut dengan nama *Somaliland*. Mereka secara bersamaan memilih pemimpin SNM, Abdirahman Ahmed Ali Tuur, sebagai presiden. Pada tahun 1992, setelah empat bulan pertempuran sengit untuk menguasai Mogadishu, sebuah gencatan senjata disetujui antara Ali Mahdi Mohamed dan Mohamed Farah Aidid. Tidak ada pemimpin yang menguasai ibu kota tersebut, dan sebagai hasilnya, sebuah 'garis hijau' disepakati antara utara dan selatan yang membagi wilayah kekuasaan mereka.

Somalia yang dahulu bernama Republik Demokratik Somali, adalah sebuah negara yang eksis secara de jure. Somalia tidak memiliki otoritas pemerintah pusat yang diakui. Otoritas secara de facto berada di tangan pemerintah yang tidak diakui, yaitu Somaliland (bekas wilayah Britania Raya yang terletak di bagian barat laut Somalia), Puntland (wilayah bagian Timur laut Somalia), dan beberapa panglima perang (*warlord*) yang saling bermusuhan, dimana ketiga-tiganya memimpin pemerintahan oposisi. Tidak adanya lembaga dan otoritas nasional yang menciptakan dan menjalankan peraturan membuat Somalia rentan menjadi surga tempat persembunyian bagi teroris – teroris.

Belakangan muncul salah satu kelompok milisi di Somalia yang berafiliasi dengan Al-Qaeda memiliki kelompok kecil yang menjadikan Somalia sebagai sarangnya.

Kelompok yang menamakan diri sebagai Al-Shabaab ini menyatakan diri sebagai bagian dari Al-Qaeda sejak Februari 2012 oleh pemimpin Al-Qaeda, Ayman Al-Zawahiri.

Konflik menurut Ralf Dahrendorf bahwa sekali kelompok-kelompok konflik muncul, mereka terlibat di dalam tindakan-tindakan yang menyebabkan perubahan-perubahan di dalam struktur sosial. Ketika konflik disertai dengan kekerasan, akan terjadi perubahan struktural yang mendadak. Konflik menurut Dahrendorf adalah hubungan konflik dengan perubahan. Dahrendorf membedakan tiga kelompok yang luas. Yang pertama, kelompok kuasi yang kedua kelompok kepentingan dan yang ketiga kelompok konflik.

Berkaitan dengan teori konflik Dahrendorf tentang masyarakat ialah bahwa setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial juga berbagai elemen kemasayarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemakaian terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. Posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Otoritas tidak terletak dalam diri individu, tetapi dalam posisi, sehingga tidak bersifat statis. Jadi, seseorang bisa saja berkuasa atau memiliki otoritas dalam lingkungan tertentu dan tidak mempunyai kuasa pada lingkungan lainnya. Mereka yang berada pada kelompok atas atau penguasa ingin tetap mempertahankan *status quo* sedangkan mereka yang berada dalam kelompok bawah berkeinginan supaya ada perubahan. Sumber konflik yaitu adanya jenjang antara si kaya dan si miskin, pejabat memperlakukan pegawainya secara sememana, majikan yang memperlakukan seenaknya kepada buruh, kepentingan antara buruh dan majikan antar kelompok, antar

partai, dan adanya dominasi ketidakadilan atau diskriminasi agama, dan juga kekuasaan.

Konflik yang terjadi di Somalia merupakan konflik dalam struktur sosial Somalia yang dipengaruhi oleh sistem klan. Dalam memahami konflik di Somalia, peranan klan sangat vital karena terdapat beberapa klan yang memiliki pengaruh kuat pada wilayah-wilayah tertentu. Klan juga memiliki pengaruh besar dalam sistem ekonomi suatu wilayah dan memiliki sub-klan yang juga memiliki jumlah anggota yang besar. Hal ini perlu dipahami dengan baik sebelum berusaha menyelesaikan konflik tersebut, karena bisa saja langkah yang diambil tidak sesuai dengan kondisi dan bisa saja memperparah kondisi yang terbangun. Untuk itu, perlu adanya identifikasi mengenai siapa saja aktor yang terlibat dan apa saja kepentingan yang diperjuangkan oleh masing - masing pihak, yang secara sadar terlibat dalam perselisihan atau pertentangan dengan satu atau lebih kelompok orang lainnya karena mereka sama-sama mengejar tujuan-tujuan yang bertentangan.

Perselisihan atau pertentangan yang dimaksud dapat berupa perjuangan terhadap upaya mendapatkan nilai-nilai tertentu ataupun klaim terhadap status, kekuasaan, dan sumber-sumber yang terbatas ke tersediaannya yang didalam proses berlangsungnya konflik ditandai dengan upaya pihak-pihak yang terlibat saling menetralisir, mencederai, bahkan sampai dengan upaya-upaya mengeliminasi keberadaan lawan.

Peranan *Warlords* dalam penyelesaian konflik

Konflik yang berkepanjangan merupakan hal yang sering ditemui di Benua Afrika. Entah itu konflik sumber daya alam, konflik etnis, maupun konflik yang memperebutkan wilayah.

Konflik yang banyak dijumpai adalah konflik yang melibatkan antara satu etnis dengan etnis lainnya. Konflik etnis yang tidak ditangani dengan cepat akan bereskalasi menjadi perang sipil yang kemudian akan mengganggu stabilitas dalam sebuah negara.

Somalia merupakan negara yang terdiri dari banyak kelompok etnis minoritas yang homogen, dimana perbedaan etnis di Somalia justru memiliki kesamaan bahasa dan agama, namun konflik yang terjadi Somalia berasal dari perpecahan antara klan-klan kelompok minoritas dengan mayoritas.

Hal tersebut disebabkan oleh adanya penolakan terhadap kondisi dalam negeri yang dirasa tidak memberikan manfaat apapun bagi etnisnya. Penolakan ini bisa saja terhadap sistem politik yang tidak mampu mengakomodasi, ke-pentingan semua pihak maupun pem-bangunan. Pada akhirnya, konflik yang meluas dengan cepat ini dapat mengakibatkan kekacauan dalam pemerintahan Somalia.

Perundingan pertama untuk membahas masa depan Somalia diadakan dan merupakan inisiatif dari Presiden Djibouti, Hassan Gulaid Abtidon. Rekonsiliasi ini mempertemukan kelompok yang terlibat dalam pemberontakan yang menjatuhkan Siyad Barre pada Januari 1991. Jenderal Farrah Aidid yang mewakili USC pada rekonsiliasi di Djibouti itu menentang keputusan yang dihasilkan dari rekonsiliasi tersebut. Rekonsiliasi tersebut menunjuk Ali Mahdi Muhammad, pemimpin faksi yang berseteru dengan Farrah Aidid, sebagai presiden sementara Somalia.

Perseteruan yang terjadi antara Farah Aidid dan Ali Mahdi Muhammad meningkatkan intensitas kontak senjata antara faksi keduanya walaupun keduanya tampak akur dalam ruang perundingan.

Penyelesaian dan penanganan sebuah konflik akan sangat membutuhkan pemahaman yang menyeluruh terhadap aspek-aspek yang terlibat dalam sebuah konflik. Sebuah gambaran umum mengenai konflik akan sangat dibutuhkan dalam prosesnya.

Ho-Won Jeong memberikan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk membuat pemetaan sebuah konflik. Secara umum indikator ini terbagi atas 4 bagian yaitu: parties, goals, issues dan interests.⁷ Parties merupakan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik.

pihak yang berkepentingan telah terjadi, maka harus diadakan proses fasilitasi antara keduanya. Tidak jarang proses fasilitasi ini mendapatkan jalan buntu karena masing-masing pihak ingin mendapatkan keuntungan yang lebih daripada pihak lainnya.

Berdasarkan Analisa diatas maka dapat dikatakan bahwa peran *Warlords* dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Somalia adalah sangat kecil dan kurang kontribusinya, hal tersebut dikarenakan masing-masing *Warlords* merasa mempunyai pengaruh yang besar di Klan maupun Sub Klan dengan dukungan persenjataan dan sumber daya alam wilayahnya. Walaupun dalam pelaksanaan perundingan difasilitasi oleh negara-negara tetangga dari Somalia.

Peranan Organisasi Internasional dalam penyelesaian konflik di Somalia.

Permasalahan yang timbul di Somalia sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab bersama negara-negara yang berada di Afrika. Bagaimanapun, Somalia merupakan salah satu negara yang memiliki luas wilayah yang besar di Afrika Timur.

Permasalahan yang terjadi di Somalia pun juga turut mempengaruhi stabilitas keamanan di kawasan Afrika Timur. Uni Afrika sebagai organisasi regional yang ada di benua Afrika kemudian melakukan upaya-upaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul di Somalia. Pada tingkat kepentingan negara, diplomasi selalu menjadi pilihan negara sebagai cara dominan untuk meraih tujuan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, negara dapat menggunakan sumber-sumber kekuatan yang dimiliki seperti kekuatan militer. Untuk bisa bernegosiasi dengan baik, kekuatan bargaining position merupakan syarat penting yang harus dimiliki oleh suatu bangsa.

Posisi tawar suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh national power bangsa dan salah satu komponen yang menonjol dari *national power* tersebut adalah komponen militer disamping komponen yang lain. Hal inilah yang membuat militer sulit untuk dipisahkan dari diplomasi Negara.

Suatu negara yang terlibat dalam konflik baik dengan negara/pihak lainnya maupun konflik internal, dalam penyelesaiannya memerlukan sebuah resolusi konflik. Resolusi konflik yang tercantum dalam *Paris Treaty 1928*, dapat melalui jalur diplomatik dan jalur hukum.

Jalur diplomatik terdiri dari negosiasi, pencarian fakta, jasa-jasa baik, mediasi dan konsiliasi. Sedangkan jalur hukum terdiri dari arbitrase dan pengadilan internasional. Sebelum akhirnya sampai kepada hasil dari resolusi konflik. Ada pula tahapan yang dilalui untuk mencapai damai, yaitu *peace keeping*, *peace making*, dan *peace building*. *Peace keeping* merupakan proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan perang sebagai penjaga perdamaian yang netral. *Peace making* merupakan proses yang bertujuan mempertemukan sikap politik dan strategis dari pihak-pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit (pimpinan). *Peace building* adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi, demi tercapainya perdamaian.

Terminologi *Peacekeeping* sangat sering digunakan untuk menggambarkan misi perdamaian yang melibatkan PBB atau berada di bawah komando PBB secara langsung. Pun jika keterlibatan PBB dianggap tidak tepat atau tidak mungkin, maka PBB melalui Dewan Keamanan dapat melegalkan keterlibatan aktor organisasi internasional atau regional lain, seperti *North Atlantic Treaty Organization (NATO)*, *Uni Afrika (UA)* ataupun koalisi negara-negara.

PBB juga meratifikasi pembentukan misi perdamaian di Somalia dengan nama *United Nations Operation in Somalia (UNOSOM)* pada tahun 1992, kemudian membentuk *Unified Task Force (UNITAF)* pada Desember 1992.

Pasukan UNITAF yang memiliki persenjataan lengkap menjadi tekanan kepada para pemimpin faksi untuk melakukan rekonsiliasi. Proses rekonsiliasi antara para pemimpin-pemimpin faksi tersebut diadakan di Addis Ababa, Ethiopia pada Maret 1993.



Patroli Pasukan United Nations Operation in Somalia (UNOSOM) di Mogadishu Maret 1993

Penutup.

Konflik merupakan isu yang sangat sering dijumpai dewasa ini. Perbedaan pandangan dan keyakinan sering menjadi penyebab utama terjadinya pertentangan antara dua pihak atau lebih. Permasalahan yang timbul antara pihak-pihak terkait biasanya ber-escalasi dan diselesaikan dengan cara kekerasan. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kerugian yang nyata maupun tidak nyata. Kerugian yang ditimbulkan juga dirasakan oleh pihak yang tidak terlibat langsung dalam konflik yang terjadi.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik yang berkepanjangan di Somalia dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai tidak membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak-pihak yang bertikai. Proses negosiasi panjang dengan bantuan pihak ketiga dalam hal ini PBB maupun Uni Afrika (UA) untuk meredam bahkan menyelesaikan konflik juga mengalami jalan buntu sehingga Somalia tetap dilanda konflik yang mengorbankan masyarakatnya dan telah menjadi krisis kemanusiaan.

Kehadiran negara bagi warga negara tidak dirasakan lagi oleh warga Somalia. Hasil dari negosiasi yang diinisiasi oleh negara-negara anggota Uni Afrika hanya dapat bertahan sementara demikian juga dengan campur tangan PBB tidak dapat menyelesaikan persoalan, sehingga negosiasi dalam penyelesaian konflik di Somalia dapat dikatakan adalah Kalah-Kalah, dimana pihak-pihak yang berunding gagal mencapai kesepakatan. Pertentangan kepentingan lebih dominan dari persamaan kepentingan, tidak ada atau sangat sedikit kompromi dan muncul kemungkinan bahwa konflik atau pertentangan dapat berkembang menjadi lebih besar. Hal tersebut dikarenakan para *Warlords* dan faksi-faksi yang terlibat dalam konflik tetap berupaya menjadi yang lebih superior dibandingkan dengan mengutamakan kepentingan bersama untuk membangun Somalia.

Mayor Cpm Barnabas Irianto, S.H. adalah arbituren Semapa PK 2003 dan lulusan Seskoad 2021 (Dikreg LX), saat ini menjabat sebagai Irdyaintelter Divif 3/DCY Kostrad.



Suasana di Mogadishu Maret 1993

Pertemuan yang diadakan di Addis Ababa tersebut kemudian melahirkan beberapa keputusan yang disetujui oleh 15 pemimpin faksi yang hadir pada saat itu. Poin penting yang dilahirkan dari pertemuan di Addis Ababa tersebut adalah komitmen semua pemimpin faksi untuk mengadakan rekonsiliasi yang ditujukan untuk membangun pemerintahan transisi dan pembangunan institusi pemerintahan yang diperlukan, namun kesepakatan gencatan senjata tersebut dilanggar mengakibatkan konflik kembali terjadi. Sampai saat ini situasi di Somalia masih diwarnai dengan konflik antar klan dan pemerintah transisi belum bisa menyelesaikan masalah yang ada di Somalia.



TOTAL DEFENCE STRATEGI SINERGITAS MILITER DAN SIPIL DALAM SISTEM PERTAHANAN NEGARA SINGAPURA

Letkol Czi Jaka Katmanto, S.P.

Pendahuluan

Letak Negara Singapura sangat strategis karena terletak di Jalur silang pelayaran internasional dan Pelabuhan Singapura merupakan salah satu pelabuhan tersibuk dari lima Pelabuhan tersibuk di dunia. Geografi Singapura merupakan kepulauan dengan 63 pulau dan Pulau terbesarnya adalah Pulau Ujong atau dikenal dengan Singapura. Singapura dipisahkan Selat Johor di utara dari daratan Malaysia dan dibagian selatan dipisahkan Selat Singapura dari Kepulauan Riau Indonesia. Luas wilayah Negara Singapura sekitar 722,5 Km² dengan jumlah penduduk 5.850.342 Jiwa pada Desember tahun 2020.



Peta Wilayah Negara Singapura

Singapura adalah negara pulau dengan penduduk yang mayoritas merupakan bangsa pendatang, memiliki kemampuan ekonomi yang sangat tergantung pada bidang jasa dan layanan, tetapi berhasil membangun industri senjatanya dengan cukup berhasil. Pengalaman masa lalu sejak awal kemerdekaan yang buram akibat konflik dengan negara tetangga, Singapura sejak berketetapan membangun sendiri industri Alutsistanya.

Mempunyai industri pertahanan sendiri adalah kebutuhan strategis dalam menghadapi lingkungan geopolitik regional yang tidak stabil saat itu. Adanya industri pertahanan akan membuat angkatan bersenjata untuk mandiri dalam persenjataan, tidak tergantung pada negara lain yang relatif rawan blokade atau embargo. Industri pertahanan nasional juga akan membuat gentar pihak lain yang berniat mengganggu kedaulatan negara. Walaupun Singapura mempunyai hubungan baik dan kesepakatan pertahanan dengan beberapa negara maju, namun hal itu bukan jaminan diberikannya bantuan militer ketika muncul ancaman eksternal. Keinginan Singapura ini diwujudkan melalui kerjasama dengan berbagai kalangan dan berbagai negara dengan harapan terpelihara dan meningkatnya kemampuan

penguasaan wilayah, sehingga mampu untuk mengenali secara mendalam ciri-ciri potensi Geografi, Demografi dan Kondisi Sosial yang ada di wilayahnya. Agar dapat mengantisipasi hakekat ancaman yang mungkin terjadi dan berkembang serta mampu merumuskan, mengambil langkah atau tindakan yang proporsional untuk pencegahan dan penanggulangan dalam rangka mewujudkan ketahanan wilayah.

Dari latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang dapat dikemukakan adalah : 1) Bagaimanakah sistem pertahanan negara di negara Singapura?; 2) Bagaimanakah bentuk hubungan/kerjasama/sinergi militer sipil dalam sistem pertahanan negara Singapura?; 3) Bagaimanakah bentuk pelibatan militer dan sipil dalam sistem Pertahanan negara Singapura, terutama ketika dihadapkan dengan kemungkinan datangnya ancaman dari luar negeri?; 4) Jelaskan dengan teknik analisis SWOT (kekuatan/keunggulan, kelemahan/kekurangan, peluang dan kendala) pelibatan militer dan sipil dalam sistem pertahanan negara Singapura?.

Penulisan esai ini memiliki nilai penting untuk memberikan gambaran mengenai sistem pertahanan negara Singapura dalam menghadapi ancaman. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis yaitu memberikan uraian didasarkan pada studi kepustakaan dari literatur dan referensi terkait.

Nilai guna penulisan esai teritorial terkait sistem pertahanan negara ini adalah sebagai bahan pembelajaran dan memperkaya khazanah penulis dalam memahami sistem pertahanan negara tertentu dalam konteks akademis. Penulisan esai ini dimaksudkan sebagai gambaran mengenai hubungan militer dan sipil dalam konteks sistem pertahanan negara. Ruang lingkup dalam penulisan ini terdiri dari pendahuluan, pembahasan dan penutup serta dibatasi pada sistem pertahanan negara Singapura.

Pembahasan.

Pada bagian pendahuluan telah disinggung mengenai sistem pertahanan negara Singapura

yang menghendaki keamanan bagi negaranya setelah pada awal kemerdekaannya diwarnai konflik antar negara. Pada bagian ini akan dibahas secara lebih jelas mengenai sistem pertahanan negara Singapura baik terkait komunikasi yang dijalankan antar negara maupun antara sipil dan militer, hingga pembinaan perlawanwan wilayah yang diaplikasikan dalam bentuk wajib militer.

Sistem pertahanan negara di negara Singapura.

Singapore Armed Forces (SAF) adalah komponen militer dari Departemen Pertahanan Republik Singapura sebagai bagian dari negara kota yang menerapkan strategi Pertahanan Total. Pertahanan Total (*Total Defence*) adalah nama strategi pertahanan komprehensif Singapura yang diadaptasi dari negara-negara seperti Denmark, Finlandia, Swedia, Swiss, Austria, Ukraina dan Rusia, didasarkan pada pemahaman bahwa selain aksi militer, agresor juga dapat menyerang dengan merusak sistem ekonomi, mencabik struktur sosial, dan juga menarget keyakinan dan komitmen pertahanan warga Singapura beserta kemampuan memulihkan diri dari bencana, baik alam maupun buatan manusia. Konsep *Total Defence* meliputi lima aspek kunci – pertahanan militer, pertahanan sipil, pertahanan ekonomi, pertahanan sosial, dan pertahanan psikologis – dan berfokus pada keperluan agar setiap orang Singapura memainkan bagianya untuk membela bangsa.



Singapore Armed Forces (SAF)

Pertahanan Militer terdiri dari Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) termasuk *citizen soldiers*. Misi mereka adalah untuk "meningkatkan perdamaian dan keamanan Singapura melalui tindakan pencegahan dan diplomasi; jika gagal, untuk mengamankan

kemenangan yang cepat dan pasti atas agresor". Sebagai bagian dari misi, SAF berusaha untuk terus berada pada keadaan siap operasi dalam 24 jam per hari.

Pertahanan Sipil ialah soal memastikan warga Singapura tahu apa yang harus dilakukan disaat darurat. Pasukan Pertahanan Sipil Singapura (SCDF) mendukung aspek Total Defence tanpa terkecuali. Namun, jika Singapura menghadapi keadaan darurat nasional (misalnya: terorisme atau perang), SCDF tidak akan mampu mengatasi tuntutan situasi. Oleh karena itu, keikutsertaan warga Singapura dalam membantu sesama sangat penting. Untuk memfasilitasi hal ini, SCDF merekrut dan melatih relawan pertahanan sipil menyangkut pertolongan pertama, prosedur penyelamatan dan evakuasi, serta manajemen pengungsian.



Pasukan Pertahanan Sipil Singapura (SCDF)

Pertahanan Ekonomi didefinisikan sebagai tindakan mempertahankan perekonomian negara dan kemampuannya untuk bersaing di dunia, serta perlindungan lingkungan. Pertahanan ini juga mencakup membantu Singapura (dan warga Singapura) tetap relevan dalam ekonomi global dan menempatkan sistem ekonomi agar perekonomian Singapura tidak runtuh di saat krisis.

Pertahanan Sosial menjaga kekokohan struktur sosial dan memastikan warga Singapura hidup dalam keselarasan terlepas dari ras atau agama. Masalah ini sangat penting karena masyarakat Singapura multi-ras dan multi-religi.

Pertahanan Psikologis menyangkut kesetiaan, komitmen untuk Singapura, dan kekuatan serta ketahanan untuk mengatasi tantangan demi tantangan.

Pertahanan ini adalah komponen yang akan menentukan apakah warga Singapura akan tinggal untuk tetap berjuang atau meninggalkan negara dalam kesulitan. Bentuk hubungan/kerjasama/sinergi militer sipil dalam sistem pertahanan negara Singapura.

Bentuk hubungan sinergitas Militer dan Sipil di Negara Singapura dalam Sistem Pertahanan Negara Singapura yakni Total Defence, telah bersinergi dengan baik bahwa setiap warga negara Singapura mengetahui apa yang harus diperbuat dalam keadaan darurat. Dalam Sistem Total Defence pertahanan negara Singapura terdapat lima Aspek yang bersinergi yakni pertahanan militer dalam hal ini menjadi tanggungjawab SAF, kemudian pertahanan Sipil oleh SCDF yang setiap tahun pada tanggal 15 Februari memberikan pelatihan melalui sirine pesan nasional diseluruh penjuru wilayah Singapura untuk melatihkan tiap individu-individu warga Singapura apa yang harus diperbuat dalam kondisi darurat nasional. Hubungan kerjasama militer dan Sipil diwujudkan dalam pertahanan ekonomi dimana ketahanan ekonomi Singapura mampu mendorong kemandirian industri Alutsista untuk menyuplai Alutsista SAF. Hubungan Militer dan Sipil dalam sistem pertahanan diwujudkan juga dalam pertahanan sosial dimana ketahanan struktur social warga negara singapura mampu mendukung kestabilan kekuatan militer SAF dan dalam pertahanan Psikologi dimana setiap warga negara Singapura ditanamkan rasa cinta tanah untuk membela Singapura disaat terjadi ancaman sehingga dapat mendukung tugas Militer dalam mencegah dan menanggulangi ancaman pertahanan dan keamanan Singapura.

Salah satu bentuk hubungan sipil dengan militer diwujudkan dalam bentuk dukungan Pemerintah Singapura terhadap industri strategis militer dengan mengalokasikan anggaran pertahanan yang besar sejak kemerdekaan 9 Agustus tahun 1965. Anggaran militer Singapura mencapai US\$10 miliar pada tahun 20145 dan berdasar data GFP pada tahun 2021 US\$ 10,7 miliar. Anggaran ini digunakan untuk membeli amunisi, senjata ringan, rudal, dan peralatan pertahanan lain (seperti pesawat tempur, helikopter, kapal

perang, dan kapal selam) dari perusahaan dalam dan luar negeri (khususnya AS), di samping untuk latihan dan operasi, serta membayar gaji tentara. Sebagian anggaran ini dikhurasukan untuk membiayai riset persenjataan pertahanan. Pemerintah Singapura memilih untuk tidak memberikan subsidi langsung dalam mendukung industri pertahanan nasional. Industri pertahanan harus menjadi entitas bisnis yang menguntungkan dan tidak membutuhkan subsidi negara yang besar agar bisa bertahan hidup. Industri pertahanan disiapkan untuk dapat melakukan komersialisasi dan diversifikasi usaha agar tetap menunjukkan kemampuan yang tinggi sekaligus berkembang baik secara bisnis. Diversifikasi usaha memaksa industri pertahanan menghadapi risiko bisnis dan liku-liku pasar global, namun juga memberikan peluang ekonomi yang besar. Kebijakan pemerintah yang tegas bahwa industri pertahanan diarahkan untuk melayani sektor militer dan komersial sejak awal telah mendorong perusahaan-perusahaan alutsista untuk beroperasi secara efisien agar bisa bertahan dalam persaingan bebas produk industri pertahanan yang sangat keras.

Singapura sangat memahami pentingnya pertahanan bagi suatu bangsa, percaya bahwa dibutuhkan kekuatan yang lebih besar, dengan hadirnya negara-negara tetangga yang lebih besar. Untuk itu, Singapura menjalin kerjasama dengan Israel untuk membantu Singapura mendirikan kekuatan pertahanan yang didasarkan pada Angkatan Pertahanan Israel. Berbagai taktik dipelajari dan dilatihkan seperti perang hutan yang memberikan kemampuan tentara Singapura untuk melawan dan bertempur di negara-negara tetangga. Demi kelangsungan hidup dan pembangunan, Singapura sangat bergantung pada lingkungan kawasan yang damai dan stabil. Mengingat keadaan strategis Singapura, pertahanan yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa Singapura menikmati perdamaian dan stabilitas, dan bahwa kedaulatan dan integritas teritorial Singapura terlindungi. Untuk mendukung strategi total defense,

berdasarkan data pada 20206, jumlah personel angkatan bersenjata Singapura mencapai 386.000. Angka itu terdiri personel aktif sebanyak 72.500 dan personel cadangan 312.500. Angkatan Darat Singapura memiliki 196 tank, 2.860 kendaraan tempur baja, 204 artileri, 48 artileri swa-gerak, dan 18 roket artileri. Untuk Angkatan Udara, Singapura memiliki 273 alutsista, yang di antaranya terdiri dari 84 helikopter, 100 pesawat multiperan, 27 pesawat tempur. Sementara itu, Angkatan Laut Singapura memiliki 6 fregat, 6 korvet, dan 4 kapal selam.

Sebagian besar alutsista tersebut merupakan hasil produksi dalam negeri. Menurut Stockholm *International Peace Research Institute (SIPRI)*, *Singapore Technologies Engineering* menempati peringkat 49 di antara perusahaan-perusahaan senjata terbesar di dunia pada tahun 2010. Dengan peringkat ini tidak diragukan, industri senjata Singapura telah mampu membangun, mengembangkan, mempertahankan, dan menempatkannya pada posisi industri alutsista besar dunia. Menurut SIPRI, ekspor senjata dari Singapura selama 1990-2011 mencapai US \$ 493 juta.

Namun Singapura juga mengimpor senjata dari negara lain senilai US \$ 11.260 juta selama periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa Singapura terus membeli alutsista modern untuk penguatan angkatan perangnya. Kelemahan dalam hal jumlah penduduk yang sedikit diatasi Singapura dengan kepemilikan senjata yang canggih sebagai pengganda terhadap kekuatan personel tentara yang ada.

Dalam menerapkan kebijakan militer, Singapura menekankan pencegahan dan diplomasi sebagai prinsip-prinsip dasar kebijakan pertahanan militer Singapura. Selama bertahun-tahun, militer telah mengembangkan hubungan luas dengan angkatan bersenjata dari negara lain. Dalam beberapa tahun terakhir, ada juga peningkatan penekanan pada perdamaian dan menjaga bantuan operasi internasional, khususnya operasi penjaga perdamaian di berbagai belahan dunia.

Menurut analis militer dan strategis, seperti Tim Huxley dalam pertahanan Singapura menggunakan doktrin militer *forward defense*. SAF memiliki misi untuk "meningkatkan perdamaian dan keamanan Singapura melalui pencegahan dan diplomasi". Kekuatan utama sebenarnya terdiri dari 400.000 atau lebih prajurit nasional yang siap operasional. Kebijakan SAF terhadap etnis Melayu lebih banyak ditugaskan di kepolisian dan pertahanan sipil (pemadam kebakaran), peran tempur tidak aktif. Perempuan dalam sistem pertahanan negara Singapura dibebaskan untuk memilih keterlibatannya dalam peran tempur dan non-tempur. Beberapa anggota prajurit wanita bertugas di satuan tempur, tetapi sebagian besar berada di posisi administrasi dan logistik.

Bentuk pelibatan militer dan sipil dalam sistem Pertahanan negara Singapura

Singapura memisahkan diri dari Federasi Malaya bukan karena keinginan sendiri. Diskriminasi etnis melayu terhadap penduduk Negeri Singapura yang kebanyakan warga Tionghoa memicu 'kemerdekaan' pada 1965, belum lagi konfrontasi dengan Indonesia memakan korban sipil, dengan meledaknya Gedung MacDonald di *Orchard Road* oleh aksi prajurit TNI AL Usman dan Harun. Lee Kuan Yew, bersama partainya PAP akhirnya.

merancang kebijakan wajib militer untuk seluruh warganya. Wilayah Singapura tidak luas. Jika semua penduduk dewasa tidak dikerahkan, akan langsung habis saat digempur Malaysia atau Indonesia. Negara Singapura menyebut program wajib militer sebagai national service. Pria yang berumur 18 tahun ke atas tidak bisa mengelak dari tugas tersebut. Jangka waktu Wajib Militer 22 sampai 24 bulan, di seluruh matra militer atau dinas. Mereka yang diharuskan menjalani wajib militer sepenuh waktu (*Full Time National Servicemen, NSF*) selama dua tahun akan berdinas di Angkatan Bersenjata Singapura (SAF), Kepolisian Singapura (SPF), atau Pasukan Pertahanan Sipil Singapura (*Singapore Civil Defence Force, SCDF*).

Apabila seseorang yang wajib mengikuti wamil ini sudah selesai menjalani dinasnya secara penuh, maka dia dianggap "siap operasi", dan setelah itu dikenal sebagai *Operationally-Ready National Serviceman (NSman)* atau seorang yang siap beroperasi untuk kepentingan Nasional. Para NSman ini mirip dengan pasukan cadangan di negara lain. Mereka berjumlah sekitar 80% dari total jumlah angkatan bersenjata Singapura. Mereka menjadi tulang punggung Angkatan Bersenjata Singapura.

Setiap tahun, para wamil ini dipilih untuk melalui latihan tahap tinggi atau rendah sampai mencapai usia 40 atau 50 tahun, tergantung pada pangkat mereka. Latihan intensif atau 'tahap tinggi' melibatkan operasi dalam Latihan Dalam Markas (*In-Camp Training, ICT*) selama tujuh hari atau lebih, sementara latihan 'tahap rendah' pula memaksudkan sesi latihan selama enam hari ke bawah. Singapura termasuk salah satu negara di mana masa wajib militer melebihi 18 bulan dan sesudahnya ada usia wajib sebagai prajurit cadangan sampai 40 untuk pangkat non Perwira dan 50 tahun untuk para perwira.

Selain wajib militer, Angkatan Darat memandang teknologi sebagai pengganda kekuatan dan sarana untuk mempertahankan kekuatan tempur mengingat keterbatasan populasi Singapura. Kesiapan tempur adalah kunci utama dari kebijakan Angkatan Darat, dan latihan militer hingga tingkat divisi dilakukan berkali-kali setiap tahun, mensimulasikan operasi spektrum penuh, hingga dan termasuk perang skala penuh. Permainan perang divisi adalah senjata gabungan, urusan tiga layanan yang melibatkan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Republik Singapura. Karena ruang pelatihan terbatas di Singapura — tembakan artilleri akan sulit untuk diukur beberapa latihan militer dilakukan di luar negeri.

Para cadangan secara berkala berlatih di luar negeri, unit mereka secara teratur dievaluasi untuk kesiapan tempur. Angkatan Darat juga berlatih secara bilateral dengan beberapa negara tuan rumah, dan pertukaran militer sering terjadi.

Dalam rangka menguatkan sinergitas militer dan sipil serta selalu mengingatkan akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menghadapi ancaman, Setiap tahun, *Nexus* (Kantor Pusat Pendidikan Nasional), departemen dalam *Mindef*, akan meluncurkan Operasi Pertahanan Total sebelum 15 Februari untuk mempromosikan kesadaran publik dan mendatangkan inisiatif total Pertahanan Total.

Pada 15 Februari setiap tahun, tepatnya pada pukul 6:20 pm (berubah dari pukul 12:05 pm pada tahun 2015), *Singapore Civil Defence Force (SCDF)* akan memperdengarkan Sinyal Pesan Penting (*Important Message Signal*) melalui sirene *Public Warning System (PWS)* di seluruh pulau. Pada saat yang sama, semua stasiun radio lokal juga akan menyiarkan sinyal pesan penting ini dan menjelaskan pendengar mereka langkah-langkah yang akan diambil terhadap masing-masing dari tiga jenis sinyal PWS.

Penjelasan dengan teknik analisis SWOT (kekuatan/keunggulan, kelemahan/kekurangan, peluang dan kendala) pelibatan militer dan sipil dalam sistem pertahanan negara Singapura.

Dari data dan fakta mengenai sistem pertahanan negara Singapura di atas, dapat dianalisis berdasarkan aspek internal dan eksternal negara tersebut.

Faktor Internal	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
Faktor Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> Geografi Strategis Nilai Ekonomi Sistem Layanan Jasa Alutsista Canggih Keinginan berubah Duk UU Wajib Militer <i>Public Warning System</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Anggaran Wamil besar SDM terbatas Wilayah teritorial terbatas Multi etnis/diskriminasi Melayu Potensi perpecahan tinggi
Peluang (Opportunity)	Strategi SO Pertahanan Sipil	Strategi WO Pertahanan Ekonomi
Kendala (Threat)	Strategi ST Pertahanan Sosial	Strategi WT Pertahanan Psikologis

Jenis ancaman yg berbeda

Dari aspek internal, analisis ditinjau dari segi kekuatan, yaitu Singapura merupakan negara dengan geografi yang sangat strategis diperlintasan jalur komunikasi dan perdagangan dunia.

Singapura berhasil mengembangkan suatu sistem pelayanan jasa bagi transportasi dan perdagangan laut yang menggunakan jasanya. Pengembangan ini pun mendapat kepercayaan dunia internasional, sehingga mampu mendatangkan nilai ekonomis yang tinggi sebagai pendukung kekuatan ekonomi negara tersebut. Selain itu kekuatan yang dimiliki Singapura adalah keinginan yang kuat untuk merubah kondisi negara lemah menjadi negara dengan kekuatan militer yang modern dan efektif dengan dukungan alutsista yang selalu update. Dan kekuatan utama adalah adanya peraturan hukum yang tidak bisa dilanggar oleh setiap warga negara maupun penduduk tetap (permanent resident) yaitu wajib militer yang dilanjutkan dengan ikatan dinas selama beberapa tahun dan diikuti kegiatan Sinyal Pesan Penting melalui sirine nasional dan stasiun radio lokal akan menyiarkan *Important Message Signal* dan menjelaskan para pendengar langkah-langkah yang tepat untuk setiap jenis dari tiga sinyal PWS. Setelah terdengar, sekolah akan membacakan pesan Pertahanan Sipil di mana siswa diingatkan tentang pentingnya sinyal PWS (*public warning system*) dan langkah-langkah yang harus diambil.



*Singapore Civil Defence Force (SCDF) akan memperdengarkan Sinyal Pesan Penting (*Important Message Signal*) melalui sirene *Public Warning System (PWS)* di seluruh pulau.*

Kelemahan sistem pertahanan negara Singapura adalah diperlukan anggaran yang besar untuk membiayai wajib militer setiap warga negaranya yang telah memasuki usia 18 tahun. Sumber daya manusia yang dimiliki Singapura sangat terbatas, wilayah teritorial Singapura sangat terbatas dan tidak lebih dari sebuah kota yang dapat dijangkau oleh tembakan meriam. Selain itu, adanya perbedaan kebijakan SAF terhadap etnis Melayu lebih banyak ditugaskan di kepolisian dan pertahanan sipil (pemadam kebakaran) yang dapat memicu timbulnya sentimen etnis dan perpecahan dalam tubuh militer Singapura.

Dari aspek eksternal, peluang yang ada antara lain kondisi kawasan regional yang semakin kondusif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kerjasama dan saling percaya untuk meningkatkan keamanan dalam negeri.

Perubahan lingkungan strategis yang merubah bentuk perang dengan lebih mengandalkan *softpower* dibandingkan *hardpower*, sehingga pengembangan sistem pertahanan *Total Defense* Singapura dapat menyeluruh terhadap 5 aspek yang dikembangkan. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah perkembangan lingkungan strategis yang menghasilkan jenis ancaman yang berbeda dengan spektrum ancaman yang luas terutama terorisme, *cyber warfare*, kejahatan lintas dunia, konflik perbatasan dan bencana alam/non alam.

Penutup.

Dari pembahasan esai diatas, kesimpulan yang dapat diambil bagaimana negara kecil seperti Singapura yang mempunyai kendala dengan keterbatasan baik secara geografis, demografis dan ketiadaan sumber kekayaan alam dapat mengubah kendala tersebut melalui penerapan kebijakan strategi *Total Defence* dan *Revolution in Military Affairs* menjadi suatu keuntungan yang strategis. Singapura mampu mengatasi berbagai macam ancaman yang terjadi baik itu berupa ancaman *simetric* dan *asymmetric* yang akan menyerang negara tersebut dengan menggunakan strategi *Total Defence* dan

konsep *Revolutionary in Military Affairs* yang mereka adopsi dari Israel. Konsep *Revolution in Military Affairs* diterapkan oleh Singapura sebagai upaya untuk menghadapi tekanan kekuatan negara-negara di kawasan regional. Dalam mengatasi tekanan tersebut Singapura membangun kemampuan pertahanan nasional melalui pengembangan industri strategis dan bersinergi dengan partner strategis dari luar yang menjamin keamanan Singapura secara efektif.

Pada akhir-akhir ini dengan berubahnya paradigma global, terutama disebabkan oleh globalisasi dan berkurangnya penggunaan *hard power* di berbagai kawasan, ada penekanan baru pada penggunaan *soft power*. Walaupun demikian, keyakinan pada pendekatan *hard power* tidak bisa begitu saja dikesampingkan, dengan kekuatan militer dan ekonomi yang kuat dilengkapi oleh kontrol internal yang kuat terhadap sistem politik dalam negeri tetap menjadi pilar kebijaksanaan pertahanan Singapura.



Singapore Armed Forces (SAF)

Strategi *Total Defence* dilakukan sebagai upaya diplomasi dan pencegahan. Strategi *Total Defence* sendiri mempunyai lima elemen dasar yaitu: pertahanan militer, pertahanan sipil, pertahanan ekonomi, pertahanan di bidang sosial, dan pertahanan psikologis. Trend kebijakan pertahanan Singapura selalu mengikuti dinamika ekonomi, politik dan keamanan yang terjadi di kawasan sekitar negara tersebut dengan tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara sesama anggota ASEAN maupun dengan negara di luar kawasan Asia Tenggara.

Letkol Czi Jaka Katmanto, S.P. adalah Abituren SEPA PK 1998 dan Dikreg LX Seskoad TA 2021 saat ini menjabat sebagai Wadandenmadam XVII/Cenderawasih.



SISTEM PERTAHANAN NEGARA IRAN DALAM KERJASAMA MILITER DAN SIPIL UNTUK MENGHADAPI ANCAMAN

Major Inf Albertinus Mariano

Pendahuluan

Pertahanan negara merupakan salah satu konsekuensi dari keberadaan sebuah negara, sehingga menjadi gejala universal dan perhatian semua negara. Terkait dengan kedaulatan negara, keselamatan bangsa serta persatuan nasional, konsekuensi juga mengandung sejumlah konsekuensi seperti pertahanan yang lemah, intervensi, penjajahan atau pendudukan negara lain.

Cara yang dilakukan untuk menghindari kemungkinan sejumlah konsekuensi terhadap semua negara di dunia, tidak terkecuali negara yang sedang melakukan penjajahan atau pendudukan, harus memperhatikan hal yang berkaitan dengan masalah politik pertahanan negara. Sistem Pertahanan negara Iran diorganisir berdasarkan prinsip esensial pertahanan diri yang sah. Iran adalah Perwalian Ahli Hukum Islam dan Republik Islam di mana presiden, parlemen (Majles) dan sistem peradilan berbagi kekuasaan yang dicadangkan kepada pemerintah nasional, menurut Konstitusinya. Politik Iran berlangsung dalam kerangka yang secara resmi menggabungkan unsur-unsur teokrasi dan demokrasi presidensial.

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, untuk lebih memahami system pertahanan

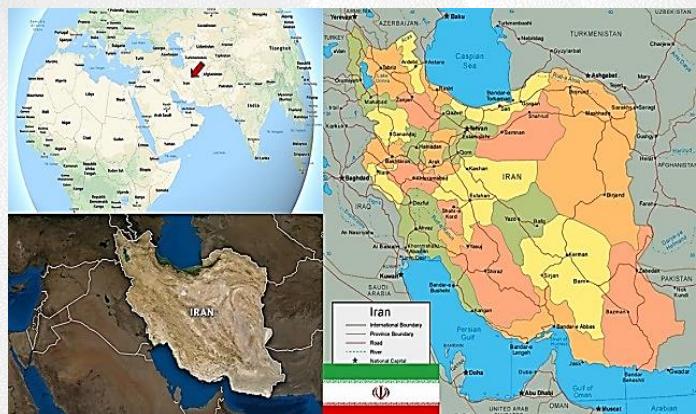
negara Iran perlu dilakukan analisa berdasarkan pada pokok-pokok permasalahan sebagai berikut Pertama, Bagaimakah sistem pertahanan Negara Iran, Kedua. Bagaimakah bentuk hubungan/kerjasama/sinergi militer sipil dalam sistem pertahanan negara Iran dan ketiga Bagaimakah bentuk pelibatan militer dan sipil dalam sistem Pertahanan negara Iran, terutama ketika dihadapkan dengan kemungkinan datangnya ancaman dari luar negeri? (analisa menggunakan analisis SWOT). Berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, identifikasi permasalahan yang muncul adalah : **"Bagaimana Sistem Pertahanan Negara Iran dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri ?"**

Nilai guna dari tulisan ini mengarahkan para pembaca agar memahami tentang Sistem Pertahanan Negara Iran dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri. Essai ini dibuat dengan maksud memberikan gambaran mengenai Sistem Pertahanan Negara Iran dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri yang bertujuan sebagai sumbang saran pemikiran kepada komando atas dikaitkan dengan Sistem Pertahanan Negara Iran dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri. Penulisan ini dibatasi pada Sistem Pertahanan Negara Iran dalam menghadapi

ancaman dari dalam maupun luar negeri dengan Ruang lingkup dalam penulisan essay ini meliputi pendahuluan, pembahasan dan penutup.

Pembahasan

Iran adalah kekuatan regional dan menengah, dengan lokasi strategis secara geopolitik. Iran adalah anggota pendiri PBB, ECO, OKI, dan OPEC. Ia memiliki cadangan besar bahan bakar fosil - termasuk pasokan gas alam terbesar kedua di dunia dan cadangan minyak terbukti terbesar ketiga. Warisan budaya yang kaya di negara ini tercermin sebagian dari 22 Situs Warisan Dunia UNESCO, jumlah terbesar ketiga di Asia dan ke-10 terbesar di dunia. Secara historis negara multi-etnis, Iran tetap merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari banyak kelompok etnis, bahasa, dan agama, yang terbesar adalah Persia, Azeri, Kurdi, Mazandaranis dan Lurs.



Peta Wilayah Negara Iran

Sistem Pertahanan Nasional Iran, berada di bawah tanggung jawab kementerian pertahanan logistik dibawah presiden dan Khamenei sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata dan membentuk kebijakan militer dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri.

Dibawah ini akan dilakukan analisis mengenai sistem pertahanan Negara Iran; bentuk hubungan/kerjasama/sinergi militer sipil dalam sistem pertahanan negara Iran; dan bentuk pelibatan militer dan sipil dalam sistem Pertahanan negara Iran, terutama ketika dihadapkan dengan kemungkinan datangnya ancaman dari luar negeri.

Sistem Pertahanan Negara Iran

Berdasarkan data dan fakta, Iran adalah Perwalian Ahli Hukum Islam dan republik Islam di mana presiden, parlemen (Majles) dan sistem peradilan berbagi kekuasaan yang dicadangkan kepada pemerintah nasional, menurut Konstitusinya. Politik Iran berlangsung dalam kerangka yang secara resmi menggabungkan unsur-unsur teokrasi dan demokrasi presidensial. Konstitusi Desember 1979, dan amandemennya tahun 1989, mendefinisikan tatanan politik, ekonomi, dan sosial Republik Islam Iran, menyatakan bahwa Syiah Islam adalah agama resmi Iran di mana sekitar 90–95% orang Iran menggasosiasikan diri mereka dengan cabang Syiah Islam.

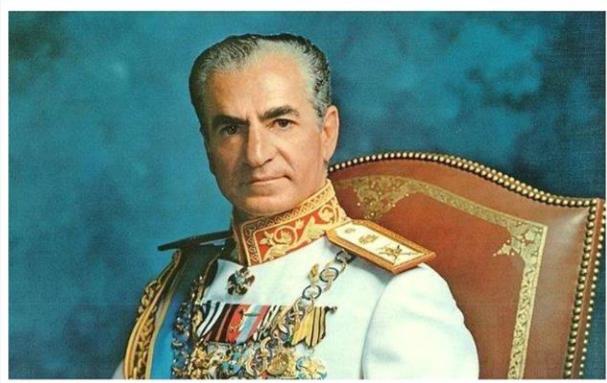
Iran memiliki presiden yang dipilih secara demokratis, parlemen (atau Majlis), Majelis Ahli yang memilih Pemimpin Tertinggi, dan dewan lokal. Menurut konstitusi, semua kandidat yang mencalonkan diri untuk posisi ini harus diperiksa oleh Dewan Penjaga sebelum dipilih. Selain itu, ada perwakilan yang dipilih dari organisasi yang ditunjuk (biasanya di bawah kendali Pemimpin Tertinggi) untuk "melindungi karakter Islam negara". Sebelum 1979, Iran memiliki sistem politiknya sebagai monarki konstitusional demokratis parlementer dengan sistem parlementer. Shah menjabat sebagai kepala negara sementara Perdana Menteri memegang jabatan kepala pemerintahan dari Konstitusi Persia 1906. Sementara sistem politik bersifat sekuler, ia telah digambarkan sebagai otoriter di tahun-tahun terakhir Negara Kekaisaran.

Republik Islam Iran memiliki dua jenis angkatan bersenjata: pasukan reguler Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut, dan Pengawal Revolusi, dengan total sekitar 545.000 pasukan aktif. Iran juga memiliki sekitar 350.000 Pasukan Cadangan, dengan total sekitar 900.000 pasukan terlatih.

Pemerintah Iran memiliki pasukan paramiliter, sukarelawan milisi dalam Korps Pengawal Revolusi Islam, yang disebut *Basij*, yang mencakup sekitar 90.000 anggota berseragam tugas aktif penuh waktu.

Hingga 11 juta pria dan wanita adalah anggota Basij yang berpotensi dipanggil untuk bertugas. *Global Security.org* memperkirakan Iran dapat memobilisasi "hingga satu juta orang", yang akan menjadi salah satu mobilisasi pasukan terbesar di dunia. Pada tahun 2007, pengeluaran militer Iran mewakili 2,6% dari PDB atau \$ 102 per kapita, angka terendah dari negara-negara Teluk Persia. Doktrin militer Iran didasarkan pada pencegahan. Pada tahun 2014, negara tersebut membelanjakan \$ 15 miliar untuk persenjataan, sementara negara bagian Dewan Kerjasama Teluk menghabiskan delapan kali lebih banyak.

Pada bulan Juni 1925, Reza Shah memperkenalkan hukum wajib militer di *National Consultative Majlis*. Saat itu setiap laki-laki yang telah mencapai usia 21 tahun harus menjalani wajib militer selama dua tahun. Wajib militer membebaskan wanita dari dinas militer setelah revolusi 1979. Konstitusi Iran mewajibkan semua pria berusia 18 tahun ke atas untuk bertugas di pangkalan militer atau polisi. Mereka tidak dapat meninggalkan negara atau dipekerjakan tanpa menyelesaikan masa kerja. Jangka waktu bervariasi dari 18 hingga 24 bulan.



Mohammad Reza Shah Pahlavi

Memahami data dan fakta diatas yang ada, penulis memiliki keinginan dan harapan para pembaca memahami Sistem Pertahanan Negara Iran. Analisis Sistem Pertahanan Negara Iran tidak lepas dari kondisi politik negara tersebut, Iran berusaha menyelesaikan setiap konflik yang terjadi, baik internasional maupun nasional, melalui cara-cara damai, karena disadari penyelesaian konflik dengan

cara kekerasan bersenjata dalam bentuk perang (terbatas/terbuka) akan senantiasa menimbulkan malapetaka bagi umat manusia. Namun apabila cara-cara damai yang ditempuh tidak memberikan hasil yang nyata, maka bangsa Iran terpaksa menempuh cara-cara penyelesaian konflik dengan kekerasan dalam bentuk perang.

Hal tersebut terutama sekali terhadap konflik-konflik yang menyangkut kepentingan nasional yang utama yaitu dalam upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Iran. Oleh karena itu perang bagi bangsa Iran merupakan jalan terakhir yang terpaksa ditempuh apabila cara-cara damai tidak memberi hasil. Dan apabila bangsa Iran harus melaksanakan perang, hal tersebut akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hukum yang berlaku, serta membatasi untuk terjadinya korban dan bencana yang sekecil-kecilnya.

Perang sebagai jalan terakhir yang terpaksa harus ditempuh tersebut akan merupakan upaya nasional yang melibatkan seluruh potensi dan kekuatan seluruh rakyat, nasional baik dalam bentuk penggerahan kekuatan seluruh rakyat, maupun potensi wilayah beserta keseluruhan kemampuan yang berada di dalam/di atasnya.

Bentuk Hubungan/Kerjasama/Sinergi Militer Sipil Dalam Sistem Pertahanan Negara Iran

Berdasarkan data fakta yang ada, Iran memberlakukan kebijakan wajib militer terhadap bangsanya yang sudah memasuki umur 21 tahun. Pada bulan Juni 1925, Reza Shah memperkenalkan hukum wajib militer di *National Consultative Majlis*.

Saat itu setiap laki-laki yang telah mencapai usia 21 tahun harus menjalani wajib militer selama dua tahun. Wajib militer membebaskan wanita dari dinas militer setelah revolusi 1979. Konstitusi Iran mewajibkan semua pria berusia 18 tahun ke atas untuk bertugas di pangkalan militer atau polisi.

Mereka tidak dapat meninggalkan negara atau dipekerjakan tanpa menyelesaikan masa kerja. Jangka waktu bervariasi dari 18 hingga 24 bulan.

Saat ini angkatan Bersenjata Iran adalah yang terbesar di Timur Tengah dalam hal pasukan aktif. Pasukan militer Iran terdiri dari sekitar 610.000 personel tugas aktif ditambah 350.000 personel cadangan dan terlatih yang dapat dimobilisasi bila diperlukan, menjadikan tenaga militer negara itu menjadi sekitar 960.000 total personel. Angka-angka ini tidak termasuk *Law Enforcement Force* atau Basij. Memahami data dan fakta diatas yang ada, penulis memiliki keinginan dan harapan para pembaca memahami bentuk hubungan/ kerjasama/ sinergi militer sipil dalam sistem pertahanan negara Iran. Analisis bentuk hubungan/ kerjasama/sinergi militer sipil dalam sistem pertahanan negara Iran tidak terlalu baik, kebijakan wajib militer yang diberlakukan pemerintah Iran ditanggapi pro dan kontra oleh warga masyarakat Iran. Hal ini disebabkan karena kebijakan Konstitusi Iran mewajibkan semua pria berusia 18 tahun ke atas untuk bertugas di pangkalan militer atau polisi. Mereka tidak dapat meninggalkan negara atau dipekerjakan tanpa menyelesaikan masa kerja. Waktu yang cukup lama 18-24 bulan menjadikan warga Iran kurang mendapatkan kebebasan dalam menjalankan kehidupannya.

Selain itu, akibat kebijakan pemerintah yang reaktif terhadap para kritikus kepada pemerintah dan pemimpin tertinggi, menimbulkan pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap warga masyarakatnya. Kondisi ini menyebabkan polemik diseluruh kalangan warga Iran. Menurut laporan internasional, catatan hak asasi manusia Iran sangat buruk. Rezim di Iran tidak demokratis, telah sering menganiaya dan menangkap kritikus pemerintah dan Pemimpin Tertinggi, dan sangat membatasi partisipasi kandidat dalam pemilihan umum serta bentuk kegiatan politik lainnya. Hak-hak perempuan di Iran digambarkan sebagai sangat tidak memadai, dan hak-hak anak telah dilanggar dengan parah, dengan lebih banyak pelanggar anak dieksekusi di Iran daripada di negara lain mana pun di dunia. Aktivitas seksual antara sesama jenis adalah ilegal dan dapat dihukum sampai mati. Walaupun demikian, kepercayaan tinggi terhadap Khamaeni sebagai pimian tertinggi di Iran menciptakan rasa nasionalisme yang sangat tinggi dalam setiap sanubari mayoritas warga Iran. Kondisi tersebut menjadi kekuatan untuk menangkal permasalahan dalam negeri.

Secara nyata bentuk hubungan/kerjasama/ sinergi militer sipil dalam system pertahanan negara Iran terlihat dari keterlibatannya warga sipil yang tergabung dalam wajib militer. Bentuk Pelibatan Militer Dan Sipil Dalam Sistem Pertahanan Negara Iran, Terutama Ketika Dihadapkan Dengan Kemungkinan Datangnya Ancaman Dari Luar Negeri (Analisa SWOT) Berdasarkan data fakta yang ada, Iran adalah negara yang beragam, terdiri dari banyak kelompok etnis dan bahasa yang dipersatukan melalui kebangsaan Iran yang sama Populasi Iran tumbuh pesat selama paruh kedua abad ke-20, meningkat dari sekitar 19 juta pada tahun 1956 menjadi lebih dari 84 juta pada Juli 2020.¹⁸ Namun, tingkat kesuburan Iran telah turun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, turun dari tingkat kesuburan 6,5 per wanita menjadi kurang dari 2 hanya dalam dua dekade kemudian, menyebabkan tingkat pertumbuhan populasi sekitar 1,39% pada 2018. Karena populasinya yang masih muda, studi memproyeksikan bahwa pertumbuhan akan terus melambat sampai stabil di sekitar 105 juta pada tahun 2050.Iran menampung salah satu populasi pengungsi terbesar di dunia, dengan hampir satu juta pengungsi, kebanyakan dari Afghanistan dan Irak. Sejak 2006, pejabat Iran telah bekerja dengan UNHCR dan pejabat Afghanistan untuk pemulangan mereka. Menurut perkiraan, sekitar lima juta warga Iran telah beremigrasi ke negara lain, sebagian besar sejak Revolusi 1979. Menurut Konstitusi Iran, pemerintah diwajibkan untuk memberikan setiap warga negara akses ke jaminan sosial, yang mencakup pensiun, pengangguran, hari tua, kecacatan, kecelakaan, bencana, perawatan kesehatan dan medis serta layanan perawatan. Ini ditutupi oleh pendapatan pajak dan pendapatan yang diperoleh dari kontribusi publik.

Memahami data dan fakta diatas yang ada, penulis memiliki keinginan dan harapan para pembaca memahami bentuk pelibatan militer dan sipil dalam sistem pertahanan negara Iran, terutama ketika dihadapkan dengan kemungkinan datangnya ancaman dari luar negeri.

Analisis, berdasarkan data fakta diatas salahsatu ancaman nyata yang dihadapi pemerintah Iran adalah adanya imigran yang datang dari negara yang berbatasan dengan wilayah Iran.

Dihadapkan pada bentuk pelibatan militer dan sipil dalam sistem pertahanan negara Iran, terutama ketika dihadapkan dengan kemungkinan datangnya ancaman dari luar negeri, Iran memberlakukan wajib militer bagi warganya yang sudah mencapai usia 18 tahun. Selain itu, berdasarkan infomasi yang ada Iran memiliki sekitar 350.000 Pasukan Cadangan, dengan total sekitar 900.000 pasukan terlatih. Pasukan cadangan ini dikelola dari warga sipil salahsatu contohnya adalah kelompok mahasiswa. Kelompok mahasiswa aktif termasuk "Kantor untuk Memperkuat Persatuan" pro-reformasi dan "Persatuan Masyarakat Mahasiswa Islam". Kelompok yang umumnya mendukung Republik Islam antara lain Ansar-e Hizballah, Himpunan Mahasiswa Islam Iran, Mahasiswa Muslim Mengikuti Garis Imam, Mahasiswa Islam, dan Asosiasi Koalisi Islam. Basis kekuatan konservatif dikatakan terdiri dari "jaringan anggota milisi Basiji, keluarga para martir perang, beberapa anggota Pengawal Revolusi, beberapa pegawai pemerintah, beberapa anggota masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan, dan yayasan yang terkait dengan konservatif; kelompok oposisi termasuk Partai Gerakan Kebebasan Iran dan Bangsa Iran; kelompok politik bersenjata yang hampir sepenuhnya ditekan oleh pemerintah termasuk Organisasi Mujahidin-e Khalq (MEK), Fedayeen Rakyat, Partai Demokrat Kurdistan Iran; Masyarakat untuk Pertahanan Kebebasan. Sebagai warga negara Iran, kelompok-kelompok tersebut mampu memberikan kontribusi positif untuk mencegah ancaman dari luar negeri. Analisis SWOT Bentuk Pelibatan Militer Dan Sipil Dalam Sistem Pertahanan Negara Iran, Terutama Ketika Dihadapkan Dengan Kemungkinan Datangnya Ancaman Dari Luar Negeri digambarakan pada matriks SWOT dibawah ini :

Dari matriks analisa SWOT diatas dapat dianalisa kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah Iran mencakup kebijakan pemerintah untuk melaksanakan wajib militer bagi sipil yang sudah cukup layak (usia) dan dukungan angkatan bersenjata yang telah terorganisir dengan baik. Sedangkan kelemahan yang dihadapi yaitu kurangnya anggaran bersenjata Iran. Peluang yang dimiliki oleh pemerintah Iran yaitu perlunya pemanfaatan ilpengtek dalam pembangunan industri pertahanan dan keterlibatan dalam civic mission sehingga pencegahan konflik dengan negara lain dapat dihindari. Namun demikian disisi lain terdapat beberapa kendala yang mencakup luasnya wilayah Iran dan Banyaknya imigran gelap.



Pasukan Basij Iran

Penutup

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya sistem pertahanan Negara Iran merupakan sistem pertahanan yang mengedepankan pertahanan total. Bentuk hubungan/kerjasama/sinergi militer sipil dalam sistem pertahanan negara Iran ditunjukkan kebijakan wajib miter yang memberikan keuntungan dalam menggalang informasi terkait ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar.

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang disampaikan penulis adalah kebijakan pertahanan negara Iran berupaya untuk mengembangkan produksi/industri pertahanan dalam negeri menjadi catatan krusial, sehingga perlu dijadikan acuan agar pengelolaan BUMNIS untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara Iran yang lebih baik. Demikian essai ini dibuat semoga bermanfaat bagi kita semua.

Mayor Inf Albertinus Mariano adalah lulusan Seskoad 2021 (Dikreg LX), saat ini berdinas di Kostrad.

S.W O.T	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
- Pemanfaatan Ilpengtek dalam pembangunan industri pertahanan - Terlibat aktif dalam civic mission	- Kebijakan wajib militer - Dukungan Angkatan bersenjata	- Kurangnya Anggaran pertahanan
PELUANG (O)	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
- Pemanfaatan Ilpengtek dalam pembangunan industri pertahanan - Terlibat aktif dalam civic mission	Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
KENDALA (T)	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
- Luasnya wilayah Iran - Banyaknya imigran gelap	Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman



HUBUNGAN ANTAR MILITER DAN SIPIL DALAM MENEGAKKAN DEMOKRASI NEGARA MALAYSIA

Major Inf Syarbaini, S.Pd.

Pendahuluan

Malaysia adalah merupakan sebuah negara federal yang terdiri dari tiga belas negeri (negara bagian) dan tiga wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini mencapai 30.697.000 jiwa pada tahun 2015. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan Malaysia Barat dan Malaysia Timur oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Tiongkok Selatan.

Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara ini terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysia adalah seorang Raja atau seorang Sultan yang dipilih secara bergiliran setiap 5 tahun sekali, hanya negeri-negeri (negara bagian) yang diperintah oleh Raja/Sultan saja yang diperbolehkan mengirimkan wakilnya untuk menjadi Raja Malaysia. Raja Malaysia biasanya memakai gelar Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster.



Peta Wilayah Negara Malaysia

Malaysia sebagai negara federal tidak pernah ada sampai tahun 1963. Sebelumnya, sekumpulan koloni didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18, dan bagian barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Kumpulan wilayah jajahan itu dikenal sebagai Malaya Britania hingga pembubarannya pada 1946, ketika kumpulan itu disusun kembali sebagai Uni Malaya. Karena semakin meluasnya tentangan, kumpulan itu lagi-lagi disusun kembali sebagai Federasi Malaya pada tahun 1948 dan kemudian meraih kemerdekaan pada 31 Agustus 1957. Pada 16 September 1963 sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1514 dalam proses dekolonialisasi, Singapura, Sarawak, Borneo Utara atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Sabah berubah menjadi negara bagian dari federasi bentukan baru yang bernama Malaysia termasuk dengan Federasi Malaya.

Pada 9 Agustus 1965 Singapura kemudian dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi negara merdeka yang bernama Republik Singapura. Saat tahun-tahun awal pembentukan federasi baru terdapat pula tantangan dari Filipina dan konflik militer dengan Indonesia.

Bangsa Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi Malaysia. Terdapat pula Ras Tionghoa Malaysia dan India Malaysia yang cukup besar. Bahasa Melayu dan Islam masing-masing menjadi bahasa dan agama resmi negara. Malaysia adalah anggota perintis ASEAN dan turut serta di berbagai organisasi internasional, seperti PBB. Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia juga menjadi anggota Negara-Negara Persemakmuran.

Malaysia juga menjadi anggota D-8 (*Developing-8*), yakni sebuah kesepakatan untuk kerja sama pembangunan delapan negara anggotanya: Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Nama "Malaysia" diadopsi pada 1963 ketika Federasi Malaya bertambah Singapura, Sabah, dan Sarawak membentuk federasi bernama Malaysia. Tetapi nama itu sendiri pernah membingungkan ketika dipakai untuk merujuk wilayah-wilayah di Asia Tenggara. Sebuah peta yang diterbitkan pada 1914 di Chicago menampilkan nama Malaysia pada wilayah tertentu di Nusantara.

Politikus di Filipina pernah menghendaki penamaan negara mereka sebagai "Malaysia", tetapi Malaysia-lah yang pertama mengadopsi nama itu pada 1963 sebelum Filipina bertindak lebih jauh tentang masalah itu. Nama lain pernah dianjurkan untuk federasi 1963. Di antaranya adalah Langkasuka (Langkasuka adalah sebuah kerajaan kuno yang berada di bagian hulu Semenanjung Malaya pada milenium pertama masehi). Bahkan mundur lebih jauh lagi, seorang etnolog Inggris, George Samuel Windsor Earl, di dalam jilid IV Jurnal Kepulauan India dan Asia Timur pada 1850 mengusulkan untuk menamai kepulauan Indonesia sebagai Melayunesia atau Indunesia, kendati dia lebih menyukai yang terakhir. jatuhnya Melaka, tiga negara berjuang menguasai Selat Malaka: Portugis (di Melaka), Kesultanan Johor, dan Kesultanan Aceh.

Konflik ini berlangsung sampai tahun 1641, ketika Belanda (bersekutu dengan Kesultanan Johor) untuk merebut Melaka. Mendaratnya, pada 1948 dan diganti oleh Federasi Malaya, yang mengembalikan pemerintahan sendiri para pengusaha negeri-negeri Malaya di bawah perlindungan Britania.

Malaysia terdiri atas dua kawasan utama yang terpisah oleh Laut Tiongkok Selatan. Keduanya memiliki bentuk muka bumi yang hampir sama, yaitu dari pinggir laut yang landai hingga hutan lebat dan bukit tinggi. Puncak tertinggi di Malaysia (dan juga di Kalimantan) yaitu Gunung Kinabalu setinggi 4.095,2 meter di Sabah. Iklim lokal adalah khatulistiwa dan dicirikan oleh angin muson barat daya (April hingga Oktober) dan timur laut (Oktober hingga Februari).

Federasi Malaysia adalah sebuah monarki konstitusional. Kepala negara persekutuan Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong, biasa disebut Raja Malaysia. Yang di-Pertuan Agong dipilih dari dan oleh sembilan Sultan Negeri-Negeri Malaya, untuk menjabat selama lima tahun secara bergiliran; empat pemimpin negeri lainnya, yang bergelar Gubernur, tidak turut serta di dalam pemilihan. Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster, warisan Penguasa Kolonial Britania. Tetapi di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada legislatif, dan yudikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir, kekuasaan yudikatif itu dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian. Kekuasaan legislatur dibagi antara legislatur persekutuan dan legislatur negeri. Parlemen bikameral terdiri dari dewan rendah, Dewan Rakyat (mirip "Dewan Perwakilan Rakyat" di Indonesia) dan dewan tinggi, Senat atau Dewan Negara (mirip "Dewan Perwakilan Daerah" di Indonesia). 222 anggota Dewan Rakyat dipilih dari daerah pemilihan beranggota-tunggal yang diatur berdasarkan jumlah penduduk untuk masa jabatan terlama 5 tahun. 70 Senator bertugas untuk masa jabatan 3 tahun; 26 di antaranya dipilih oleh 13 majelis negara bagian (masing-

masing mengirimkan dua utusan), dua mewakili wilayah persekutuan Kuala Lumpur, masing-masing satu mewakili wilayah persekutuan Labuan dan Putrajaya, dan 40 diangkat oleh raja atas nasihat perdana menteri.



Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad.

Di samping Parlemen di tingkatan persekutuan, masing-masing negara bagian memiliki dewan legislatif unikameral (Dewan Undangan Negeri) yang para anggotanya dipilih dari daerah-daerah pemilihan beranggota-tunggal. Pemilihan umum parlemen dilakukan paling sedikit lima tahun sekali, dengan pemilihan umum terakhir pada Maret 2008. Pemilih terdaftar berusia 21 tahun ke atas dapat memberikan suaranya kepada calon anggota Dewan Rakyat dan calon anggota dewan legislatif negara bagian juga, di beberapa negara bagian. Voting tidak diwajibkan.

Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri; konstitusi Malaysia menetapkan bahwa perdana menteri haruslah anggota dewan rendah (Dewan Rakyat), yang direstui Yang di-Pertuan Agong dan mendapat dukungan mayoritas di dalam parlemen. Kabinet dipilih dari para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan bertanggung jawab kepada badan itu. Sedangkan kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Pemerintah negara bagian dipimpin oleh Menteri Besar di negeri-negeri Malaya atau Ketua Menteri di negara-negara yang tidak memelihara monarki lokal, yakni seorang anggota majelis negara bagian dari partai mayoritas di dalam Dewan Undangan Negeri.

Di tiap-tiap negara bagian yang memelihara monarki lokal, Menteri Besar haruslah seorang Suku Melayu Muslim, meskipun penguasa ini menjadi subjek kebijaksanaan para penguasa. Kekuasaan politik di Malaysia amat penting untuk memperjuangkan suatu isu dan hak. Oleh karena itu kekuasaan memainkan peranan yang amat penting dalam melakukan perubahan.

Negara Malaysia pada hakikatnya hubungan sipil-militer didefinisikan secara longgar sebagai interaksi dan hubungan timbal balik antara angkatan bersenjata dengan berbagai segmen dalam masyarakat dimana militer tersebut berperan dalam kehidupan negaranya. Andrew J. Rodhes dalam tulisannya "*Chilean Civil-Military Relations*" mengatakan hubungan sipil-militer adalah pemerintahan sipil sebagai agen masyarakat yang harus mengontrol militer sehingga pemahaman terhadap demokrasi harus lebih luas.

Sementara menurut Michael C. Desch, para analis politik yang mempelajari hubungan sipil-militer sering tidak mencapai kata sepakat mengenai kriteria apa yang harus digunakan untuk menandai apakah hubungan itu "baik" atau "buruk". Beberapa analis mengatakan bahwa hubungan sipil-militer yang baik akan ada jika militer berada dalam bidang profesionalnya secara ketat dan hubungan itu buruk manakala militer berada di luar bidangnya. Dalam kasus yang ekstrim, negara yang mengalami kudeta militer merebut kekuasaan secara langsung akan dikatakan bahwa negara itu memiliki hubungan sipil-militer terburuk. Analis lainnya menyarankan untuk melihat apakah sistem yang ada menghasilkan pilihan kebijakan yang masuk akal di bidang militer. Sehingga, cara terbaik untuk mengukur hubungan sipil militer adalah memeriksa bagaimana pemimpin sipil dan militer menangani perbedaan kebijakan antar mereka sendiri. Hubungan sipil-militer yang terbaik akan ditemukan di negara di mana otoritas sipil mampu memenangkan perselisihan kebijakan dengan militer tersebut. Berdasarkan urain di atas, penulis akan membahas mengenai Sinergi Peran Militer dan Sipil dalam sistem pertahanan di negara Malaysia.

Adapun metoda penulisan yang digunakan dalam esai ini adalah deskriptif analisis melalui pendekatan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan fakta yang relevan dengan persoalan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan. Adapun rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah sistem pertahanan negara di negara Malaysia 2) Bagaimanakah bentuk hubungan/kerjasama/sinergi militer sipil dalam sistem pertahanan negara Malaysia? 3) Bagaimanakah bentuk pelibatan militer dan sipil dalam sistem Pertahanan negara Malaysia, terutama ketika dihadapkan dengan kemungkinan datangnya ancaman dari luar negeri? 4) Jelaskan dengan teknik analisis SWOT (kekuatan/keunggulan, kelemahan/kekurangan peluang dan kendala) pelibatan militer dan sipil dalam sistem pertahanan negara tertentu.

Pembahasan

Sistem pertahanan negara malaysia

Kekuatan militer Malaysia tahun ini menempati peringkat 44 dari 138 negara dengan *power index* mencapai 0.6546 (dengan ukuran 0.0000 angka sempurna). Turun 3 peringkat dari tahun lalu yang berada di posisi 41. Hal tersebut berdasarkan sistem peringkingan kekuatan militer dunia yang dikeluarkan oleh *Global Fire Power*. Kekuatan militer Malaysia terdiri dari 410.000 personel militer dengan total 12.587.121 populasi yang layak untuk wajib militer. Total kekuatan militer angkatan udara Malaysia mencapai 170, dengan 26 pesawat tempur, 13 pesawat serbu, 18 pengangkut, 40 pesawat tempur latih, 4 pesawat untuk misi khusus, dan 65 helicopter. Sedangkan untuk angkatan darat, Malaysia memiliki 74 tank, 1.387 kendaraan tempur lapis baja, 211 artileri dan 54 proyektor roket. Angkatan laut Malaysia memiliki 61 aset diantaranya ialah 6 fregat, 6 korvet, 2 kapal selam, 41 kapal patrol, dan 4 kapal ranjau. Dilansir dari beberapa artikel Asian military Review, selain mengimpor, Dilansir dari Defense White Paper, Pemerintah Malaysia memiliki rencana jangka panjang untuk membangun kekuatan militer di masa

mendatang, prioritas kebutuhan kapabilitas tersebut akan terfokus pada Memperkuat intelijen; membangun kapabilitas *Cyber Electromagnetic Activities (CEMA)*; perkuat kapabilitas *Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR)*; membangun operasi *network-centric (NCO)*. Selanjutnya membangun komunikasi satelit untuk memperkuat kapabilitas komando dan kontrol gabungan. Menopang dan memperkuat kapabilitas dan tempo operasional pasukan khusus; memperkuat kekuatan dan ketahanan maritime (domain maritim). Lalu, memperkuat kapabilitas pertahanan dan serangan udara (domain udara); perkuat kapabilitas daya tembak, mobilitas, komunikasi, dan logistik membangun kapabilitas pasukan amfibi.

Bentuk Hubungan/Kerjasama/Sinergi militer sipil dalam system pertahanan negara

Pemerintah Malaysia juga berupaya mengembangkan alutsista buatan dalam negeri, seperti OPV1800 Kota-Bharu yang akan digunakan sebagai kapal patroli di Zona Ekonomi Eksklusif. Kapal ini dirancang perusahaan domestik Malaysia THHE-Destini yang dibantu oleh perusahaan Dalmen dari Belanda. Dikabarkan kapal ini akan dikirimkan ke Agensi Penguasaan Maritim Malaysia. Kementerian Pertahanan Malaysia juga sedang berupaya menyeleksi kendaraan operasi khusus untuk mendukung kekuatan pasukan khusus mereka "Grup Gerak Khas" (GGK). Kendaraan operasi khusus yang terpilih tersebut diantaranya ialah kendaraan tempur baja mobilitas-tinggi "Lipan Bara 4x4" Selain itu juga ada SOV Kembara Suci dengan berat 3.200 kg dan total muatan 1.500 kg serta Weststar GK-M1 yang memiliki berat 3.300 kg dan total muatan 760 kg. Terakhir, Nimr RIV yang memiliki muatan 1500 kg dengan berat 3.200 kg. kendaraan tempur ini mampu menampung empat kru dengan memiliki rentang jelajah maksimum 1000 km dan kecepatan 120 km/h. Malaysia juga berencana untuk menambah jumlah 2 kapal selam jenis Scorpene buatan Prancis. Kapal Selam ini juga sebelumnya sempat dibeli pada tahun 2009.

Anggaran Malaysia untuk tahun 2020 masih belum ditentukan, tetapi dilansir dari the Star, Menteri Pertahanan Muhammad Sabu mengatakan bahwa ia telah mengajukan anggaran paling tidak senilai 1 persen dari PDB Malaysia. Namun analis keamanan Zachary Abuza, professor di National War College Washington, mengatakan bahwa pengeluaran pertahanan Malaysia diprediksi akan turun tajam dari 3.87 miliar dolar AS di tahun 2019 ke 3.4 miliar dolar di tahun 2021.

Berbeda dengan di Indonesia, di Negara Malaysia belum ada lembaga khusus yang menyelenggarakan pendidikan leadership untuk militer di Malaysia. Ini dikarenakan mungkin berbeda struktur politik. Jadi militer di Malaysia perannya hanya militer. Tapi di Indonesia ada *leadership* di dalam pemerintahan. Malaysia tidak ada *mix* atau pencampuran sipil dan militer, seperti ya militer profesional militer, tidak bisa keluar militer langsung jadi bupati atau walikota.

Semenjak tahun 1957 hingga 2010, Malaysia telah membangunkan dasar dan angkatan pertahanan. Sejajar dengan kepentingan bagi sebuah negara dalam menjaga dan melindungi keselamatan, Malaysia telah membangunkan DPN (Dasar Pertahanan Negara) dan memodenkan angkatan pertahanan semenjak tahun 1990. Kerajaan Malaysia juga turut menawarkan mengenai kemampuan dan keupayaan ATM (Angkatan Tentera Malaysia) untuk menjaga kedaulatan dan keselamatan negara. Walau bagaimanapun, DPN mengenai pertahanan yang dibentuk telah menimbulkan persoalan, iaitu sejauh mana kemampuan DPN dapat diamalkan. Ini kerana terdapat pelbagai masalah dan isu yang membabitkan pertahanan dan keselamatan, seperti serangan pengganas, keyakinan rakyat terhadap kemampuan ATM, dan sebagainya. Justeru, kertas ini menganalisis adakah DPN yang diamalkan oleh negara Malaysia itu kukuh atau tidak. Akhir sekali, sebuah negara yang hidup dalam sistem antarabangsa yang bersifat anarki, perlu menjadikan aspek pertahanan dan keselamatan sebagai *self-reliance*, kerana pergantungan kepada aktor bukan negara bukan satu jaminan.

Dapatkan penyelidikan juga mencadangkan bahawa DPN yang diamalkan oleh Malaysia perlu mengambilkira konsep pertahanan yang lebih komprehensif, kerana konsep ancaman sentiasa berkembang yang bukan hanya aspek ancaman tradisional saja, sebaliknya aspek bukan tradisional. Dengan kelemahan dan permasalahan ini, ia menunjukkan bahawa DPN di Malaysia adalah masih lemah.

Bentuk pelibatan militer dan sipil dalam sistem Pertahanan negara Malaysia.

Militer sebagai kata sifat menunjuk pada sesuatu yang terkait dengan kekuatan bersenjata (*armed forces*) atau berkaitan dengan peperangan. Sebagai kata benda, militer adalah kekuatan bersenjata. Jadi militer adalah organ yang di dalamnya meliputi penggunaan senjata.

Dalam konteks kenegaraan militer adalah organ yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pertahanan dan peperangan. Menurut teori yang disampaikan Locke mengemukakan bahwa kekuasaan untuk membuat perdamaian dan perang, membentuk liga dan aliansi merupakan wilayah kekuasaan federatif berdasarkan arahan kekuasaan legislatif untuk mempertahankan komunitas dan anggotanya. Perkembangan organisasi negara di masa modern mengarah menjadi semakin terdistribusi ke banyak organ. Berbagai lembaga dibentuk dengan kewenangan khusus di suatu masalah namun meliputi aspek-aspek kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Perkembangan ide konstitusionalisme atau pembatasan kekuasaan juga mengarah pada adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independent. Independensi ini untuk menjaga agar fungsi suatu organisasi tidak disalahgunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Militer misalnya, karena memiliki otoritas memegang senjata, dapat digunakan untuk menumpang aspirasi prodemokrasi. Maka militer merupakan salah satu organisasi yang pengaturannya mengarah lebih independen.

Bagi Negara Malaysia keselamatan negara dapat dikatakan stabil diperingkat negara maupun rantau Asia, walau bagaimanapun,

sistem pertahanan Malaysia dinaungi oleh (ATM) itu sendiri perlu bersedia untuk menghadapi ancaman – ancaman baru seperti bencana alam, wabak penyakit, jenayah rentas, kegiatan pengganas dan pemisah. Dengan adanya Industri pertahanan yang maju melalui usaha pemerolehan dan pembuatan aset persenjataan yang moden membolehkan ancaman ini dapat dikurangkan. Bagi Malaysia untuk mencapai matlamat keselamatan negara, kerajaan telah memastikan pembangunan industri pertahanan negara berkembang dengan beberapa sektor diberi perhatian iaitu sektor aeroangkasa, sektor maritim, automotif, persenjataan, teknologi maklumat dan komunikasi, industri peralatan gunasama, pameran pertahanan antarabangsa dan penyelidikan. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Malaysia komitmen dalam membangunkan IP negara yang berstrategik bagi menjaga keselamatan negara. Selain itu juga pemerolehan aset – aset pertahanan seperti Kapal Selam kelas perdana menteri.

Konsep keselamatan negara Malaysia telah dibincangkan dan dinyatakan dalam Dasar Pertahanan Negara yang mengambil enam prinsip utama 6 yaitu, Berdikari (*self-reliance*), Pertahanan menyeluruh (HANRUH), Komitmen Terhadap Peraturan Pertahanan Lima Negara (FPDA). Sokongan kepada usaha PBB ke arah keamanan sejagat, Langkah-langkah terhadap keganasan dan Diplomasi pertahanan. Selain itu juga salah satu komponen dalam DPN ataupun strategi pertahanan adalah dengan membangunkan industri pertahanan yang kukuh. Industri pertahanan negara dapat membantu Malaysia terus berusaha ke arah meningkat dan membangunkan keupayaan ATM. Pembangunan industri pertahanan negara penting dalam menangani segala ancaman dari luar dan dalam negara melalui permodelan peralatan pertahanan dan juga keupayaan ketenteraan, Ini menunjukkan perlaksanaan industri pertahanan tempatan telah mula bersiap sedia untuk terus komited dalam membangunkan aset – aset pertahanan dalam meningkatkan tahap pertahanan negara dan pada masa yang sama menjadi angkatan yang disegani dan kredibel di rantau Asia ini.

Pelibatan militer dan sipil dalam sistem pertahanan negara teknik analisis SWOT

Berdasarkan penjabaran di atas, analisa SWOT yang dapat dilakukan dalam hubungan Militer Malaysia dengan Sipil adalah sebagai berikut: a. *Strength*: kekuatan hubungan Militer dan Sipil negara malaysia adalah Angkatan bersenjata dari negara Malaysia yang tunduk pada kontrol sipil yang dilakukan oleh dipertuan agung b. *Weakness*: Angkatan bersenjata tidak dapat mengikuti perkembangan politik negaranya karena dibatasi c. *Opportunity*: Pemerintahan tidak ada campur tangan militer sehingga kecil peluang kekuasaan diambil militer d. *Threats*: Kekuasaan lebih leluasa sehingga kebijakan yang diambil kurang strategis dari sisi pertahanan

Penutup

Sejak dengan kepentingan bagi sebuah negara dalam menjaga dan melindungi keselamatan, Malaysia telah membangunkan DPN (Dasar Pertahanan Negara) dan memodernkan angkatan pertahanan semenjak tahun 1990. Kerajaan Malaysia juga turut menwar-warkan mengenai kemampuan dan keupayaan ATM (Angkatan Tentera Malaysia) untuk menjaga kedaulatan dan keselamatan negara. Walau bagaimanapun, DPN mengenai pertahanan yang dibentuk telah menimbulkan persoalan, yaitu sejauh mana kemampuan DPN dapat diamalkan.. Sebuah negara yang hidup dalam sistem antara bangsa yang bersifat anarki, perlu menjadikan aspek pertahanan dan keselamatan sebagai *self-reliance*, kerana pergantungan kepada aktor bukan negara bukan satu jaminan. DPN yang diamalkan oleh Malaysia perlu mengambil konsep pertahanan yang lebih komprehensif, kerana konsep ancaman sentiasa berkembang yang bukan hanya menjurus aspek ancaman tradisional saja, sebaliknya lebih kepada aspek bukan tradisional.

Mayor Inf Syarbaini, S.Pd. Adalah Abituren Semapa PK 2004 lulusan Seskoad TA 2021, saat ini menjabat sebagai Kabagdik Rindam I/BB



STRATEGI NEGARA ETHIOPIA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID – 19

Major CPN Thoufiq Hidayat, S.E.

© Balderas/NAMA

Abstrak

Artikel ini dibuat guna menjelaskan upaya Negara Ethiopia dalam menghadapi Pandemi Covid 19 dalam memulihkan perekonomian. Ini dimulai dengan uraian singkat tentang negara Ethiopia awal terjadinya covid sampai dengan Kebijakan Strategis dalam penanganan Pandemi Covid 19. Diungkapkan juga peranan Negara Ethiopia dalam menangani Pandemi Covid 19 sehingga tidak mempengaruhi Aspek Kehidupan lainnya.

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 membuat roda ekonomi di seluruh negara berdenyut lemah, tidak mengenal skala power yang melekat padanya, baik besar, menengah, ataupun kecil. Saat ini dunia tengah berhadapan dengan ancaman musuh yang sama dan tidak kasat mata, sehingga membuat protokol kesehatan pun harus diterapkan di setiap tempat, guna menciptakan ketahanan negara yang mapan, terutama ditujukan untuk melindungi warga negara yang merupakan salah satu elemen kekuatan yang signifikan. Banyak analisis yang mengemuka terkait dengan terjadinya pandemi Covid-19 ini, dimulai dari telaah bidang kesehatan, bahwa jenis penyakit

menular yang menyerang sistem pernapasan manusia ini bukanlah sebuah penyakit baru, namun berasal dari virus corona yang telah bermutasi dan menjadikan sifatnya semakin ganas dengan penularan yang cepat, sehingga dalam kurun waktu 1 tahun, puluhan juta orang terkonfirmasi positif di seluruh dunia dan sekitar 2,8% meninggal dunia terutama ketika mengenai manusia yang telah memiliki penyakit bawaan. Wabah virus Covid-19 telah ditetapkan sebagai pandemi oleh *World Health Organization (WHO)*. Dirjen WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, penetapan ini dilakukan mengingat tingkat penyebaran dan keparahan yang menghawatirkan dari virus Covid-19. Namun hal yang lebih penting untuk diperhatikan, bahwa isu pandemi penyakit juga memberikan dampak terhadap aspek lainnya. Hingga saat ini belum ada negara yang mampu mengatasinya, sehingga jumlah terkonfirmasi dari waktu ke waktu masih terjadi penambahan. Penulis tertarik meneliti tentang strategi Negara Ethiopia dalam mengatasi Pandemi Covid-19.

Krisis Covid-19 ini mengingatkan pentingnya diplomasi kesehatan dalam kebijakan luar negeri, karena memiliki potensi besar dalam meredam kepanikan. Pemerintah dari berbagai negara telah menyadari pentingnya diplomasi

kesehatan, misalnya dengan deklarasi bersama Oslo 2007 antara perdana menteri dari Indonesia, Thailand, Afrika Selatan, Brazil, Senegal, Prancis, dan Norwegia. Kebijakan luar negeri yang impulsif seperti larangan bepergian, dan penghentian aktivitas ekonomi tidak memiliki landasan keilmuan, dan justru merugikan dalam jangka panjang. Perlunya diplomasi persuasif sehingga muncul kepercayaan, dan kerjasama dalam diseminasi data dan fakta keilmuan yang gratis serta sistem manajemen informasi *real time* terbukti lebih efektif dalam menghadapi masalah bersama. Negara asal wabah sebaiknya tidak distigmatisasi sehingga merasa percaya diri untuk lebih transparan dalam sharing informasi. Negara yang mampu memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung mekanisme yang membantu negara lain mengatasi ancaman kesehatan (The Reporter 2020). Belajar dari pengalaman di kawasan lain di Asia Tenggara dan Amerika Latin dalam berbagai tingkat regionalisme melalui diplomasi kesehatan, hal yang sama juga muncul di Afrika dengan bentuknya yang unik. Transformasi regionalisme karena diplomasi kesehatan yang juga muncul di Afrika tersebut, turut memperkuat kemampuan Ethiopia dalam menghadapi epidemi Covid-19.

Pentingnya penulisan esai ini adalah untuk mengetahui upaya negara Ethiopia dalam menangani Pandemi covid 19 serta mengetahui sejarah perang Republik Irlandia . Dengan harapan bahwa upaya Ethiopia menangani Pandemi Covid 19 dapat menjadi contoh atau manfaat bagi negara lain agar lebih baik penanganannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analistik dan studi kepustakaan.

Nilai guna tulisan ini adalah agar dapat digunakan dalam menilai langkah-langkah strategis yang dilakukan negara Ethiopia dalam menangani pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi sektor-sektor lain seperti ekonomi, politik, budaya dan pertahanan keamanan. Tujuan penelitian ini sebagai saran, masukan serta bahan pertimbangan komando atas. Ruang lingkup meliputi pendahuluan, pembahasan dan penutup, dengan

pembatasan hanya pada Strategi Negara Ethiopia dalam menangani Pandemi Covid 19.

Merujuk dari latar belakang diatas, maka dapat di identifikasi parameter Langkah Strategi Negara Ethiopia dalam mengatasi Pandemi Covid-19 dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana kondisi Pandemi Covid-19 di negara Ethiopia? Apa hambatan atau dampak Negara Ethiopia dalam mengatasi pandemi Covid-19 terhadap Aspek kehidupan? Bagaimana Strategi negara Ethiopia dalam menangani Pandemi Covid-19? Permasalahan tersebut diatas akan penulis jelaskan pada Bab pembahasan.

PEMBAHASAN

Penyebaran virus Covid-19 sejak teridentifikasinya kasus pertama di Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 telah merebak hampir keseluruhan negara di dunia dan tidak terhindari pada Negara Ethiopia terkena imbas dari penyebaran virus Corona. Permasalahan tersebut menjadi alasan negara Ethiopia menerapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi Pandemi Covid-19 untuk kesehatan masyarakatnya dan menjaga stabilitas segala aspek kehidupan. Sama halnya dengan Negara benua Afrika khususnya Ethiopia.

Kondisi Negara Ethiopia dalam menghadapi Pandemi Covid-19

Ethiopia adalah sebuah negara yang terletak di benua Afrika, tepatnya di Afrika Timur. Ethiopia yang merupakan salah satu negara tertua di dunia ini tidak pernah dijajah oleh negara Eropa selama masa perebutan wilayah Afrika yang terjadi di antara tahun 1880 hingga tahun 19141. Jumlah penduduk Etiopia adalah sebanyak 105.350.020 jiwa. Sama dengan negara lain Ethiopia tidak lepas dari Pandemi covid-19 Negara Ethiopia data terpapar sebanyak 186.000 orang, Pasien Sembuh 146.000 orang, meninggal 2647 orang, Menurut data WHO Negara Ethiopia mendapat peringkat 161 dunia pada Negara dunia yang mengalami dampak Pandemi Covid-192. Kasus positif pertama di Negara Ethiopia muncul tanggal 13 Maret 2020.



Peta Wilayah Negara Ethiopia

Meskipun kasus positif muncul akan tetapi pemerintah sejak awal telah menerapkan langkah-langkah kewaspadaan sejak bulan Februari 2020. Para petugas di Bandara Internasional Addis Ababa dengan menerapkan *screening* secara ketat terhadap para penumpang yang datang. Kementerian Kesehatan Negara Ethiopia bekerja sama dengan pemerintah daerah juga melakukan upaya *screening* dari rumah ke rumah, dan tes diagnosa.

Hambatan atau dampak Negara Ethiopia dalam mengatasi Pandemi covid-19.

Upaya pemerintah Negara Ethiopia dalam mengatasi pandemi bukannya tanpa hambatan. dari dalam negeri. Adapun dampak pandemi Covid 19 berpengaruh terhadap beberapa Aspek lainnya: Pertama, Aspek ekonomi, pada aspek ini banyak permasalahan akibat pandemi Covid-19 yakni pada menurunnya daya beli masyarakat karena harus mengikuti petunjuk pemerintah mengenai keadaan darurat kesehatan, selain pemerintah menyediakan keperluan untuk rakyatnya tentunya mengurangi anggaran negara. Kedua, Aspek Stabilitas Politik, dengan adanya pengumuman dari Presiden Adiy oposisi mengkritisi langkah yang dilakukan pemerintah misalnya penundaan pemilu dan keputusan senat untuk memberikan kesempatan kepada Abiy memerintah lebih panjang dibanding periode sesuai konstitusi.

Oposisi juga menuduh Abiy menggunakan kesempatan Covid-19 ini untuk terus mempertahankan Status quo, apalagi dengan menerapkan status darurat. Bekas ketegangan komunal atau gerakan etnonasionalisme Oromo yang sempat muncul dipermukaan tahun 2019 masih menyisakan permasalahan di tahun 2020 (*Ipotnews* 2020). Ketiga, Aspek pengadaan APD dan Vaksin, tentunya karena menurunnya perekonomian Negara Ethiopia maka perlu segera dilakukan beberapa langkah-langkah penting dalam mengatasi pandemi Covid-19 yaitu; Pengadaan APD dan Vaksin. Pemerintah Negara Ethiopia mempunyai kendala dalam aspek anggaran sehingga perlu persetujuan legislatif untuk meminjam Dana dari Negara Eropa atau PBB. Dampak eksternal permasalahan internasional lain muncul ketika Saudi Arabia dan kemudian diikuti negara-negara lain mendeporasi migran dari Ethiopia, sehingga menuntut pemerintah Ethiopia untuk merapatkan barisan termasuk menerapkan diplomasi kesehatan yang tepat. Pasukan Houthi di Yaman pun turut mengusir para migran tersebut

Kondisi migran Ethiopia menjadi lebih rentan karena situasi perang di Yaman masih berlangsung setelah Saudi Arabia menginvansi negaranya tersebut (*UN News* 2020). Permasalahan pengusiran migran tersebut menunjukkan betapa rentannya para migran baik dalam kondisi normal maupun krisis. Antara 1 April hingga beberapa bulan berikutnya, Ethiopia menerima puluhan ribu kepulangan migran dari Somalia, Djibouti, Sudan, Saudi Arabia, Kuwait, Kenya, Lebanon dan lainnya³. Negara tetangganya khawatir keberadaan para migran ini dapat meningkatkan risiko penularan Covid-19 sehingga memulangkan mereka. Saat mereka sampai di tempat transit di Yaman, pasukan Houthi mengusir mereka karena ketakutan yang sama. Karantina di negara-negara tersebut kurang terjamin kebersihannya dan padat sehingga rawan penularan. Pemulangan migran dari Saudi Arabia, misalnya, dilakukan melalui pesawat untuk mengangkut ternak. Sesampainya di Addis Ababa, para migran tersebut tinggal sementara di tempat karantina

seperti kampus dan gedung sekolah (*Financial Times* 2020). Dengan kondisi tersebut, setidaknya sebanyak 927 migran positif Covid sepulangnya ke Ethiopia.

Strategi Negara Ethiopia dalam mengatasi Pandemi Covid-19

Pemerintah Ethiopia menerapkan beberapa langkah strategi penanganan darurat pandemi Covid-19: **Pertama**, menerapkan upaya-upaya pencegahan saat berita wabah di Wuhan mulai tersebar secara internasional pada awal tahun dengan mengeluarkan kebijakan yang dianggap penting dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Kedua, meningkatkan upaya-upaya pencegahan secara lebih luas pada pertengahan Maret 2020, ketika kasus positif mulai muncul. Pemerintah menutup akses daratnya, menutup sekolah, membebaskan tahanan untuk mengurangi kepadatan penjara, melakukan penyemprotan disinfektan diberbagai fasilitas publik dan mencegah kerumunan. Meskipun berat, akan tetapi pemerintah mengusahakan meningkatkan jumlah rapid test hingga 5 ribu tes per hari sampai pada bulan Mei 2020. Pemerintah Ethiopia dari tiap lini berupaya meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat melalui pengumuman tiap hari kepada masyarakat. BUMN Telekomunikasi Ethiopia menggunakan sarana komunikasi Handphone dengan pesan elektronik untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya standar kesehatan seperti cuci tangan, pembatasan sosial, dan penggunaan masker. Ada yang menarik yaitu, Aba Tilahum Woldemichael menjadi salah satu contoh kisah sukses sigapnya penangan Covid di Ethiopia. Kakek yang oleh tim medis diestimasikan mengalami karantina selama 14 hari dirumah Yeka Kotobe. Aba menjalani karantina setelah ketahuan positif saat menjalani rapid test meskipun saat itu yang bersangkutan belum menunjukkan gejala. Empat hari setelah tes, kondisi yang bersangkutan mengalami penurunan ketahanan, fisik memburuk, dan sempat bernafas dari selang oksigen (BBC 2020)

Ketiga, menerapkan protokol kesehatan darurat bencana, pada hari Rabu tanggal 8 April 2020, Perdana menteri Abiy Ahmed mengumumkan kondisi darurat berdasarkan pasal 93 UUD. Darurat Bencana tersebut berlaku selama lima bulan. Pihak yang melanggar protokol darurat tersebut mendapat ancaman sanksi hingga tiga tahun penjara (*The jakarta Post* 2020) pada bulan Maret, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pemilu yang dijadwalkan bulan Agustus hingga waktu yang tidak ditentukan. Tiga bulan kemudian, senat menetapkan PM Abiy Ahmad terus memerintah hingga melampaui periodenya yaitu bulan Oktober (*ipotnews* 2020). Pemerintah mengubah fungsi Asrama Universitas sekitar 15 ribu tempat tidur sehingga kapasitas total menjadi 75 ribu tempat tidur yang berfungsi sebagai tempat karantina. Pemerintah juga menyiapkan tempat pengobatan dengan kapasitas 5 ribu tempat tidur. Para tenaga medis yang menangani pasien Covid -19 juga mendapatkan perlindungan asuransi jiwa (*world Economic Forum* 2020). Bersamaan dengan kondisi darurat tersebut, Perdana Menteri menyiapkan dana darurat USD 1,64 miliar untuk distribusi makanan, kesehatan bila skenario terburuk terjadi, tempat penampungan sementara, dan keperluan terkait lainnya untuk masyarakat rentan termasuk untuk pengungsi. Dana ini banyak disalurkan lewat Woreda (semacam Kabupaten) dan sejumlah Kota (Sumber: UNDCF 2020). Respon cepat pemerintah Ethiopia dalam menghadapi Covid-19. Begitu kasus pertama terdeteksi pada pertengahan Maret, pemerintah segera menutup sekolah kecuali pada tingkat tertentu, membatalkan acara publik, membatasi acara publik yang berdampak pada kerumunan massa, melakukan kampanye publik yang terkoordinasi, dan mengontrol perjalanan internasional melalui screening. Bandara internasional di Addis Ababa merupakan bandara yang paling besar di Afrika. Selang beberapa hari, langkah tersebut juga segera diikuti dengan karantina dari kedatangan internasional dari negara yang berisiko tinggi.



Perdana menteri Ethiopia Abiy Ahmed

Pemerintah menutup sebagian kantor pemerintah, dan menutup semua sekolah dari berbagai tingkat. Akhir Maret, pemerintah menghentikan beberapa transportasi publik. Awal April, pemerintah menerapkan kondisi darurat negara, menyarankan warga untuk tetap di rumah, menyarankan warga menghindari transportasi publik, membatasi kerumunan lebih dari 10 orang.

Keempat, tetap mendorong aktivitas produksi dan ekonomi lainnya untuk terus berlangsung selama krisis, sehingga meringankan tekanan ekonomi bagi kelompok sosial yang rentan terutama dari sektor informal. Pemerintah memberikan paket kesejahteraan ekonomi dengan prinsip bagi biaya dan risiko misalnya melalui protokol tripartit antara pemerintah, konfederasi bisnis, organisasi buruh, untuk mencegah PHK selama krisis berlangsung. Untuk meningkatkan jaminan kesejahteraan pekerja, pemerintah menghapus pajak pendapatan selama empat bulan bagi perusahaan yang tetap menggaji karyawannya meskipun tidak bisa beroperasi. Kebijakan dalam hal keringanan pajak terlihat misalnya pada bulan April dewan menteri menyepakati untuk mengampuni pajak hutang sebelum 2014/2015, amnesti pajak bunga dan pajak hutang tahun 2015 hingga 2019.

Pemerintah Ethiopia memberikan subsidi dengan membebaskan biaya angkut barang kereta api dan meringankan biaya logistik bagi para eksportir. Upaya-upaya tersebut dilakukan sebagai respon kondisi perdagangan internasional yang cukup sulit ketika sebagian besar negara menutup perbatasan.

Permintaan kopi, oilseed, menurun drastis. Bank pusat menyediakan dana tambahan sebesar USD 450 juta untuk bank swasta untuk memfasilitasi restrukturisasi kredit sehingga bisa mencegah kebangkrutan.

Perlunya kebijakan luar negeri. Ethiopia sadar betapa pentingnya diplomasi kesehatan dalam menghadapi Covid. Sebagai negara partner Tiongkok, dua negara ini lewat Menteri Luar Negeri Ethiopia Gedu Andargachew dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi melakukan sambungan telepon. *Hot Line diplomacy* tersebut bagi Beijing menjadi upaya untuk menghangatkan hubungan government to government setelah ada insiden Guang Zhou yang berdampak pada reaksi negatif dari masyarakat Afrika.

Ethiopia pun mendapatkan dukungan politik dari Tiongkok bagi Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yang berasal dari Ethiopia setelah yang bersangkutan mendapat kritikan keras dari Washington (*The Africa Report* 2020). Tiongkok memiliki kepentingan jangka panjang dalam hal sumber daya mineral dan gas. Ethiopia mendapatkan salah satunya, fasilitas kesehatan penting seperti ekspansi Rumah Sakit Tirunesh Beijing (*The Diplomat* 2020).



Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yang berasal dari Ethiopia

Pada bulan April, Tiongkok mengirim tim medis yang terdiri dari 12 pakar dengan pengalaman epidemi dari Rumah Sakit Universitas Sichuan, Pusat Pencegahan dan Pengawasan Penyakit Provinsi Sichuan, Rumah Sakit Rakyat Provinsi Sichuan, Rumah Sakit yang berafiliasi dengan Universitas Medis Barat Daya, dan Rumah Sakit yang berafiliasi dengan Universitas Chengdu dengan kepakaran Obat Tradisional Cina.

Pakar tersebut berbagi pengalaman dengan lembaga kesehatan seperti Africa CDC, Menteri Kesehatan Ethiopia, dan Institut Kesehatan Masyarakat Ethiopia. Salah seorang tim bernama Zeng memperhatikan bahwa pemerintah Ethiopia mengerti bahayanya virus dan telah menerapkan standar kesehatan WHO. Zeng menambahkan, langkah yang telah dilakukan di Ethiopia melebihi ekspektasinya, meskipun Ethiopia minim sumber daya dan masih memiliki beberapa kekurangan.

Diplomasi Kesehatan. Upaya pemerintah dalam menghadapi Repatriasi besar-besaran. Ethiopia mengupayakan diplomasi kesehatan kepada negara-negara tetangganya supaya jalannya proses repatriasi tidak membuat Ethiopia kewalahan. Kepala Delegasi Ethiopia untuk *International Organization for Migration (IOM)* menyatakan bahwa dalam pengelolaan repatriasi di tengah Covid, perlu ada diskusi antar pemerintah untuk mencapai kesepakatan mengenai pendekatan bersama dalam mengatasi Covid-19 (*The New York Times* 2020).

Badan dunia menunjuk *International Organization for Migration* untuk bekerja sama dengan pemerintah Ethiopia dalam memfasilitasi tempat karantina di Addis Ababa dan kawasan sekitar (*OCHA Services reliefweb* 2020). Staf PBB juga turut membantu diplomasi Ethiopia supaya Saudi Arabia dan negara-negara tetangganya bersedia melaksanakan proses deportasi yang humanis.



Tenaga Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 di Ethiopia

Kolaborasi fungsional tersebut dilakukan lewat jaringan pantau laboratorium di kawasan yang terintegrasi bernama *Africa CDC Regional Integrated Surveillance Laboratory Network (RISLNET)* di Zambia, Kenya, Gabon, Nigeria dan Senegal. Kolaborasi tersebut berfungsi untuk perencanaan, siap siaga pandemi, dan kesigapan penanggulangannya. Kolaborasi fungsional dengan tingkat global dilakukan lewat jaringan bernama *Africa CDC Anti-Microbial Resistance and Surveillance Network (Africa CDC AMRSNET)* yang terhubung dengan program GLASS WHO. Kolaborasi tersebut berfungsi diantaranya untuk mendapatkan data informasi yang berkualitas dan pemberian bantuan teknis (Amukele 2017).

KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Upaya bersama kawasan dalam integrasi regional uni afrika melalui *Africa CDC (Africa Centre for Disease Control and Prevention)* bekerjasama dengan *WHO (World Health Organization)* membawa hasil diantaranya adanya bantuan peralatan tes dari Jerman yang disalurkan lewat Africa CDC yang diperuntukkan bagi Ethiopia sebagai salah satu anggota aktifnya. Kedua, Koordinasi dan Kerjasama fungsional dan transformasi dimana pola interaksi antara Lembaga regional dengan dengan global pada saat menghadapi Pandemi Covid 19.

Pemerintah Ethiopia menerapkan standar yang berbeda dibanding negara tetangganya seperti Rwanda, Uganda dan Mauritius yang lebih memilih menerapkan *lockdown*. (*The Jakarta Post*, 2020). Ethiopia berhasil menekan kasus positif di negaranya dilihat dari kecilnya rasio kematian. Tercatat hingga akhir Juni 2020, sebanyak 103 pasien Covid-19 meninggal dari 5846 yang positif (*OCHA Services reliefweb* 2020). Hal tersebut berarti rasio kematian cukup rendah yaitu 1,7 persen dibanding dengan rasio kematian secara global yaitu 4,9 persen (WHO 2020).

Mayor CPN Thoufiq Hidayat, S.E. adalah lulusan Seskoad TA 2021 (Dikreg LX), saat ini berdinias di kodam IX Udayana.



UPAYA KANADA DALAM PENANGGULANGAN CORONA VIRUS

Major Kav Wihardjoko

Pendahuluan

Kanada, dengan nama asli *Dominion of Canada*, merupakan negara paling utara di Kawasan Amerika Utara. Kerajaan (monarki konstitusional) ini terbagi dalam 10 provinsi dan 3 teritori, dengan menganut sistem desentralisasi. Kanada berdiri pada tahun 1867, setelah disahkannya undang-undang Konfederasi. Ottawa menjadi ibukota negara ini. Kantor Gubernur Jenderal, Perdana Menteri, serta parlemen nasional terletak di kota tersebut. Kanada pernah menjadi jajahan Prancis; yang kemudian direbut oleh Inggris, hingga hari kemerdekaannya. Kini, negara ini menjadi anggota *La Francophonie*, sekaligus negara Persemakmuran Inggris. Luas Kanada mencapai 9.970.610 km². Negara ini tergolong negara maju, yang perekonomiannya bergantung pada hasil alam. Kanada merupakan monarki konstitusional, dengan pemerintahan yang berbentuk demokrasi parlementer federal. Ratu Elizabeth II menjadi kepala negara. Kanada menjadi salah satu negara dengan keragaman etnis dan multicultural yang paling beragam di dunia. Imigran di negara ini tergolong besar, jika dibandingkan negara lainnya.

Selain itu, perekonomian Kanada menjadi terbesar kesepuluh di dunia. Sumber daya alam (yang berlimpah), dan jaringan perdagangan internasional menjadi tumpuan utama ekonomi negara ini. Hubungan yang panjang dengan Amerika Serikat memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi dan budaya kedua negara. Kanada adalah negara maju dan memiliki pendapatan per kapita nominal lima belas tertinggi sekaligus peringkat kesepuluh tertinggi dalam Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini termasuk yang tertinggi dalam indeks pembangunan manusia yang terdiri dari transparansi pemerintah, kebebasan sipil, kualitas hidup, kebebasan ekonomi, dan pendidikan. Kanada adalah sebuah wilayah di dalam Persemakmuran Bangsa-Bangsa, anggota Francophonie, dan sebagian dari beberapa institusi dan pengelompokan internasional dan antar pemerintah termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perjanjian Atlantik Utara, G7 (dahulu G8), Kelompok Sepuluh, G20, Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara dan forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik.

Hampir tidak terdapat perbedaan dengan negara-negara lainnya, Kanada saat ini juga berjibaku dengan penyebaran virus Covid - 19

yang masih belum diketahui kapan akan berakhirnya serangan dari virus yang sangat mematikan ini. Pemerintah Kanada melaporkan kasus virus corona pertamanya pada Sabtu (25/1/2020) waktu setempat. Ottawa menyampaikan Badan Kesehatan Publik Toronto (*Toronto Public Health*) telah menerima notifikasi yang mengonfirmasi dugaan virus corona atas seorang warga yang baru saja kembali dari Wuhan, China. Pejabat kesehatan Ontario mengatakan pada konferensi pers bahwa pasien tersebut adalah pria berusia 50 tahun, yang tiba di Toronto pada 22 Januari 2020 dan dirawat di rumah sakit pada hari berikutnya setelah mengalami gejala penyakit pernapasan. Pejabat kesehatan Ontario sedang menyelidiki rincian kontak pria itu dengan orang lain sejak tiba di Toronto. Indikasi awal adalah dia membawa pulang kendaraan pribadi setelah tiba di bandara Toronto dan kemudian paramedis membawanya ke rumah sakit. Pada awal penyebarannya di Kanada, Mayoritas kasus baru Covid-19 di Kanada berasal dari warga yang berusia di bawah 39 tahun, demikian penjelasan otoritas kesehatan Kanada pada Minggu (26/07).

Mereka memperingatkan bahwa kelompok dewasa muda tidak "tahan banting" terhadap penyakit ini. Data pengawasan nasional baru-baru ini menunjukkan bahwa orang dewasa muda berusia 20 hingga 39 tahun menjadi sumber kasus baru tertinggi di semua usia di Kanada, Hingga 22 Juli 2020, tercatat tingkat kasus positif Covid-19 tertinggi ada di antara pria dan wanita muda berusia 20 hingga 29 tahun (masing-masing 14,4 dan 13,8 kasus per 100.000 orang), diikuti oleh mereka yang berusia 30 hingga 39 tahun³. Selanjutnya, Kanada menemukan adanya dua kasus varian baru virus Corona di negaranya pada Sabtu (26/12/2020). Varian baru virus Corona itu awalnya terdeteksi di Inggris. Para ilmuwan mengatakan varian itu sekitar 40-70 persen lebih mudah menular daripada varian aslinya. Sejumlah negara lain, termasuk Australia, Italia, dan Belanda mengatakan mereka juga telah mendeteksi kasus baru Corona itu. Kedua kasus yang ditemukan di Kanada teridentifikasi pada pasangan di Ontario selatan saat provinsi itu mulai diisolasi pada Sabtu (26/12/2020).

Riwayat perjalanan, paparan, atau, kontak berisiko tinggi kedua orang itu tidak diketahui.

Penulisan esai ini menitikberatkan pada pembahasan tentang kondisi penyebaran dan penanggulangan virus corona yang saat ini sedang terjadi di negara Kanada, beberapa persoalan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah, Pertama, Bagaimana kondisi pandemi Covid-19 di Kanada?, Kedua, Bagaimanakah dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Kanada dan strategi Pemerintah Kanada?, dan Ketiga, apa saja yang dihadapi oleh Kanada terkait dengan pengadaan dan penggunaan vaksin Covid-19?.

Pentingnya penulisan esai ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kondisi penyebaran dan penanggulangan Covid-19 di negara Kanada, yang dalam pembahasannya, penulis menggunakan metode deskriptif analisis guna menggambarkan detail permasalahan yang saat terjadi di Kanada. Adapun nilai guna adalah berupa pengalaman menganalisa suatu permasalahan dengan penalaran ilmiah dan pendekatan yang realistik serta memberikan manfaat sosial berupa penambahan referensi bagi pembaca. Esai ini ditulis dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang kondisi dan upaya Pemerintah Kanada dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 dan bertujuan sebagai sumbang pikir penulis kepada Komando Atas sebagai bahan pembanding terhadap upaya pemerintah Kanada dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Sedangkan ruang lingkup tulisan ini dibatasi pada upaya Pemerintah Kanada dalam penanggulangan Covid-19 yang dibagi dalam sistematika pendahuluan, pembahasan dan penutup.

Pembahasan.

Pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan bahwa virus corona baru (Covid-19) sebagai pandemik global. Keputusan itu pun tidak hanya mengubah penilaian WHO terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh wabah Covid-19 dan tidak mengubah usaha mitigasi apapun, baik yang telah atau akan dilakukan WHO. Bahkan, penetapan Covid-19 sebagai pandemik juga tidak mengubah apa yang

harus dilakukan oleh negara-negara di dunia meskipun Covid- 19 tidak ditetapkan sebagai pandemik. Pesatnya penyebaran virus dengan nama ilmiah SARS-CoV-2 di Kanada misalnya, membuat pemerintah setempat harus memberikan respons cepat agar mencegah penyebaran virus. Salah satunya dengan cara menutup seluruh perbatasan negara mereka bagi siapapun yang bukan warga negara Kanada, warga negara asing yang memiliki status permanent resident, dan warga negara AS. Ketika jumlah negara yang terkena dampak Covid-19 meningkat, bersamaan dengan itu risiko penurunan ekonomi domestik dan internasional juga meningkat. Pandemik Covid-19 telah berdampak pada rantai pasokan, harga komoditas, dan pasar keuangan global.

Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G7 mengeluarkan pernyataan bersama pada awal Maret yang menegaskan kembali komitmen mereka untuk menggunakan semua alat kebijakan untuk melindungi terhadap risiko terhadap ekonomi global dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat.

Kondisi Penyebaran Virus Covid-19 di Kanada

Kasus kematian akibat Covid-19 di tingkat global terjadi kenaikan di beberapa negara di dunia. Tiga negara di antaranya mengalami kenaikan kasus kematian drastis, yakni Brasil, India, dan Italia. Angka kematian tingkat global antara 28 Februari dan 24 Maret 2021 terjadi kenaikan sebesar 61,16% atau naik dari 6.517 menjadi 10.503 kasus meninggal. Sedangkan di Brasil terjadi kenaikan sebesar 75,84% atau naik dari 1.275 menjadi 2.242 kasus. Dilansir dari laman www.worldometers.info pada tanggal 27 Maret 2021, angka penduduk Kanada yang terpapar Virus Covid-19 telah mencapai 956.655 jiwa, 22,826 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunian dan sebanyak 893.469 orang telah dinyatakan sembuh oleh otoritas setempat. Dilaporkan pula oleh laman ini bahwa sampai dengan 26 Maret 2021 terdapat penambahan sebanyak 5.093 kasus dan penduduk yang meninggal dunia sebanyak 36 orang.

Dari keseluruhan negara yang ada di dunia, Kanada saat ini menempati posisi ke 23 dalam penambahan angka kasus terjangkit virus Covid-19.



Seorang penumpang mengenakan masker saat tiba di Bandara Pearson, tak lama setelah Toronto Public Health menerima pemberitahuan kasus dugaan pertama virus corona di Kanada, di Toronto, Ontario, Kanada 26 Januari 2020. - Reuters

Perekonomian Kanada di Tengah Pandemi Coronavirus.

Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang mendalam pada perekonomian Kanada dan hampir mengarah ke dalam jurang resesi. Aturan social distancing oleh pemerintah berdampak membatasi aktivitas ekonomi di negara tersebut. Perusahaan mulai mempertimbangkan pemutusan hubungan kerja massal, yang sebagian besar di subsidi malalui kebijakan upah darurat yang dikeluarkan oleh pemerintah Kanada . Namun terlepas dari upaya ini, tingkat pengangguran Kanada telah mencapai 13,5% pada Mei 2020, yang merupakan angka tertinggi sejak 1976.

Khusus di tahun 2020, terdapat banyak acara berskala besar yang rencananya berlangsung di Kanada yang dibatalkan atau ditunda. Sektor pariwisata dan perjalanan udara Kanada juga terpukul sangat parah karena adanya kebijakan tentang pembatasan perjalanan. Sementara itu sektor pertanian juga terdampak akibat Covid-19 yang ditandai adanya kekhawatiran dari para petani akan terjadinya kebangkrutan. Demikian pula halnya dengan perilaku konsumen pasar yang terkena dampak Coronavirus, pada awal pandemi, sebagian besar toko ditutup untuk pengunjung yang datang dengan pengecualian toko kelontong dan apotek, yang menerapkan aturan jarak sosial yang kuat di tempat mereka. Aturan ini juga diterapkan di bisnis Kanada lainnya saat mulai dibuka kembali pada bulan-bulan berikutnya.

Namun, Ekonomi Kanada mencatat ekspansi lebih dari perkiraan pada bulan Oktober 2020, mengurangi kekhawatiran perlambatan tajam di tengah gelombang kedua virus corona. Dilansir Bloomberg, Badan Statistik Kanada melaporkan pada Rabu (23/12/2020), produk domestik bruto (PDB) tumbuh 0,4 persen pada Oktober dari bulan sebelumnya. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi ekonomi yang memperkirakan ekspansi 0,3 persen. Ekonomi Kanada pulih kuat pada kuartal ketiga, namun gelombang kedua virus corona menghambat prospek jangka pendek, dengan rata-rata kasus baru melampaui 6.600 per hari. Jumlah ini lebih dari tiga kali lipat dari gelombang pertama pada bulan April dan Mei.

Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau mengatakan, perekonomian Kanada bisa kembali pulih setelah vaksin virus corona berhasil dikembangkan. Pengembangan vaksin itu membutuhkan waktu 18 bulan. Trudeau menyebut, saat ini Kanada berada di persimpangan antara memiliki hasil terbaik dan menghadapi kemungkinan terburuk. Pemerintah dijadwalkan menggelar pertemuan dengan *House of Commons* pada Sabtu untuk membahas langkah-langkah penyelamatan ekonomi, termasuk subsidi upah senilai 73 miliar dolar Kanada. Badan anggaran parlemen Kanada memperkirakan defisit anggaran akan membengkak menjadi 184,2 miliar dolar pada tahun fiskal 2020-2021, dari sebelumnya 27,4 miliar dolar pada tahun fiskal 2019-2020.



Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau

Program Vaksinasi Kanada

Kanada dapat dikategorikan sebagai negara yang berkembang, Namun, negara kategori maju itu masih berjuang dalam hal secara nyata menerima beberapa dosis tersebut, dan untuk mendistribusikannya hingga ke bentuk ampul jarum yang siap disuntikkan ke lengan warganya. Negeri maple tersebut juga sibuk menyelamatkan muka atas kenyataan bahwa mereka harus menarik pasokan vaksin Covid-19 dari inisiatif inokulasi global yang dikenal sebagai Covax, yang mengumpulkan dana dari negara kaya untuk menyokong vaksinasi bagi negara berpenghasilan rendah karena Kanada adalah satu-satunya anggota kelompok G7 dari negara-negara kaya yang terdaftar sebagai penerima Covax pada tahap ini.

Pada Jumat 12 Februari 2021, Perdana Menteri Kanada menjanjikan peningkatan besar dalam dosis yang datang ke Kanada dari vaksin Pfizer dan Moderna --dua varian vaksin yang saat ini diotorisasi untuk digunakan di negara itu, pemerintah mengumumkan bahwa Kanada akan mendapatkan beberapa dosis Pfizer lebih awal dari jadwal dan telah membeli empat juta dosis tambahan vaksin Moderna. Dalam upaya untuk meningkatkan produksi domestik, Kanada mengumumkan pekan lalu bahwa mereka menandatangani kesepakatan pertamanya untuk memungkinkan vaksin virus corona asing, yang dikembangkan oleh Novavax, untuk diproduksi secara lokal. Namun, vaksin itu masih dalam uji coba fase tiga dan fasilitas produksi Montreal tetap dibangun. Selain itu, negara ini telah mengesahkan enam dosis yang akan diambil dari setiap botol vaksin Pfizer daripada lima yang semula dimaksudkan. Kanada saat ini telah menandatangani kesepakatan dengan tujuh pemasok vaksin - Moderna dan Pfizer, serta perusahaan farmasi yang saat ini otorisasi-nya masih tertunda seperti Astra Zeneca dan Johnson and Johnson- dengan total lebih dari 400 juta dosis. Tapi tampaknya itu tidak diposisikan untuk prioritas pengiriman vaksinasi dua dosis. Hal itu sebagian disebabkan karena Kanada memutuskan untuk berinvestasi dalam vaksin dari

pabrik-pabrik Eropa, takut bahwa AS, di bawah mantan presiden Donald Trump, akan mengeluarkan larangan ekspor. Tetapi pabrik-pabrik Eropa sendiri tengah berjuang dengan pasokan vaksin dan baru-baru ini adalah Uni Eropa, bukan AS, yang telah mengancam larangan tersebut.

Selain itu, Kanada pun tidak memiliki kapasitas produksi domestik untuk vaksin. Ada keterlambatan pengiriman, dengan pesanan yang dikurangi atau dibatal-kan, dalam beberapa minggu terakhir untuk inokulasi Moderna dan Pfizer. Menurut majalah Maclean, pasokan Kanada saat ini tertinggal sekitar satu juta dosis dari target. Pada minggu ini, 2,43% dari populasi telah menerima setidaknya satu dosis vaksin. Hampir 12% orang berusia atas 80 dan lebih dari 55% tenaga kesehatan prioritas telah menerima setidaknya satu suntikan, menurut data pemerintah.

Merujuk pada kondisi yang telah dijabarkan di atas, guna menekan jumlah kasus positif COVID-19 di Kanada dan guna mencegah penyebaran varian baru SARS-CoV-2 (varian B117), pada tanggal 29 Januari 2021, Pemerintah Kanada mengeluarkan kebijakan pembatasan penerbangan internasional, di mana kedatangan internasional hanya dibuka di 4 (empat) bandara, yakni: *Montréal-Trudeau International Airport, Toronto Pearson International Airport, Calgary International Airport, dan Vancouver International Airport*. Penumpang yang datang melalui jalur udara harus melakukan tes molekuler pada saat kedatangan dan menjalankan karantina di hotel selama 3 (tiga) hari. Pemerintah Kanada juga memberlakukan tes molekuler 72 jam sebelum kedatangan bagi penumpang yang datang melalui jalur darat. Pemerintah Ontario terlebih dahulu memberlakukan kebijakan ini, dimulai pada Senin, 1 Februari 2021.

Selain adanya kebijakan tes molekuler bagi penumpang saat kedatangan, Pemerintah Kanada juga memperluas pengawasan tes tersebut di daerah perbatasannya dengan Amerika Serikat, baik pada jalur darat maupun laut. Informasi selengkapnya bisa diakses.

Sedangkan di bidang ekonomi salah satu Langkah besar yang digulirkan oleh Kanada adalah dengan menggelontorkan paket bantuan ekonomi terbesar bagi negara tersebut sejak Perang Dunia II. Melansir BBC, pengeluaran itu akan membawa defisit ke 381,6 miliar dollar Kanada (Rp 4,1 kuadriliun) pada Maret 2021. Pengumuman ini adalah pembaruan fiskal penuh pertama dari pemerintah Liberal Kanada sejak dimulainya pandemi. Tepat saat negara itu berjuang melawan gelombang kedua infeksi Covid-19.

Rencana fiskal ini menjanjikan 100 miliar dollar Kanada (Rp 1,1 kuadriliun) untuk membantu provinsi dan wilayah meningkatkan pengendalian infeksi Covid-19 di fasilitas perawatan jangka panjang. Termasuk untuk membantu sektor bisnis yang terkena dampak paling parah. Diantaranya industri di sektor pariwisata, perjalanan, dan seni. Mereka yang memenuhi syarat akan mendapat pinjaman bisnis hingga 1 juta dollar Kanada (Rp 11 miliar) dengan jangka waktu 10 tahun. Bagi keluarga berpenghasilan rendah dan menengah paket ini menjanjikan bantuan hingga 1.200 dollar Kanada (Rp 13 juta) untuk setiap anak di bawah 6 tahun. Sebesar 100 miliar dollar Kanada (Rp 1,1 kuadriliun) tambahan juga akan diarahkan ke perjanjian pembelian vaksin.

Kesimpulan

Dari seluruh uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kanada telah berupaya secara optimal dalam penanggulangan penyebaran wabah Covid-19 yang telah menyerang negara tersebut sejak ditemukan pertama kali pada Januari 2020. Kebijakan yang dilakukan mencakup menekan angka kematian akibat Covid-19, kebijakan pelaksanaan vaksinasi dan perbaikan dan perkuatan ekonomi yang terdampak akibat Covid-19.

Mayor Kav Wihardjoko adalah Abituren Akademi Militer 2002 dan Lulusan DIKREG LX 2021, Saat ini menjabat sebagai Kabag Sdirbinlitbang Insani Pussenkav Kodiklatad.



**BERSATU, BERJUANG,
KITA PASTI MENANG**



SESKOAD
Terbaik, Terhormat dan Disegani

ISSN 2086-9312



9772086931295